

SIROJUL ARIFIN SHOFA

POTENSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

**Studi Gerakan Sosial Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat di Pulau Madura**







**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 72
Ketentuan Pidana
Ketentua Sanksi

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POTENSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

**STUDI GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT DI PULAU MADURA**

**Penulis:
SIROJUL ARIFIN SHOFA, SE., M.A.**



YPM (Young Progressive Muslim) Press

POTENSI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

STUDI GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PULAU MADURA

Copyright © 2020, Sirojul Arifin Shofa

Design Cover: Ifan Pratama Putra
Hak cipta dilindungi undang-undang

Xiv, 132 hlm.
ISBN 978-602-5576-60-7

Cetakan Pertama, Agustus 2020

Didistribusikan oleh:

YPM (Young Progressive Muslim) Press

Jl. Talas II, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan

Website: <http://www.ypm-publishing.com/>

Email: y.progressive.m@gmail.com

KATA PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan alam semesta, yang telah memberikan Penulis kesempatan serta anugerah besar melalui *rahmat* dan *ma'unah*-Nya dalam penyelesaian penulisan tesis dengan penuh semangat perjuangan. Menuntaskan studi di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebuah pengalaman berharga, perjuangan keras, penuh makna, meyenangkan serta mengesankan bagi Penulis.

Sholawat beserta *salam* semoga tetap tumpahruai ke haribaan baginda Nabi kita, beliau adalah putra padang pasir, Revolusioner Islam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terbaik, menjadikan kita ummat terbaik, ummat moderat serta ummat terpilih bagi sejarah peradaban manusia sepanjang masa.

Penulis menyadari karya ilmiah ini masih jauh dari standar kualitas sempurna, apa yang kami lakukan ini merupakan upaya maksimal dengan keterbatasan yang Penulis miliki. Selain dari pada itu, kerja lelah dan tugas yang terasa cukup berat ini tidak terlepas dari kerelaan, ketulusan, keikhlasan dan kemurahan hati beberapa pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini dengan akses berupa pemberian motivasi, bimbingan, pengarahan petunjuk dan masukan-masukan yang tidak kecil nilainya bagi Penulis. Sehingga penulisan buku ini bisa terselesaikan secara baik walaupun ada sedikit permasalahan.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Ph. D. (Direktur Sekolah Pascasarjana) dan Arif Zamhari M.Ag., P.hD (Ketua Program Studi Magister) yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian studi.
2. Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag selaku pembimbing Penulis yang sabar, telaten dan perhatian memberikan arahan, bimbingan, perbaikan maupun motivasi penyelesaian tesis.
3. Seluruh dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diantaranya: Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. Atho Mudzhar, MSPD., Prof. Dr. Yunasril Ali, MA., Prof. Dr. Salman Harun, MA., Prof. Dr. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. Zainun Kamaluddin Faqih, MA., Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA., Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA., Prof. Dr. Zaitunah Subhan, MA., Prof. Dr. (HC). dr. MK. Tadjudin, Sp. And (alm), Prof. Dr. Drs. KH Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM., Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum., Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MA., Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M. Si., Dr. JM Muslimin, MA., Dr. Yusuf Rahman, MA., Dr. Usep Abdul Matin, MA. Ayang Utriza Yakin, DEA., Ph.D., Dr. Fuad Jabali, MA., Dr. Kusmana, MA., Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA., Asep Saepudin Jahar, MA. Ph. D.,

serta para dosen dan tenaga pengajar lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan wawasan peradaban dunia dari awal hingga akhir perkuliahan. *Jazākumullah Aḥsan al-Jazā'*.

4. Abah tercinta H. Nur Suyanto, S.Pd.I dan Ummah terkasih Hj. Ida Farida, S.Pd.I yang setiap langkah dan senyuman ikhlasnya, doa dan motivasinya, harapan dan ikhtiyarnya selalu menjadi panutan kepada semua anak-anaknya. Terimakasih Abah Ummah, telah mengizinkan anakmu ini untuk terus berkelana menuntut ilmu, dan maafkanlah bila anakmu ini belum bisa membanggakan. Semoga Abah dan Ummah selalu diberikan umur panjang, sehat dan berkah. *Amin....*
5. Ade Kandung terbaikku Hj. Shofiana Utami, S.Pd dan Hj. Nuri Al-Vina yang turut serta memberikan motivasi serta doa terbaiknya.
6. Teman-teman seperjuangan satu angkatan (angkatan 2017) Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta yang saling memberikan dukungan doa, moral ataupun moril untuk bersama-sama maju mengukir sejarah keilmuan. Semoga kita selalu penuh kebersamaan dalam persaudaraan.
7. Sahabat saya Gus Miftahus Surur, Bang Dr. Iksan Kamil Sahri, Bang Asy'ari, Mas Dr. Farhan dan Ahmad Nurul Huda yang selalu memberikan semangat perjuangan, bantuan motivasi penuh intrik kelucuan dengan slogan susah senang masing-masing tapi makan dan tidur tetap bersama.
8. Istri tercinta, calon ummah terbaik dari anak-anakku yang tersayang Halimah, S.Pd., M.Pd yang selalu tiap waktu mendoakan, memotivasi, menemani menulis serta terkadang memarahi untuk bisa segera bisa menyelesaikan secara serius karya ilmiah ini.

Terakhir, Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini sangatlah jauh dari kata baik—apalagi sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat terbuka atas berbagai kritikan konstruktif, saran maupun masukan dari segenap pembaca agar penelitian ini bisa lebih baik. Semoga Allah SWT menjadikan apa yang Penulis tulis ini, menjadi amal ibadah, bermanfaat serta berkah bagi Penulis khususnya dan orang banyak pada umumnya, serta bagi pecinta kajian Islam. Amin. Selamat membaca...

Jakarta, 21 Desember 2019

SIROJUL ARIFIN SHOFA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	w = و
dh = ذ	‘ = ع	h = ه
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vocal

1. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dhammah	u	U

2. Vocal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـ	Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I
◌َـو	Fatḥah dan Wau	Au	A dan W

Contoh:

حسين : Ḥusain

حول : Ḥaul

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـ	Fatḥah dan Alif	ā	A
◌ِـ	Kasrah dan Ya	ī	I
◌ُـ	Damāh dan Wau	ū	U

C. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ditulis dengan “ha”, baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak, contoh (مرأة) , madrasah (مدرسة)

Contoh:

المدينة المنورة: Al-Madīnah Al-Munawwarah

D. Shaddah

Shaddah atau tashdid ditransliterasi, dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah tersebut.

Contoh:

ربنا: Rabbanā

شوال: Shawwāl

E. Kata Sandang

Kata sandang “ال” dilambangkan berdasar huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf syamsiyah maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis “al” jika diikuti dengan huruf qamariyah. Selanjutnya “ال” ditulis lengkap baik menghadapi al-Qamariyah contoh kata al-Qamar (القمر) maupun al-Syamsiyah seperti kata al-Rajulu (الرجل).

Contoh:

الشمس: al-Shams

القلم: al-Qalam

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata-kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal الله, Asmaul Husna dan Ibn, kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan konsistensi dalam penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAGIAN 1`	
PROLOG	1
BAGIAN 2	
DISKURSUS KEUANGAN MIKRO ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN	13
A. Gerakan Sosial	13
B. Rekontruksi Pemberdayaan Ekonomi Mikro Islam	20
C. Revolusi Ekonomi Islam di Era Digitalisasi Ekonomi	27
D. Keuangan Mikro Islam Sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional: Peluang dan Tantangan	31
1. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	36
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	38
BAGIAN 3	
GAMBARAN OBJEKTIF LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ISLAM PULAU MADURA	40
A. Sejarah Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri	40
B. Badan Hukum dan Struktur Organisasi	42
C. Visi Misi Lembaga	45
D. Perkembangan Usaha	46
1. Aset	46
2. Jumlah Anggota	48
BAGIAN 4	
KEUANGAN MIKRO ISLAM: PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT, RELASI DAN INSTITUSI	50
A. Relasi Nahdlatul Ulama dan Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Madura	50
B. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	74
1. Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Kesejahteraan	74
a. Hasil Validitas dan Reliabilitas dengan metode CFA	74
b. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas	75
c. Uji Normalitas	76

d. Analisis SEM Model <i>Path Coefficients</i>	77
e. Analisis SEM model <i>T Values</i>	80
f. Uji Kecocokan Model (<i>Goodness of Fit Index</i>)	81
g. Ringkasan Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas	82
C. Strategi Relasi dan Pemberdayaan	84
1. Militansi Organisasi dan Tokoh Masyarakat	84
2. Pondok Pesantren	87
3. Pemberdayaan dan Pendampingan	91
4. Produk Layanan	98
BAGIAN 5	
<i>PENUTUP</i>	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
GLOSARIUM	127
INDEKS	129
BIODATA PENULIS	131

DAFTAR TABEL

1.1 : Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2017	8
1.2 : Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Madura Tahun 2013-2018	9
1.3 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia Sekolah Di pulau Madura Tahun 2014-2015	10
2.1 : Karakteristik UMKM dan UB	37
2.2 : Kriteria UMKM dan UB	38
3.1 : Jumlah Anggota Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan Tahun 2012-2018	48
3.2 : Jumlah Anggota KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan Tahun 2016-2019	48
3.3 : Jumlah Anggota KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan Tahun 2012-2019	48
4.1 : Problematika dan Solusi yang Diharapkan.....	62
4.2 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018	64
4.3 : Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016-2017	71
4.4 : Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas	75
4.5 : Hasil Perhitungan Uji Kecocokan Model <i>Goodness of Fit Index</i> (GFI)	82
4.6 : Analisis Kebutuhan Pemberdayaan dan Pendampingan Bagi UMKM Dari Berbagai Stakeholder di Pulau Madura	96
4.7 : Peta Pemberdayaan dan Pendampingan Oleh Lembaga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Pulau Madura	97
4.8 : Produk Layanan Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU	98
4.9 : Produk Layanan BMT NU	98
4.10 : Produk Layanan BMT UGT Sidogiri	101

DAFTAR GAMBAR

1.1 : Nilai Tambah (harga pasar) Usaha Mikro dan Kecil	7
1.2 : Petumbuhan Produksi Usaha Mikro dan Kecil	7
1.3 : Kerangka Konsep Penelitian	17
2.1 : Peringkat 10 Besar Total Asset Keuangan Islam Global 2017	28
3.1 : Struktur Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan	42
3.2 : Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan	43
3.3 : Struktur Oraganisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan	44
3.4 : Perkembangan Asset Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan Tahun 2012-2018	46
3.5 : Perkembangan Asset KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan Tahun 2016-2019	47
3.6 : Perkembangan Asset KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan Tahun 2012-2019	47
4.1 : Hasil Validitas dan Reliabilitas dengan metode CFA	75
4.2 : Hasil Uji Normalitas	76
4.3 : Hasil Analisis SEM Model <i>Path Coefficients</i>	77
4.4 : Hasil Analisis SEM Model T Value	81
4.5 : Hasil Uji Kecocokan Model <i>Goodness of Fit Index</i> (GFI)	81

DAFTAR SINGKATAN

ACTORS	: <i>Authority, Confidence and Competence, Truth, Oppurtunity, Responcibilty and Support Organization</i>
AGFI	: <i>Adjusted Goodnes of Fit Index</i>
AIC	: <i>Akaike Information Criterion</i>
AOP	: <i>Account Officer Pembiayaan</i>
AOSP	: <i>Account Officer Simpan Pinjam</i>
ATM	: <i>Automated Teller Machine</i>
BMT	: <i>Bayt al-Maal wat Tamwil</i>
BoP	: <i>Base of Pyramid</i>
BPS	: <i>Badan Pusat Statistik</i>
BTI	: <i>Barisan Tani Indonesia</i>
CAIC	: <i>Consistent Akaike Information Criterion</i>
CFA	: <i>Confirmatory Factor Analysis</i>
CFI	: <i>Comparative Fit Index</i>
CR	: <i>Construct Realibility</i>
CTAD	: <i>Conference on Trade and Development</i>
CTM	: <i>Centre for Technology Management</i>
DPS	: <i>Dewan Pengawas Syariah</i>
ECVI	: <i>Expected Cross Validation Index</i>
<i>FinTech</i>	: <i>Financial Technology</i>
GFI	: <i>Goodness of Fit Index</i>
GOF	: <i>Goodness of Fit</i>
HBNO	: <i>Hoofd Bestuur Nahdlatol Oelama</i>
IBBL	: <i>Islamic Bank Bangladesh Limited</i>
IFI	: <i>Incremental Fit Index</i>
KJKS	: <i>Koperasi Jasa Keuangan Syariah</i>
KOPSIM	: <i>Koperasi Serba Usaha Syirkah Mu'awanah</i>
KSPPS	: <i>Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah</i>
LAKPESDAMNU	: <i>Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama'</i>
LAZISNU	: <i>Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah Nahdlatul Ulama'</i>
LKKNU	: <i>Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama'</i>
LKM	: <i>Lembaga Keuangan Mikro</i>
LKMS	: <i>Lembaga Keuangan Mikro Syariah</i>
LKNU	: <i>Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama'</i>
LP MWC	: <i>Lembaga Perekonomian Majelis Wakil Cabang</i>
LPNU	: <i>Lembaga Pengusaha Nahdlatul Ulama'</i>
LPPNU	: <i>Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama'</i>
LPS	: <i>Lembaga Penjamin Simpanan</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MMU	: <i>Maslahah Mursalah lil Ummah</i>

NCP	: <i>Non Centrality Parameter</i>
NFI	: <i>Normed Fit Index</i>
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
NU	: Nahdlatul Ulama'
PBNU	: Pengurus Besar Nahdltul Ulama'
PGFI	: <i>Parsimonious Goodnes of Fit Index</i>
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNFI	: <i>Parsimonious Normed Fit Index</i>
PRIMKOPAN	: Primer Koperasi An-Nisa'
RFI	: <i>Relative Fit Index</i>
RMSEA	: <i>Root Mean Square Error of Approximation</i>
RMSR	: <i>Root Mean Square Residual</i>
RPJM	: Rencana Program Jangka Menengah
RPJP	: Rencana program Jangka Panjang
SDA	: Sumber Daya Alam
SDI	: Sumber Daya Insani
SEM	: <i>Sructur Equation Model</i>
SI	: Sarikat Islam
STAF	: <i>Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah</i>
TITSYA	: Trading Berpola IT dan Syariah
TLI	: <i>Tucker Lewis Index</i>
UB	: Usaha Besar
UGT	: Usaha Gabungan Terpadu
UKM	: Usaha Kecil dan Mikro
UMKM	: Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah
UNIDO	: <i>United Nations Industrial Developmet</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
VE	: <i>Variance Extracted</i>
ZISWAF	: Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf

BAGIAN SATU PROLOG

A. Prolog

Pemberdayaan sudah mulai dikenal tahun 1980 yang bersamaan dengan diseminasi *good governance* di dunia. Sedangkan gaung pemberdayaan di Indonesia dimulai pada akhir tahun 2006.¹ Pemberdayaan sendiri lebih banyak identik dengan koperasi dan *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT), sebab koperasi dan BMT langsung bersentuhan dengan lingkungan masyarakat kecil dan menengah. Keduanya sering disebut salah satu langkah efektif dalam pemberdayaan dan pembangunan ekonomi kerakyatan.² Pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan koperasi menggunakan sumber keuangan masyarakat dapat menerapkan pembangunan dan pemberdayaan berkelanjutan (*sustainable*).³

Pengentasan kemiskinan di level rendah menjadi prioritas kinerja koperasi. Koperasi bisa berperan menhadapi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial untuk terus berupaya menanggulangi serta meminimalisir tingkat kemiskinan.⁴ Diketahui secara bersama bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan sosial, tetapi ada beberapa faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut seperti, tingkat pendidikan yang rendah, kepemilikan lahan yang semakin sempit, akses informasi serta akses ke pasar yang sangat sulit.⁵

Di era perekonomian global saat ini, koperasi dan *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia sebenarnya merupakan penggerak perekonomian secara masif di kancan nasional. Daya saing yang sangat ketat sudah sangat terasa, masyarakat yang tidak dapat mengejar perkembangan zaman digitalisasi saat ini, tidak bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Maka dari itu,

¹ Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban" *Jurnal ASKETIK Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2016*, 45-55, 48. <https://jurnal.stainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/410>

² Handayana, Rachmad, and Sjahrul Bustaman. "Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan." *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor* (2007): 29-38.

³ Disampaikan oleh Asih Marini Wulandari pada acara *Business Conference* tanggal 6 Desember 2012 di Fisip Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dengan judul "*Microfinance Syariah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*", 2. http://repository.upnyk.ac.id/4833/3/3_Asih_ABUPNYK.pdf

⁴ Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban" *Jurnal Asketik Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2016*, 45-55, 45. <https://jurnal.stainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/410>

⁵ Jhon Kenneth Galbraith. "*The Nature Mass Peverty*" (London: Harvard University Press, 1979), 32.

harus ada revitalisasi dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik secara nasional maupun secara internasional melalui rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan.⁶

Lembaga keuangan mikro merupakan usaha pemberdayaan skala kecil-menengah dengan posisi strategis. Lembaga tersebut tidak hanya menjadi penyedia layanan akses ekonomi seperti permodalan, lebih dari itu keuangan mikro menjadi penggerak ekonomi umat dari tingkat *low* (rendah) *middle* (menengah). Lembaga keuangan mikro merupakan sarana penting untuk meningkatkan produktivitas umat.⁷

Model lembaga keuangan mikro Islam yang sangat fenomenal di Indonesia seperti *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah yang disebut cara paling tepat untuk pengentasan kemiskinan di dunia. Segmen BMT menyasar dan sangat cocok untuk kaum yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf kehidupan.⁸

Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri adalah lembaga keuangan mikro Islam yang banyak digandrungi oleh masyarakat di pulau Madura. Ketiga lembaga tersebut berafiliasi langsung dengan organisasi Islam terbesar di tanah air ini ialah Nahdlatul Ulama'. Gerakan dari masing-masing lembaga saling melengkapi, bersaing dan saling bekerjasama. Koperasi An-Nisa' Muslimat NU dipelopori oleh gerakan ibu-ibu Muslimat NU, BMT NU dipelopori oleh gerakan bapak-bapak pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Gapura Sumenep dan BMT Sidogiri di pelopori oleh gerakan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan.

Muslimat Nahdlatul Ulama' yang merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama' juga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi An-Nisa'. Koperasi An-Nisa' tahun 2017 berjumlah 143 koperasi yang sudah berbadan hukum di seluruh Indonesia.⁹ Komitmen Muslimat memberdayakan masyarakat kalangan kecil-menengah ditunjukkan oleh semangat pengurus koperasi untuk terus berbenah dan memperbaiki kinerja, fasilitas dan pelayanan koperasi kepada seluruh anggota dan simpatisan. Koperasi lahir seiiring gagap gempita reformasi, memiliki visi "*mewujudkan*

⁶ Disampaikan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang diwakili oleh Agus Muharam (Sekjen Kemenkop UKM) pada acara Kongres XVII Muslimat NU pada tanggal 25 November 2016 di asrama haji Pondok Gede Jakarta.

⁷ Mohammed El-Komi & Rachel Croson, *Experiment in Islamic Microfinance*. (Dallas: University of Texas, 2011), 1-2.

⁸ Hans Dieter SEIBEL, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 23, no. 1 (2008): 86–103, <https://www.jstor.org/stable/41220061>.

⁹ Disampaikan oleh ketua umum pengurus pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peringatan hari lahir Muslimat NU ke-71 di masjid Istiqlal Jakarta. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 di laman: <http://www.jatimtimes.com/baca/152169/20170328/215005/peringatan-harlah-ke71-muslimat-nu-23-ribu-warga-muslimat-penuhi-istiqlal/>

pemberdayaan ekonomi anggota koperasi yang mandiri menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur”. Berikut misi koperasi, “*mengoptimalkan fungsi kelembagaan koperasi An-Nisa’ mulai dari induk, puskop dan koperasi primer untuk melayani anggota sampai di tingkat basis*”.¹⁰

Koperasi An-Nisa’ IX Muslimat NU Kabupaten Pamekasan Madura merupakan satu diantara 143 Koperasi An-Nisa’ IX Muslimat NU di Indonesia. Koperasi tersebut didirikan demi memajukan kepentingan ekonomi anggota dan masyarakat umum dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Pengelolaan koperasi diperhatikan secara ketat oleh Induk Koperasi An-Nisa’ (INKOPAN) pengurus pusat muslimat NU, sehingga penyaluran dan pemberdayaan ekonomi benar-benar menjadi solusi perkenomiann bagi masyarakat kecil-menengah. Hal itu dibuktikan dengan Koperasi An-Nisa’ IX Muslimat NU Pamekasan menjadi primer koperasi terbaik wilayah Jawa Timur tahun 2017.¹¹ Primer Kopersi An-Nisa (PRIMKOPAN) Pamekasan juga mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada para anggota serta masyarakat umum, dengan harapan dapat meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam usaha. Ketua koperasi An-Nisa’ Pamekasan mengatakan bahwa An-Nisa’ mirip dengan Grammen Bank di Bangladesh,¹² anggotanya 97% didominasi oleh kaum hawa.¹³

BMT NU semenjak berdiri pada tahun 2004 di Sumenep mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam merespon kebutuhan masyarakat Madura. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan modal dan aset yang dimiliki dan dikelola secara prinsip syariah oleh pihak BMT NU mencapai 1,2 trilyun di pertengahan tahun 2018 dengan 40 kantor cabang yang berawal dari aset 400.000, menjadi 7 milyar pada tahun 2010.¹⁴

Sedangkan BMT Sidogiri yang memang dipelopori oleh orang-orang pesantren sudah tidak asing lagi namanya di telinga masyarakat, terutama bagi masyarakat Madura sendiri, sebab masyarakat Madura sendiri penyumbang santri

¹⁰ Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 di laman: <https://www.muslimat-nu.com/koperasi-an-nisa-tingkatkan-ekonomi-umat/>

¹¹ Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 di laman: <https://www.muslimat-nu.com/update-ilmu-koperasi-muslimat-nu-pamekasan-studi-banding-ke-malang/>

¹² Kisah sukses Grameen Bank dengan kinerja luar biasa untuk mencapai dalam memberikan pinjaman kepada 7,9 juta peminjam, di mana 97% adalah perempuan dan dengan tingkat pembayaran adalah 98% menjadi besar dalam banyak studi ekonomi dan agenda pengurangan kemiskinan. Bisa dilihat juga dalam Yasushi Suzuki, Sigit Pramono, and Rufidah Rufidah, “Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Findings From Indonesia,” *SHARE Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (June 30, 2016), <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.910>.

¹³ Suzuki, Pramono, and Rufidah. Rufidah, “Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Findings from Indonesia,” *SHARE Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (June 30, 2016), <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.910>.

¹⁴ Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 di laman: <http://www.nu.or.id/post/read/86208/gelar-rat-paripurna-bmt-nu-jatim-kini-kelola-dana-rp-12-trilyun>

terbanyak bagi pesantren Sidogiri. BMT Sidogiri yang resmi beroperasi pada tahun 2000 M sudah memiliki 34 kantor cabang di 34 provinsi dan satu di mancanegara di Malaysia pada tahun 2018. Sedangkan aset yang dimiliki pada tahun 2017 sebesar 2,4 trilyun dengan 16.647 anggota.

Di Indonesia pada umumnya ekonomi syariah melalui gerakan-gerakan yang dimunculkan akhir-akhir ini sudah mulai memberikan hasil, tetapi perlu kerja keras lagi untuk bisa bersaing dengan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama dipakai oleh banyak Negara. Ada yang berpendapat bahwa sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia sendiri secara khusus ialah ekonomi pancasila sebab sistem perekonomian yang diusung di Indonesia merupakan sistem perekonomian pancasila yang lebih mendekati kepada sistem ekonomi secara syariah, sekalipun sistem ekonomi pancasila masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurut para penggiat ekonomi Islam,¹⁵ Nurullah¹⁶ mengatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia saat adalah sistem demokrasi ekonomi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekonomian sebelumnya. Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah demokrasi ekonomi pancasila yang memiliki ciri-ciri: *pertama*, perekonomian yang berlandaskan pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting dipertimbangkan adalah moral, *kedua*, perekonomian berazaskan pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial, *ketiga*: perekonomian berdasarkan Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme mempengaruhi kebijakan ekonomi, *keempat*: sistem perekonomian pancasila tegas serta jelas adanya keseimbangan (*equality*) perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.¹⁷

Perekonomian Indonesia dibangun secara demokrasi yang mana kegiatannya jelas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi menuntut terlaksananya emansipasi dan partisipasi ekonomi seluruh rakyat Indonesia, sesuai yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 bahwa azas dan sendi-sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun atas dasar kebersamaan sebagai usaha bersama dan asas kekeluargaan.¹⁸

Pembangunan ekonomi nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 1945

¹⁵ Sistem tersebut pernah dipakai oleh penguasa orde baru pada saat itu, akan tetapi hal tersebut dijadikan perantara dalam mempertahankan kepentingan penguasa. Saat ini segala ajaran yang berbau orde baru, termasuk system ekonomi pancasila juga dianggap tidak pantas lagi untuk disebut-sebut kembali. Coba lihat Mubyarto "*Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi*" dalam bukunya "*Ekonomi Kerakyatan*" (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), 4.

¹⁶ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama' (STISNU) Nusantara Tangerang Banten.

¹⁷ Nurullah "Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi Indonesia" *Jurnal HIKAMUNA Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2016*, 16-32, 16.

¹⁸ Sri Edi Swasono. "*Keindonesiaan; Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*". (Yogyakarta: Aditya Media, 2015), 168.

pasal 33 tidak dapat terwujud tanpa gotong royong dari berbagai pihak. Di Indonesia sendiri ada organisasi keagamaan besar yang diidentikkan dengan kelompok moderat yaitu Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah¹⁹ yang turut serta dalam pengembangan perekonomian nasional. Komitmen tersebut dapat kita temukan dalam divisi ke-organisasian mereka dalam bidang ekonomi.

Gerakan pemberdayaan ekonomi ummat yang melalui Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menjawab jeritan para pengusaha kecil kelas bawah. Keberadaan 3 (tiga) lembaga tersebut ditantang untuk dapat memberikan penting di tengah sosial masyarakat luas, khususnya bidang perekonomian. Bidang tersebut bisa bersinergi dengan pemerintahan untuk membangun perekonomian nasional, sehingga bisa diharapkan Koperasi Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri menjadi pelopor dan gerakan ekonomi terutama ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketidakadilan dalam perekonomian. Ketiganya harus benar-benar menjadi *problem solver* ummat di tengah perekonomian pasar bebas.²⁰

Di bidang perekonomian, Nahdlatul Ulama' (NU) memiliki program yang telah direalisasikan dengan baik:²¹

1. Pengembangan terhadap usaha kecil menengah dan koperasi lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama' (LPNU)
 - a. Pembinaan dan pengembangan 190 kelompok usaha syirkah muawanaah (KSM) di seluruh Indonesia.
 - b. Pembinaan dan pengembangan 117 koperasi serba usaha syirkah muawanaah (KOPSIM) di seluruh Indonesia.
2. Pelatihan usaha kecil menengah dan koperasi
 - a. Pelatihan manajemen UKM dan koperasi, di Jakarta pada tanggal 28-30 September 2004 yang bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri.
 - b. Pelatihan ekonomi syariah yang mencakup pelatihan usaha mikro syariah, keuangan syariah dan lain-lain untuk Pondok Pesantren se-Jawa dan Sumatera, kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) syariah.
 - c. Pelatihan Manajemen BMT untuk Pimpinan Pesantren dan UKM se-Jawa Tengah di kota Pati yang bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.²²

¹⁹ Andi Purwono, "Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama' (NU) Indonesia". *Jurnal Politik Profetik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 2 No. 2 tahun 2013, 4, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=445596>

²⁰ Deden Suparman, "Kewirausahaan-Sosial Berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) (Studi Analisis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Ummat atas Unit Usaha-Sosial Persis, NU, dan Muhammadiyah di Kabupaten Garut)," *Jurnal Istek* 6, no. 1–2 (August 1, 2015), <http://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/299>.

²¹ Muhtadi Ahmad, "Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Lpnu) Dalam Perkembangan Umkm Berbasis Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (August 1, 2010), <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i1.2471>.

Selain itu, Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri sebagai penggerak di bidang perekonomian, pemberdayaan dan pendamping UMKM,²³ juga tergerak untuk ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan sistem ekonomi syariah secara langsung ke tengah masyarakat luas, khususnya warga Nahdlatul Ulama' yang merupakan pasar potensial untuk menjadi calon anggota, calon nasabah dari bank-bank syariah, asuransi syariah dan lain-lain.²⁴

Pada perkembangan globalisasi saat ini, perekonomian di dunia tercemar oleh konsep kapitalis, sosialis liberalis dan lain-lain yang semakin jauh dari rasa keadilan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah gerakan ekonomi berkeadilan tanpa harus mendzalimi satu dengan yang lain agar ketimpangan, kemiskinan, pengangguran serta problematika perekonomian yang terjadi saat ini dapat segera teratasi dengan tepat dan cepat. Tanpa keadilan, manusia terkotak-kotakkan dalam berbagai golongan. Golongan yang satu mendzalimi golongan yang lain, sehingga memicu terjadinya eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya untuk memenuhi hasrat pribadi dan kelompoknya.²⁵ Keadilan berekonomi sudah diatur dalam Islam sendiri agar pembagian distribusi merata, dengannya roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pembangunan ekonomi serta pemberdayaan ekonomi menjadi perhatian utama dari ketiga lembaga tersebut di pulau Madura. Untuk menahan arus globalisasi yang semakin hari semakin gencar melebarkan sayap perekonomian, gerakan pemberdayaan ummat terus dibangun di Indonesia untuk terus membangun dan membina usaha-usaha kecil maupun pedagang kecil melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebab usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peran yang sangat urgen dalam menunjang perekonomian nasional. Dalam situasi mata uang yang berfluktuasi sebagaimana pengalaman masa krisis moneter, UMKM relatif bisa bertahan karena fleksibel dan tidak

²² Profil Pengurus Pusat LPNU, LPNU masa kerja 2004-2009, 3.

²³ Hal tersebut senada seperti ungkapan Achmad Mukafi Niam penulis buku *"Bukti-Bukti Gusdur itu Wali"* dalam kata pengantar buku *"Memotret Kemandirian dan Kewirausahaan di Lingkungan NU"* dia mengungkapkan bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kesadaran dalam berwirausaha di lingkungan kaum Nahdlatul Ulama' diperlukan langkah serius, karena hal ini masih diinisiasi secara pribadi atau oleh organisasi di lingkungan NU saja. Sementara itu, untuk mampu berhasil dengan baik, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam membuka saluran pasar serta permodalan. Dalam pertarungan dengan para pengusaha yang sudah kompeten, sangat sulit bagi pengusaha kecil dan menengah untuk bisa bersaing. Karena itu, pendampingan dan pemberdayaan merupakan hal yang mutlak dilakukan.

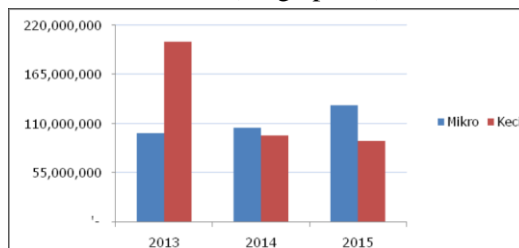
²⁴ Laporan PP. LPNU 1999-2004 pada acara serah terima jabatan dengan PP. LPNU 2004-2009, 16.

²⁵ Akhmad Mujahidin, *"Ekonomi Islam"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

tergantung pada bahan impor.²⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari sumber Bappenas, bahwa data usaha skala kecil dan menengah mengalami kenaikan signifikan untuk menopang perekonomian Indonesia pada tahun 2007 sebanyak 41,30 juta unit (99,85%), usaha skala menengah 61.052 unit (0,14%), sedangkan usaha skala besar 2.198 unit (0,005%). Dari jumlah tersebut dampaknya pada penyerapan tenaga kerja sekitar 84,5 juta orang (96,2% dari tenaga kerja nasional).²⁷

UMKM yang diberdayakan setidaknya memberikan buah hasil peningkatan yang sangat luar biasa, seperti yang pernah dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tambah (harga pasar) dan pertumbuhan produksi usaha mikro dan kecil di Indonesia 2013-2015. Nilai tambah (harga pasar) sektor usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 31,9%, dari 99,02 triliun (2013) menjadi 130,7 triliun (2015). Sedangkan nilai tambah usaha kecil menurun sebesar 55,3% dari 201,7 triliun di tahun 2013 menjadi 90,03 di tahun 2015.²⁸

Gambar 1.1: Nilai Tambah (harga pasar) Usaha Mikro dan Kecil



Sumber: BPS 2015

Pertumbuhan produksi usaha mikro dan kecil rata-rata dalam empat tahun terakhir yaitu sebesar 5,8%.

Gambar 1.2: Pertumbuhan Produksi Usaha Mikro dan Kecil



Sumber: BPS 2015

²⁶ Euis Amalia, *“Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 2003-2006*, dalam Euis Amalia, *“Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 10.

²⁸ DEKS Bank Indonesia-Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD. *“Usaha Mikro Islam: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah”*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 14.

Lembaga-lembaga keuangan mikro syariah di Madura harus bisa menciptakan harapan baru dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Sebab kemiskinan musuh semua agama²⁹ dan harus segera dihapuskan agar manusia mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada tabel 1.1 Peneliti memberikan gambaran tabel persentase penduduk miskin di kabupaten atau kota se-Provinsi Jawa Timur dengan harapan Peneliti dapat membandingkan secara tepat posisi perekonomian 4 (empat) Kabupaten di Madura dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1

**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 - 2017**

KODE	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
3501	Kab. Pacitan	17,29	16,73	16,18	16,68	15,49	15,42
3502	Kab. Ponorogo	11,76	11,92	11,53	11,91	11,75	11,39
3503	Kab. Trenggalek	14,21	13,56	13,10	13,39	13,24	12,96
3504	Kab. Tulungagung	9,40	9,07	8,75	8,57	8,23	8,04
3505	Kab. Blitar	10,74	10,57	10,22	9,97	9,88	9,80
3506	Kab. Kediri	13,71	13,23	12,77	12,91	12,72	12,25
3507	Kab. Malang	11,04	11,48	11,07	11,53	11,49	11,04
3508	Kab. Lumajang	12,40	12,14	11,75	11,52	11,22	10,87
3509	Kab. Jember	11,81	11,68	11,28	11,22	10,97	11,00
3510	Kab. Banyuwangi	9,97	9,61	9,29	9,17	8,79	8,64
3511	Kab. Bondowoso	15,81	15,29	14,76	14,96	15,00	14,54
3512	Kab. Situbondo	14,34	13,65	13,15	13,63	13,34	13,05
3513	Kab. Probolinggo	22,22	21,21	20,44	20,82	20,98	20,52
3514	Kab. Pasuruan	11,58	11,26	10,86	10,72	10,57	10,34
3515	Kab. Sidoarjo	6,44	6,72	6,40	6,44	6,39	6,23
3516	Kab. Mojokerto	10,71	10,99	10,56	10,57	10,61	10,19
3517	Kab. Jombang	12,23	11,17	10,80	10,79	10,70	10,48
3518	Kab. Nganjuk	13,22	13,60	13,14	12,69	12,25	11,98
3519	Kab. Madiun	13,70	12,45	12,04	12,54	12,69	12,28
3520	Kab. Magetan	11,50	12,19	11,80	11,35	11,03	10,48
3521	Kab. Ngawi	15,99	15,45	14,88	15,61	15,27	14,91
3522	Kab. Bojonegoro	16,66	16,02	15,48	15,71	14,60	14,34

²⁹ Taufik, “Kemiskinan, Perempuan dan Agama”. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, 145-164, (Juni, 2015), 150.
<http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i1.325>

3523	Kab. Tuban	17,84	17,23	16,64	17,08	17,14	16,87
3524	Kab. Lamongan	16,70	16,18	15,68	15,38	14,89	14,42
3525	Kab. Gresik	14,35	13,94	13,41	13,63	13,19	12,80
3501	Kab. Pacitan	17,29	16,73	16,18	16,68	15,49	15,42
3526	Kab. Bangkalan	24,70	23,23	22,38	22,57	21,41	21,32
3527	Kab. Sampang	27,97	27,08	25,80	25,69	24,11	23,56
3528	Kab. Pamekasan	19,61	18,53	17,74	17,41	16,70	16,00
3529	Kab. Sumenep	21,96	21,22	20,49	20,20	20,09	19,62
3571	Kota Kediri	8,14	8,23	7,95	8,51	8,40	8,49
3572	Kota Blitar	6,75	7,42	7,15	7,29	7,18	8,03
3573	Kota Malang	5,21	4,87	4,80	4,60	4,33	4,17
3574	Kota Probolinggo	10,92	8,55	8,37	8,17	7,97	7,84
3575	Kota Pasuruan	7,90	7,60	7,34	7,47	7,62	7,53
3576	Kota Mojokerto	6,48	6,65	6,42	6,16	5,73	5,73
3577	Kota Madiun	5,37	5,02	4,86	4,89	5,16	4,94
3578	Kota Surabaya	6,25	6,00	5,79	5,82	5,63	5,39
3579	Kota Batu	4,47	4,77	4,59	4,71	4,48	4,31
JAWA TIMUR		13,08	12,73	12,28	12,34	12,05	11,77

Sumber: Badan Pusat Statistik (Susenas Maret)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di pulau Madura masih sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur lainnya. Hal tersebut disebabkan masyarakat Madura kebanyakan masih bertumpu kepada satu sektor saja yaitu, sektor perkebunan. Baik perkebunan tembakau ataupun perkebunan tebu. Bahkan daerah bangkalan mencapai 21,32%, Sampang 23,56%, Pamekasan 16,00% dan Sumenep 19,62%. Persentase tersebut mencapai 3-4 kali lipat ketimpangan kemiskinan di daerah sekitarnya seperti Surabaya 5,39% dan Sidoarjo 6,23%. Dengan itu, adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah di pulau Madura sangat diharapkan menumbuhkan sifat inovatif, kreatif dan rasa kemandirian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Madura.

Kemiskinan tersebut juga dipicu oleh indeks pembangunan manusia serta pendidikan yang rendah di pulau Madura, masalah tersebut menjadi masalah serius untuk bahan perbaikan bagi kabupaten-kabupaten di pulau Madura. Dibuktikan data yang dikeluarkan badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur. Lihat tabel 1.2 indeks pembangunan manusia 2013-2018 dan tabel 1.3 angka partisipasi sekolah di Madura tahun 2014-2015.

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Madura Tahun 2013-2018

KABUPATEN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bangkalan	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30	62,87
Sampang	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90	61,00

Pamekasan	62,27	62,66	63,10	63,98	64,93	65,41
Sumenep	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28	65,25

Sumber: BPS, Seri Publikasi Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 1.3

**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia Sekolah
Di pulau Madura Tahun 2014-2015**

KABUPATEN	Usia 7-12 Thn		Usia 13-15 Thn		Usia 16-18 thn	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangkalan	98,39	100,00	84,44	91,49	57,45	58,73
Sampang	99,62	98,43	91,15	93,02	55,19	55,34
Pamekasan	99,45	97,30	94,67	94,85	62,24	69,81
Sumenep	99,73	98,53	100,00	95,31	66,52	75,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Jatim

Tabel 1.2 dan 1.3 menggambarkan keadaan indeks pembangunan manusia dan angka partisipasi sekolah di pulau Madura sangat memprihatinkan dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk ikut andil memberdayakan masyarakat Madura demi mencapai kemaslahatan secara bersama.

Pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia memang mengalami pasang surut, akan tetapi setidaknya Muslimat NU, MWC NU Sumenep dan Pondok Pesantren Sidogiri secara intensif menggerakkan program perekonomian, turut serta membantu pemerintah mengatasi masalah ekonomi nasional di tengah arus globalisasi. Muslimat, MWC NU Sumenep dan Pondok Pesantren Sidogiri menggerakkan perekonomian melalui perekonomian berbasis pesantren dan masyarakat yang Islami, yang kemudian menghasilkan koperasi An-Nisa Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri dengan menghasilkan berbagai produk-produk yang berkualitas dan bermanfaat buat masyarakat luas terutamanya di sekitar pesantren. Jejaring pesantren yang sangat luas dapat mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi ummat.³⁰ Untuk memulai kebangkitan pada dua pilar,³¹ Muslimat NU harus memulainya melalui pesantren. Harus diakui pula potensi pendidikan sekaligus ekonomi terbesar Muslimat NU terletak pada pondok pesantren. Pesantren yang secara kultural dan struktural berada di bawah naungan lembaga ini jumlahnya tidaklah sedikit. Bahkan, mendominasi jumlah pesantren di Indonesia dan tersebar hingga pelosok-pelosok negeri ini. Apabila potensi ini bisa dimaksimalkan, Muslimat

³⁰ Diakses dari laman: <http://www.nu.or.id/post/read/63295/pesantren-sidogiri-mercusuar-pengembangan-ekonomi-syariah> pada tanggal 24 November 2017.

³¹ Maksud dua pilar adalah dua pilar yang terpinggirkan sebagai semangat baru untuk NU. Dua pilar tersebut ialah pendidikan dan perekonomian, komitmen mengusung dua pilar dipertegas dalam Mukhtar NU ke-33 di Jombang.

NU, BMT NU dan BMT Sidogiri menjadi penggerak, sekaligus motor utama bagi pengembangan ekonomi kerakyatan di negeri tercinta kita ini.³²

Globalisasi ekonomi dapat mengubah struktural kehidupan masyarakat yang menyebabkan hilangnya batas-batas kultural, geografis, ekologis serta aktivitas ekonomi dan perekonomian itu sendiri. Di era global batas-batas Negara tidak lagi dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah instrumen perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen yang dimaksud menurut Kenichi Ohmae³³ dapat meliputi investasi, industri, teknologi informasi dan *individual consumers*. Instrumen tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan perekonomian sebuah Negara. Apabila Negara tidak memiliki itu semua, Negara tersebut menjadi pangsa pasar besar bagi Negara lain.³⁴

NU memiliki ciri khas tersendiri dalam pengembangan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi Islam yang mereka usung. Paling tidak kontribusi mereka sangat diharapkan pada perekonomian nasional di tengah kapitalisme global.

Kabupaten-kabupaten di pulau Madura memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan mikro syariah serta memberdayakan para masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan. Menurut data April 2017 lembaga keuangan mikro syariah di Kabupaten Pamekasan sendiri ada 160 koperasi syariah dari 160 desa.³⁵

Maka dengan itu, Penulis merasa sangat penting mengambil penelitian tentang potensi keuangan mikro syariah untuk gerakan sosial pemberdayaan ekonomi kerakyatan di pulau Madura. Dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sangat diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian rumah tangga, daerah, regional, nasional bahkan internasional khususnya daerah pulau Madura sendiri yang saat ini

³² Diakses dari laman: <http://www.nu.or.id/post/read/59990/nu-dan-ekonomi-kerakyatan-berbasis-pesantren> pada tanggal 24 Agustus 2018.

³³ Dr. Kenichi Ohmae merupakan salah satu pengamat bisnis terkemuka di dunia dan strategi perusahaan. Dikenal sebagai bapak strategi dan telah mengembangkan *Model 3C*. Ia memperoleh gelar BS dari Waseda University, MS dari Tokyo Institute of Technology, dan gelar doktor di bidang teknik nuklir dari Massachusetts Institute of Technology, kemudian bekerja sebagai insinyur desain senior untuk Hitachi. Ohmae, menurut *Financial Times London*, adalah guru manajemennya Jepang "*Mr. Strategi*" adalah julukan untuk Kenichi. Pada tahun 1994, *The Economist* memilih dia salah sebagai salah satu dari 5 (lima) guru manajemen di dunia. Sebagai penulis, ia telah menerbitkan lebih dari 100 buku, banyak yang ditujukan untuk analisis bisnis dan sosial politik. Ohmae memiliki kekhawatiran besar di pikirannya tentang situasi dunia daripada bisnis itu sendiri. Dia mengkhawatirkan pemerintahan benua baru, sekitar semacam perang dingin yang diperjuangkan oleh perusahaan bukan pemerintah, serta tentang pendidikan warga negara kita untuk dunia baru.

³⁴ Kenichi Ohmae, "*The Next Global Stage Challenges and Opportunities in Our Borderless World*". (New Jersey: Pearson Education, inc., 2005), 122-123.

³⁵ Diakses pada laman <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/04/14/oodnc6382-pamekasan-jadi-kabupaten-pertama-terapkan-koperasi-syariah> (Jumat, 06 Maret 2020)

persentase penduduk miskin masih sangat tinggi. Penulis sendiri memanfaatkan lembaga keuangan mikro syariah dengan mengobservasi serta mengukur kekuatan yang dimiliki, untuk membangun pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui gerakan sosial yang sangat gencar dilakukan serta disuarakan oleh para tokoh Madura.

BAGIAN DUA

DISKURSUS KEUANGAN MIKRO ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

A. Gerakan Sosial

Aktifitas kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi terhadap pimpinan merupakan bentuk gerakan sosial yang ditujukan kepada pemangku kebijakan. Upaya-upaya kolektif gerakan sosial diantaranya untuk mencapai kepentingan dan tujuan secara bersama-sama (*collective action*) dengan cita-cita kesejahteraan sebagai keinginan bersama.³⁶ Gerakan tersebut bisa disebut sebagai gerakan kolektif revolusioner disaat krisis sosial di luar lembaga-lembaga yang sudah mapan menurut Anthony Giddens.³⁷

Sidney Tarrow³⁸ memberikan pemahaman gerakan sosial yang berbeda, yaitu simbol perlawanan kelas bawah kemudian berafiliasi dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh melawan para elit dan otoritas yang lebih tinggi.³⁹

³⁶ Secara mendasar gerakan sosial dengan perilaku kolektif memiliki perbedaan. David A. Locher memberi penjelasan dalam bukunya "*Collective Behavior*" (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 233 diantaranya, pertama, *Organized*, adalah sebuah gerakan sosial yang sudah terorganisir dengan baik, akan tetapi perilaku kolektif sebagian besar lebih terstrukturisasi secara luas, mulai dari otoritas tertinggi, pengikut sampai kepada gerakan. Kedua, *deliberate*, gerakan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan. Ketiga, *enduring*, gerakan sosial memiliki jangka waktu yang panjang sedangkan perilaku kolektif terbatas pada periode tertentu.

³⁷ Jeffrey Berejikian, "Revolutionary Collective Action and the Agent-Structure Problem," *The American Political Science Review* 86, no. 3 (1992): 647–657, <https://doi.org/10.2307/1964128>. Michael Useem mengatakan bahwa gerakan sosial merepresentasikan tindakan kolektif untuk menghasilkan perubahan sosial. Charles Tilly memberikan tambahan terhadap gerakan sosial yang menggambarkan perseteruan perlawanan kepada lawan-lawannya. "*Social Movement and Social Changes*" dalam bukunya "*The Handbook of Political Sociology*". (New York: Cambridge University Press, 2005), 141-142.

³⁸ Sidney G. Tarrow (PhD, Berkeley, 1965) adalah Profesor Emeritus Maxwell M. Upson di Universitas Cornell dan Profesor Tamu di Sekolah Hukum Cornell. Tarrow memiliki gelar BA dari Syracuse, MA dari Columbia, dan PhD dari Berkeley. Karyanya telah mencakup berbagai kepentingan, dimulai dengan komunisme Italia, buku pertamanya adalah *Komunisme Petani di Italia Selatan* (Yale, 1967). Pada 1980-an, ia beralih ke rekonstruksi kuantitatif dan kualitatif siklus protes Italia pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dalam *Democracy and Disorder* (Oxford, 1989). Buku-bukunya yang terbaru adalah *Kekuatan dalam Gerakan* (edisi ketiga, Cambridge, 2011), *Strangers at the Gates* (Cambridge 2012), dan *The Language of Contention* (Cambridge 2013).

³⁹ Sidney G Tarrow, "*Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*". (New York: Cambridge University Press, 2011), 7-8.

Selain konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya sebuah istilah gerakan keagamaan baru (*new religious movement*) yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan sosial keagamaan (*religious social movement*)⁴⁰. Gerakan keagamaan baru adalah sebuah gagasan yang mencoba menerjemahkan ide-ide keberagamaan dalam menumbuhkan kembangkan struktur tatanan sosial yang baru, partisipatif dan emansipatoris menuju kekuatan transformatif.⁴¹

Perlawanan kaum bawah terhadap pengaruh globalisasi dan neoliberalisme semakin meluas seiring dengan menguatnya rasa nasionalisme. Gerakan antiglobalisasi kepada korporasi yang dianggap memonopoli perekonomian dunia ini tidak hanya didominasi oleh kalangan Negara-negara terbelakang dan berkembang. Tetapi gerakan tersebut juga didukung serta didorong oleh Negara-negara maju dan kaya. Slogan menyongsong dunia baru dalam forum dunia yang terkenal sangat memungkinkan memunculkan arus globalisasi yang lebih adil, makmur dan sejahtera, agar tidak hanya didominasi oleh segelintir pengusaha multinasional.⁴²

Kekuatan gerakan masyarakat menengah-ke bawah yang mulai meluas mengusung isu-isu terkini yang bersifat lokal, regional, nasional, dan global dijadikan sebagai *social modal* (modal sosial) membuat pengaruh besar menuju perubahan iklim dunia yang lebih berkeadilan. Disaat cengkraman neoliberalisme dan kapitalisme semakin kuat, kedaulatan Negara akan semakin menjadi boneka mainan mereka. Di sinilah gerakan sosial (*social movement*) dari berbagai kalangan menjadi kontrol sosial (*social control*) untuk perjalanan perjuangan selanjutnya.⁴³

Pada awal mula kemunculan gerakan sosial diawali dengan rasa ketidakpuasan sejumlah pihak atas keadaan ataupun kondisi sosial yang terlalu banyak didominasi oleh kaum elit. Bisa juga gerakan tersebut dikatakan tindakan agitasi yang terencana sedari awal oleh kelompok masyarakat setempat. Agitasi yang

⁴⁰ Lorne L. Dawson, "*Cults and New Religious Movements*", (London: Sage Publication, 2003), 93.

⁴¹ Dawam Rahardjo, "*Gerakan Keagamaan dan Civil Society*", (Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999), 12. Sri Roviana mengartikan gerakan tersebut dengan cita-cita yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gerakan keagamaan dibungkus rapi dalam bingkai paradigma transformatif menghasilkan perubahan sosial yang lebih manusiawi. Sebab, proses tersebut berlaku sebagai pendampingan bukan mengarah kepada pemaksaan. Konsep ini diharapkan agama bisa hadir dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik" *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, No. 2, Desember (2014), 403-424, <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.403-424>

⁴² Dimpos Manulu, "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara," *Populasi* 18, no. 1 (July 12, 2016), <https://doi.org/10.22146/jp.12066>.

⁴³ Smith, Jackie, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco (eds). "*Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyond the State*. (New York: Cambridge University Press, 1997), 66-67. Bisa juga dilihat dalam Gills, Barry K. "*Globalization and Politics of Resistance*". (New York: Palgrave, 2000), 24-27

disertai program-program dan bukti perubahan mengindikasikan perlawanan terhadap dominasi struktur sosial.⁴⁴ Sebelum itu semua, gerakan-gerakan yang ada pada era digital saat ini benar-benar tidak teroganisir secara baik, tidak memiliki arah yang jelas dan pula tidak pernah memiliki perencanaan yang sangat matang. Mereka hanya bisa berkeluh kesah dan saling membagi rasa duka antar sesama. Tidak adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan, mereka bereksplorasi satu sama lain dengan menciptakan organisasi-organisasi yang permanen. Di sinilah unsur gerakan sosial baru (*New Social Movement*) menjadi tradisi ilmiah dalam studi perlawanan gerakan sosial masyarakat di Indonesia.⁴⁵ Contoh studi gerakan ini dimulai sejak masa Sartono Kartodirjo, Ong Hok Ham, Kuntowidjojo dan yang terbaru adalah Mustain Mashud. Hasil studi mereka dapat mengukuhkan gerakan sosial ala Indonesia di dalam fenomena historis perlawanan arus bawah, rakyat miskin dan pedesaan yang termarginalkan.

Gerakan sosial di Indonesia sendiri memiliki perubahan-perubahan dari masa ke masa. Pola perubahan di Indonesia ada 3 (tiga) fase:

Pertama: pada masa kolonial atau juga bisa disebut dengan fase gerakan sosial tradisional (*old social movement*)⁴⁶. Pada fase tersebut kebijakan kekuasaan dikendalikan penuh oleh raja dan keluarganya dengan sistem feodalisme yang berakibat kepada tatanan struktur sosial petani berada dalam status *Kawula Gusti*.⁴⁷ Walau pada sisi yang berbeda, kekuasaan terhadap politik dan ekonomi dikuasai oleh penguasa kolonial. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkanpun menjadikan rakyat terus menerus menempati kelas yang tidak memiliki akses untuk memperbaiki kehidupan sosialnya. Seperti *landrent system* atau dalam

⁴⁴ Timur Mahardika. “Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai”. (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), 17-21.

⁴⁵ Syamsu A. Kamaruddin, “Pemberontakan Petani Unra 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Sulawesi Selatan Pada Masa Pendudukan Jepang),” *Hubs-Asia* 10, no. 1 (August 15, 2012): 19–35, <https://doi.org/10.7454/mssh.v16i1.1222>.

⁴⁶ Leo d’Anjou and John Van Male, “Between Old and New: Social Movements and Cultural Change,” *Mobilization: An International Quarterly* 3, no. 2 (October 1, 1998): 207–26, <https://doi.org/10.17813/mai.3.2.mv32162701623653>.

⁴⁷ *Kawula Gusti* dalam pandangan kerajaan-kerajaan Nusantara adalah masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki hak milik atas tanah, tanah adalah milik adat yang memiliki sifat komunal (*ulayat*), sementara sultan (raja) memiliki status pemimpin adat sekaligus penguasa tanah. Sultan menganggap bahwa semua tanah yang ada di dalam teritorial kekuasaannya merupakan miliknya, dan Sultan pemilik semua tanah (*vorstdomein*), serta berhak memberikan kepada siapapun yang dianggap mampu untuk menggarapnya dengan sistem sewa (menyerahkan sebagian hasil panen sebagai upeti kepada raja). Menurut Mas’oed dalam bukunya “*Politik, Birokrasi dan Pembangunan*”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994) mengatakan bahwa, faktor kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia lebih cenderung kepada kondusif untuk mendorong terciptanya pelaku koruptif. Tindakan hal tersebut dalam tradisi masyarakat dataran Eropa dan Amerika dianggap sebagai tindak korupsi, sedangkan dalam tradisi masyarakat Asia khususnya Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Brunei, Myanmar dan Indonesia sendiri tidak dikategorikan sebagai korupsi. Dalam adat Jawa sendiri pemberian upeti kepada raja disebut sebagai pemenuhan kewajiban bawahan (*kawula*) kepada rajanya (*Gusti*).

bahasa belandanya adalah *landrete*,⁴⁸ *contingenten*,⁴⁹ *verplichte leverantie*,⁵⁰ *ektirpasi*,⁵¹ dan *recognitie penningen*.⁵²

Gerakan di atas melukiskan manifestasi gerakan sosial dalam melaksanakan protes sosial yang dilatar belakangi paradigma tradisional seperti nativisme dan mesianisme yang menghasilkan rasa solidaritas dengan semangat primordial tanpa mengedepankan rasa semangat rasionalitas atas kepentingan bersama. Gerakan ini muncul tidak dilandasi oleh kesadaran kolektif sebab penindasan struktural dari sistem feodalisme maupun kolonialisme.⁵³

Kedua, masa orde lama dan orde baru. Pada dua masa itu banyak muncul organisasi, perkumpulan masyarakat dan partai politik sebagai bentuk wadah perjuangan aspirasi kaum tertindas. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri fenomena tersebut menyebabkan wadah perjuangan aspirasi menjadi *underbrow* dari gerakan partai politik. Contoh saja Barisan Tani Indonesia (BTI) adalah bagian *underbrow* dari Partai Komunis Indonesia (PKI).⁵⁴ Konsekuensi yang seharusnya yang didapatkan dari perjuangan kaum tertindas bisa dapat merubah struktural sosial mereka akan tetapi mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Sebab pergerakan kaum petani hannya dijadikan alat eksploitasi politik untuk merebut pucuk kekuasaan.

Pergerakan kaum kelas bawah pada mulanya melakukan pergerakan perjuangan demi mendapatkan keadilan sosial dalam membela hak-hak mereka sebagai rakyat, alih-alih mendapatkan hasil yang memuaskan akan tetapi

⁴⁸ *Landrete* ialah kebijakan ekonomi yang menganut sistem liberal berdasarkan asas sewa kelola, hal tersebut diprakarsai langsung oleh Raffles. Raffles memandang bahwa semua tanah milik Sultan (raja) yang berdaulat seperti di Inggris. Raffles sendiri pernah mengambil alih lahan tanah milik kesultanan Banten dan kesultanan Cirebon. Dan sebagai gantinya Raffles memberikan Sultan uang sebesar 10.000 ringgit atau sekitar Rp. 30 juta.

⁴⁹ Disebut juga dengan sebutan pajak *in natura*, ialah kewajiban yang telah diterapkan oleh VOC untuk rakyat pribumi dalam penyerahan hasil bumi sebagai pajak sewa tanah.

⁵⁰ Kewajiban membayar upeti rakyat pribumi dari hasil bumi mereka kepada pihak VOC saja dengan harga yang telah ditentukan. Seperti hasil bumi beras, nila, lada, kayu manis, kapas dan hasil ternak.

⁵¹ Pemusnahan tanaman rempah-rempah oleh VOC yang dianggap peredarannya *overload* di pasaran sehingga menyebabkan turunnya harga jual rempah di pasaran. Cara-cara tersebut merupakan ancaman serius bagi buruh tani pada masa itu dalam menggapai harapan menuai hasil panen yang berlimpah. Itulah cara VOC menjaga stabilitas harga dan monopoli barang.

⁵² Imbalan VOC kepada raja-raja kepada jasa-jasa kerjasama yang telah dilakukan. Hal tersebut sangat menyakiti perasaan kalangan bawah karena raja-raja mendapatkan hadiah di saat kaum pribumi tertekan dan dilanda kesusahan.

⁵³ Desi Rahmawati, "Gerakan Petani Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia: Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTAM)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2003): 29–58, <https://doi.org/10.22146/jsp.11084>.

⁵⁴ Kasdi, Aminuddin, "*Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak BTI di Jawa Timur 1960-1965*". (Yogyakarta: Jendela, 2001), 19-20.

dijadikan alat perjuangan perdagangan komoditas dan korporasi politik oleh sebagian orang. Setelah berbagai elemen sadar bahwa perjuangan arus bawah ditunggangi kepentingan elektoral para pemain politik, secara intens mengadakan diskusi-diskusi, orasi-orasi dan demonstrasi dengan mengangkat isu agraria sebagai arah perjuangan baru dari suara perlawanan mereka kepada kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada kepentingan kaum arus bawah.⁵⁵ Hal itu menjadi gelombang gerakan yang ketiga.

Isu pembaharuan agraria menjadi bagian fase *ketiga* pada gerakan ini. Artinya fase ini menghasilkan konsep arah baru perjuangan di dalam diskursus *social movement* (gerakan sosial). Sehingga bisa melahirkan konsep sebuah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama. Sangat banyak kita dapatkan metode-metode pemberdayaan menjadi percontohan dan advokasi bagi organisasi-organisasi masa kini. Metode tersebut memberikan isyarat terhadap adanya upaya-upaya tindakan kolektif untuk mengejar kepentingan bersama demi mencapai perubahan.⁵⁶ Charles Tilly mengatakan: “*social movements are about changing hearts and minds as well as policy.*”⁵⁷ Kata-kata Tilly mengindikasikan bahwa hasil perjuangan gerakan sosial agar dapat memberikan pengaruh perubahan kepada hati, pikiran dan arah kebijakan terhadap pemangku kebijakan.

Fase yang ketiga ini menghasilkan gerakan sosial Islam atau yang lebih dikenal dengan *islamic economy movement*⁵⁸ (gerakan ekonomi Islam), mencakup gerakan individu, kelompok, atau gerakan yang terorganisir yang menyerukan dan memperjuangkan islamisasi seluruh sistem ekonomi. Salah satu platform terkemuka untuk gerakan ekonomi Islam di Indonesia ialah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dengan bangga menyatakan bahwa visi asosiasi adalah untuk tujuan “*membangun sebuah masyarakat yang melakukan semua kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan Islam*”⁵⁹ dan sering mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut gerakan ekonomi Islam.

⁵⁵ Dadang Juliantara dan Fauzi Noer, “*Menyatakan Keadilan Agraria: Manual Kursus Intensif Untuk Aktivis Pembaruan Agraria*”. (Jakarta: BK KPA, 2000), 484-485.

⁵⁶ Anthony Giddens, “*Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*”. (Oxford: Blackwell Publishers, 1994), 81-84. Bisa juga dilihat dalam karya Patrick Baron (ed), “*Local Conflict and Community Development in Indonesia Assessing the Impact of the Kecamatan Development Program*”. (Jakarta: Indonesian Social Development, 2006), 100-101.

⁵⁷ Charles Tilly, “*Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*”. (New York: Russell Sage Foundation, 1984), 57. Bisa dilihat juga di jurnal David Pettinicchio, “Elites, Policy, and Social Movements | On the Cross Road of Polity, Political Elites and Mobilization,” accessed February 20, 2019, <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0895-993520160000024006>.

⁵⁸ Istilah lain yang diberikan oleh Robert Hefner terhadap gerakan ini adalah *Modern Movement* (gerakan modern) bukan *Ancient Movement* (gerakan kuno). Lihat Hefner, Robert W. “*Islamic Economics and Global Capitalism.*” *Society* 44, no. 1 (2006): 17.

⁵⁹ Lihat anggaran dasar masyarakat ekonomi syariah (MES) pasal 4 tujuan.

Para peneliti, aktifis dan pelaku platform ini percaya bahwa sistem ekonomi Islam lebih unggul daripada sistem lain,⁶⁰ seperti sosialisme dan kapitalisme.

Dengan demikian, interpretasi teori-teori dari gerakan-gerakan sosial dengan nalar Islam progresif di atas dapat memberika pengaruh kepada faksi-faksi gerakan bagi Islam sendiri, seperti gerakan fundamentalisme, liberalisme, moderat, tradisional, dan lain-lain. Kita harus bisa memetakan dalam tataran teoritis, agar ada pemfokusan pada wilayah masalah yang dianggap urgen sebagai metateori dalam penyelesaian agenda perubahan sosial pada setiap lini kehidupan ummat manusia, terutama di Indonesia khususnya di pulau Madura. Untuk mengawali hal itu semua sangat dibutuhkan gagasan progresif dalam pemikiran Islam. Sebab Islam harus bisa hadir dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam berbagai dinamika dimensi masyarakat.⁶¹

Ketika sistem kapitalisme mulai menjadi otoritas ideologi Negara adikuasa, mereka berani melakukan intervensi kekuatan ekonominya pada bangsa-bangsa di dunia ini. Islam hadir untuk menyeimbangkan keadilan sosial,⁶² kesetaraan dan kebebasan dalam berekonomi untuk menjamin kesejahteraan bagi semuanya.⁶³ Harta yang diterima sangat tidak diperkenankan hannya beredar di tengah-tengah kelas elit dan kaya, baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional. Sebagaimana firman Allah SWT:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر: ٧)

Artinya: “... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian....” (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut memberikan refleksi rasa kemanusiaan antar sesama demi menggapai kesejahteraan secara bersama-sama tanpa harus saling menindas satu sama lain.⁶⁴ Hal tersebut menghilangkan superioritas diri dari orang lain,

⁶⁰ M. Umer Chapra, “What Is Islamic Economics?”. (Jeddah: IRTI, 2001), 46.

⁶¹ Ahmad Izudin, “Gerakan Sosial Dan Nalar Islam Progresif: Mencari Titik Temu Kerangka Metateori,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (January 11, 2018): 281-300–300, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04>.

⁶² Robert Hefner mengatakan: “Islamic economics is not an ancient intellectual tradition, but a modern movement that asserts that Islamic traditions of law and organization provide a more just and equitable model for economic growth than do the rival systems of Western capitalism and socialism.”

⁶³ Dina Elshurafa, “Islamic Capitalism—An Imminent Reality or a Hopeful Possibility for Islamic Finance?,” *Arab Law Quarterly* 26, no. 3 (2012): 339–60, <https://www.jstor.org/stable/23235576>.

⁶⁴ Diantara ayat yang menjelaskan menggapai kesejahteraan sosial tanpa harus melupakan orang-orang miskin, yatim dan dhuafa’ yang membutuhkan sebagian harta yang kita dapatkan, diantaranya surat Al-Isra’ ayat 26:

وَأَبِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الإسراء: ٢٦)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’: 26)

superioritas rasial, keluarga, bangsa, suku, ras dan agama. Saleh secara spiritual tidaklah cukup, akan tetapi Al-Qur'an juga mengharuskan saleh secara sosial, seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah: 8)

Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Allah SWT membagi rezeki sesuai dengan porsi yang telah ditentukan, rezeki setiap ciptaannya berbeda-beda, ada yang dilebihkan dan begitu pula ada yang membutuhkan bantuan uluran tangan rezeki dari orang yang dilebihkan. Agar supaya bisa saling berbagi dan saling rasa antar sesama. Boleh menjadi kaya tetapi harus mempunyai rasa kemanusiaan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (النحل: ٧١)

Artinya: “Dan Allah SWT melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah SWT?” (QS. An-Nahl: 71)

Makna yang terkandung secara tersurat dan tersirat pada ayat di atas menyatakan untuk tidak mengkapitalisme ekonomi. Sebab, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, setengah pengangguran dari populasi, meningkat di dunia dan banyak ekonom sekarang percaya bahwa sebagian besar masalah ini dihasilkan oleh kapitalisme. Ketika anggota masyarakat berfokus secara eksklusif pada kepentingan diri mereka sendiri, hanya sedikit peduli untuk kebaikan orang lain, kita sampai pada jenis masyarakat yang telah dihasilkan oleh kapitalisme.⁶⁵

Maka dengan itu, gerakan sosial dalam menggerakkan nilai-nilai tatanan sosial demi menggapai kesejahteraan bersama, Peneliti lebih condong memilih teori Sidney Tarrow. Fakta tersebut termanifestasikan di wilayah Madura dengan

⁶⁵ T. El-Diwany (ed.), “Islamic Banking and Finance: What it Is and What It Could Be”. (Boston: 1 st Ethical Chritable Trust, 2010), 422.

semangat, berinovasi, berkreasi bersama-sama mengembangkan keuangan ekonomi syariah demi kemaslahatan bersama tanpa harus mengintervensi pihak lain. Terlebih lagi, 3 (tiga) lembaga keuangan mikro syariah yang diteliti oleh Peneliti saat ini, diprakarsai oleh tokoh-tokoh besar organisasi Nahdlatul Ulama. Fenomena tersebut menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan potensi-potensi sumber daya insani (SDI) maupun sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh pulau Madura sendiri, mengingat pulau Madura merupakan daerah Jawa Timur dengan angka kemiskinannya sangat tinggi daripada daerah-daerah Jawa Timur yang lain.⁶⁶ Keuangan mikro syariah di pulau Madura memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat untuk bisa menggapai kesejahteraan bersama melalui produk-produk dan pemberdayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura.

B. Rekonstruksi Pemberdayaan Keuangan Mikro Islam

Memperluas pembiayaan kepada orang miskin memiliki konsekuensi sumber daya lingkungan, baik melalui investasi modal finansial dan fisik yang dilakukan, dan memiliki potensi perubahan dalam pendapatan pelaku usaha. Program keuangan mikro syariah memungkinkan pengusaha mikro untuk berinvestasi dalam modal skala kecil seperti mesin jahit, alat tenun, toko kelontong, ternak, peralatan panen, dan persediaan lainnya. Aktivitas usaha mikro meningkatkan pendapatan dan kepemilikan si *mudharib* (pengusaha). Tidak hanya itu dapat mengakibatkan peningkatan penggunaan sumber daya dan produksi limbah, tetapi juga peningkatan permintaan untuk kualitas lingkungan yang memiliki efek menguntungkan pada pengelolaan sumber daya alam.⁶⁷

Dalam sistem Islam, prioritas yang jauh lebih besar diberikan pada kebutuhan orang miskin kronis daripada orang miskin atau orang yang cukup miskin atau tidak terlalu miskin. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro Islam, tidak seperti mitranya yang konvensional, diharapkan untuk secara agresif mengintegrasikan berbagai bentuk filantropi Islam dengan keuangan mikro nirlaba untuk mengatasi masalah tersebut dari berbagai masalah terkait program pengentasan kemiskinan. Nabi Muhammad SAW menyarankan umat Islam untuk selalu bersikap moderat dalam semua urusan dan menggambarkan Islam sebagai jalan tengah.⁶⁸ Oleh karena itu, keseimbangan bagi manusia diperlukan untuk

⁶⁶ Data tersebut sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 Januari 2019. Pulau Madura merupakan daerah penyumbang persentase angka kemiskinan tertinggi. Misalnya, Kab. Bangkalan 19,59%, Kab. Sampang 21,21%, Kab. Pamekasan 14,47% dan Kab. Sumenep 20,16 %. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga sangat miris sekali bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Bisa dilihat dalam: <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>

⁶⁷ Abul Hassan, "The Challenge in Poverty Alleviation: Role of Islamic Microfinance and Social Capital," *Humanomics* 30, no. 1 (February 4, 2014): 76–90, <https://doi.org/10.1108/H-10-2013-0068>.

⁶⁸ Statemen tersebut juga dikuatkan oleh hadits Nabi SAW:

memastikan kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi manusia yang berkelanjutan.⁶⁹ Allah SWT menekankan keadilan dan kesetaraan. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap semua individu dalam masyarakat, hukum Islam menjadi tidak bermakna kecuali disertai dengan bentuk keadilan ekonomi. Setiap orang mendapat kewajiban untuk setiap kontribusinya pada masyarakat sebagai produk sosial dan bahwa tidak ada eksploitasi satu individu oleh orang lain. Etika Islam mendesak umat Islam untuk tidak menahan hal-hal yang adil karena orang lain.⁷⁰

Menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi lembaga keuangan mikro Islam tidak hanya fokus dalam melakukan pembiayaan dan pelayanan modal kepada para pelaku usaha, diperlukan pula merekonstruksi model lembaga dengan memberikan pelayanan disertai pelatihan sebagai bentuk perhatian dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Memanfaatkan pinjaman uang usaha harus tepat sasaran yang lenih mengarah kepada sesuatu yang kreatif dan produktif. Penyediaan pelatihan keterampilan oleh lembaga dapat menumbuhkan azas manfaat dan maslahat bagi pelaku usaha atau nasabah sebelum benar-benar menggunakan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro Islam. Sehingga tingkat kemiskinan yang rendah meningkat ke tahap di mana mereka berada mampu memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, kemudian ke tahap di mana mereka datang untuk memperoleh keterampilan teknis dan kewirausahaan yang diperlukan untuk mendirikan usaha mikro, dan akhirnya ke tahap di mana mereka dapat memperoleh dana yang diperlukan dari lembaga keuangan mikro (LKM) dan memiliki usaha mikro yang berjalan dengan

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (رواه البيهقي)

Artinya: “sebaik-baiknya urusan adalah yang moderat” (**HR. Baihaqi**). Lihat juga dalam kitab *Sunan al-Kubro lil Imam Baihaqi* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1414 H), III, 273. Ayat yang selaras dengan hadits:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (البقرة: ١٤٣)

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan” (**QS. Al-Baqarah: 143**). Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jaluddin As-Suyuthi dalam tafsirnya mengatakan bahwa arti dari makna وَسَطًا adalah خَيْرًا غَدُولًا (yang terbaik lagi adil). Penjelasan tersebut menyiratkan kepada kita bahwa setiap individu harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menghilangkan hak orang lain dari bagian mereka yang adil. Peringatan terhadap ketidakadilan dan eksploitasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak semua individu di masyarakat terlepas dari apakah mereka konsumen, produsen, atau distributor dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dikuatkan oleh ayat yang lain:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (المائدة: ٨)

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” (**QS. Al-Maidah: 8**)

⁶⁹ Khursyid Ahmad, “*Studies in Islamic Economics*”. (Jeddah: The Islamic Foundation and King Abdulaziz University, 1982), 87.

⁷⁰ M. Umer Chapra, “*The Economic System of Islam*”. (Lahore: Oxford University Press, 1970), 4.

baik.⁷¹ Dengan demikian, dalam memerangi kemiskinan, dibutuhkan pendekatan keuangan yang terintegrasi atau penyediaan layanan keuangan bersama dengan layanan pengembangan bisnis, fenomena ini juga terkait dengan jaring pengaman sosial.

Implementasi keuangan mikro Islam harus didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang menekankan pada pentingnya persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi.⁷² Ini pada gilirannya akan membutuhkan kepuasan yang seimbang dari kebutuhan material dan spiritual semua manusia.⁷³ Islam, sebagai agama dan sistem kehidupan, didasarkan pada adat dogma agama dan standar ekonomi yang juga menekankan pada kesejahteraan inklusif umat manusia, khususnya untuk kelas masyarakat yang tertekan dan miskin secara ekonomi. Dalam kombinasi dengan visi spiritual dan tujuan kesejahteraan, keuangan mikro Islam muncul sebagai instrumen keuangan baru dan berbeda dari keuangan mikro konvensional.⁷⁴

Pemberdayaan yang direkonstruksi oleh lembaga keuangan mikro Islam akan sangat dapat membantu orang-orang berekonomi rendah untuk bisa mengembangkan skill mereka menghasilkan inovasi terbaru. Produk-produk pembiayaan yang unggul selanjutnya akan menghasilkan manfaat finansial yang unggul bagi pelanggan yang miskin secara ekonomi dan pada akhirnya berdampak lebih besar kepada masyarakat, terutama orang-orang kelas bawah.⁷⁵

Keuangan mikro Islam mengidentifikasi yang termiskin dari yang miskin sebagai kriteria utama kelayakan untuk menerima dukungan pelayanan publik. Hal tersebut diarahkan untuk menghilangkan kemiskinan absolut melalui lembaga-lembaga yang didasarkan pada dua instrumen sistem ekonomi Islam: zakat dan sedekah. Kedua instrumen ini menempati posisi sentral dalam pengentasan kemiskinan dalam metode Islam melalui lembaga keuangan mikro

⁷¹ Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, "Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment," in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 75-96, https://doi.org/10.1057/9781137372697_7.

⁷² Secara umum bisa dipahami bahwa pembiayaan mikro Islam adalah kata yang menentukan kesepakatan fasilitas keuangan untuk klien dengan tingkat pendapatan kecil tanpa membebankan bunga. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah menargetkan orang-orang dengan kelompok berpenghasilan sangat rendah, tidak memiliki pintu masuk ke sistem pinjaman resmi. Bisa dilihat juga di Mahmood Ahmed, "The Role of RDS in the Development of Women Entrepreneurship Under Islamic Microfinance: A Case Study of Bangladesh." In M. Obaidullah & H. Salma (Eds.), *Islamic Microfinance for Micro and Medium Enterprises*. (Jeddah: IRTI and UBD, 2011), 212-213.

⁷³ M. Umer Chapra, "Islam and Economics Challenge". (Leicester UK: The Islamic Foundation, 2002), 358.

⁷⁴ M. Obaidullah & T. Khan, "Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiative". (Jeddah: IRTI-IDB, 2008), 9.

⁷⁵ Manfred Zeller & Richard L. Meyer, Improving the Performance of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact. In Manfred Zeller & Richard L. Meyer (Eds.), "The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact." (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), 43.

syariah (LKMS).⁷⁶ Banyak ekonom Islam berpendapat bahwa program keuangan mikro Islam akan dapat menjembatani kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Insentif terbesar untuk memasuki layanan tersebut tetap melalui rute nirlaba Islami. Strategi Islam yang efektif yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif yang melengkapi produk keuangan mikro dengan berbagai layanan lain yang sesuai dengan Syariah.⁷⁷ Program keuangan mikro paling banyak muncul daerah yang efektif dan menjanjikan untuk menyalurkan penghematan jutaan warga pedesaan untuk menciptakan model pertumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan.⁷⁸

Salah satu contoh riil hasil dari kinerja keuangan mikro Islam oleh *Islami Bank Bangladesh Limited* (IBBL) telah menjadi alat yang sangat penting yang telah digunakan di Bangladesh,⁷⁹ Mesir, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Turki dan Yaman untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para penerimanya. Diantaranya wanita menjadi sasaran khusus karena mereka sangat rentan terhadap kemiskinan.⁸⁰ Mereka kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi mereka yang menyedihkan. Namun, bukti menunjukkan bahwa ketika perempuan

⁷⁶ Muhammad Syafii Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Enterprises In Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation," *Journal Of Indonesian Islam* 5, no. 2 (December 1, 2011): 313-334-334, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.313-334>.

⁷⁷ Shofwan Al Banna Choiruzzad, "More Gain, More Pain: The Development of Indonesia's Islamic Economy Movement (1980s-2012)," *Indonesia*, no. 95 (2013): 125-72, <https://doi.org/10.5728/indonesia.95.0125>.

⁷⁸ Abul Hassan, "Financial Inclusion of the Poor: From Microcredit to Islamic Microfinancial Services," *Humanomics* 31, no. 3 (July 22, 2015): 354-371, <https://doi.org/10.1108/H-07-2014-0051>.

⁷⁹ Istilah keuangan mikro Islam telah dipopulerkan Grameen Bank di Bangladesh yang dipromosikan oleh Peraih Nobel Muhammad Yunus. Ini biasanya digunakan ketika membahas masalah dukungan keuangan untuk pengusaha mikro. Yunus mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan penghematan, kredit, dan jasa keuangan lainnya serta produk dalam jumlah yang sangat kecil bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan, semi-perkotaan, atau perkotaan untuk memungkinkan mereka meningkatkan tingkat pendapatan dan meningkatkan standar hidup mereka. Lihat juga dalam Muhammad Yunus, "Creating a World Without Poverty: Social Business And The Future Of Capitalism," *Global Urban Development Magazine* 4, no. 2 (November, 2008), accessed February 28, 2019, <https://www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2/Yunus.htm>.

⁸⁰ Kemiskinan membawa konsekuensi permusuhan bagi orang miskin adalah dengan menyatakan yang jelas, itu juga menyentuh dan terkait erat dengan masalah sosial lain yang dikenal luas: penyakit, kejahatan, kenakalan, orang tua tunggal, dan penyalahgunaan zat. Kemiskinan itu sendiri kadang-kadang memasuki arena politik ketika para kandidat dan pemimpin politik menyatakan perang terhadapnya dan berupaya untuk mengatasinya. Lihat Antoinette Coleman and Howard M. Rebach, "Poverty, Social Welfare and Public Policy," in *Handbook of Clinical Sociology*, ed. Howard M. Rebach and John G. Bruhn, Clinical Sociology: Research and Practice (Boston, MA: Springer US, 2001), 353-92, https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1217-2_18.

terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, mereka menunjukkan keberanian yang lebih besar dalam menjelajah pengalaman dan terbukti produktif. Berinvestasi besar dalam keluarga penerima manfaat dan meningkatkan keterlibatan anggota keluarga dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan akan tercermin dalam kesejahteraan peminjam. Dalam hal ini, program keuangan mikro syariah merupakan input penting.⁸¹

Upaya pemberdayaan ekonomi mikro yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan mikro Islam dalam mempengaruhi perubahan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Madura khususnya, dapat direalisasikan dengan program-program seperti:

1. Program yang berdampak nilai ekonomis, memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro yang diklasifikasikan tidak mampu tanpa bagi hasil (*qardh al-Hasan*).
2. Program hibah.
3. Program bersifat produktif melalui sistem bagi hasil.
4. Program berorientasi sosial.⁸²

Pemberdayaan bersentuhan langsung dengan konsep modal sosial (*social capital*) dan kekuasaan (*power*). Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu yang lain melakukan apa yang diinginkan melalui kemandirian, *networking* atau keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada tingkat kekuatan individu dan sosial.⁸³ Konsep pemberdayaan Friedman⁸⁴ dalam konteks di atas pembangunan alternatif menekankan kepada keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan azas sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial. Sedangkan Robert Chambers,⁸⁵ mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mengandung nilai-nilai etika sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan bersifat *participatory*, *people centred*,

⁸¹ Abul Hassan and Sabur Mollah, "Small Solutions: Poverty Alleviation Through Islamic Microfinance," in *Islamic Finance: Ethical Underpinnings, Products, and Institutions*, ed. Abul Hassan and Sabur Mollah (Cham: Springer International Publishing, 2018), 149–82, https://doi.org/10.1007/978-3-319-91295-0_12.

⁸² Renny Oktafia, "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May 14, 2017): 85–92, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/11>.

⁸³ Machel Sipahelut, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara," *Tesis Institut Pertanian Bogor*, 2011, 27–28, <http://repository.ipb.ac.id/xmlui/handle/123456789/46703>.

⁸⁴ Jhon Friedman, *"Empowerment The Politics of Alternative Development"*. (Cambridge: Blackwell Publishers, 1992), 47. Lihat juga Jhon Friedman, "Empowerment, The Politics of Alternative Development," *Capital & Class* 18, no. 2 (July 1, 1994): 142–44, <https://doi.org/10.1177/030981689405300115>.

⁸⁵ Robert Chambers, *"Rural Development: Putting The Last First"*. (New York: Logman inc, 1983), 214.

empowering, and sustainable (partisipatif, berpusat pada orang, memberdayakan, dan berkelanjutan).

Lembaga keuangan mikro menjadi harapan kalangan bawah dalam membantu mengeluarkan kesenjangan sosial mereka dalam meningkatkan kesejahteraan individu maupun kelompok. Model pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Gunawan Sumodiningrat⁸⁶ saat ini bisa diinovasi dengan mempermudah memberikan akses permodalan untuk meningkatkan kemandirian. Hal tersebut merupakan salah satu upaya memberikan kekuasaan mengelola modal demi kemaslahatan yang berkelanjutan melalui lembaga keuangan mikro Islam. Kemudian ditopang dengan memberikan stimulus inovasi persaingan dunia usaha masa kini untuk selalu mengeluarkan ide kreatif. Dengan begitu syarat pemberdayaan bisa diinisiasi dari 3 (tiga) karakter: *pertama*, pengembangan potensi masyarakat secara berkelanjutan (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan *ketiga*, melindungi yang lemah semakin lemah, memperjuangkan kesetaraan dalam sosial (*equality*).

Abbot mengajukan konsep teori pengembangan pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (*equality*), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (*power relations*) maka apabila tidak, tingkat keberhasilan yang akan didapatkan rendah. Kemudian dia mengkorelasikan teori pengembangan dengan teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan secara prinsipal memberikan gambaran adanya hubungan negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) atau *super power* (adi daya) dengan negara pinggiran (tidak maju), bisa juga antara pusat pemerintahan (ibu kota) dengan pemerintahan pinggiran (desa). Menurut Abbot dari teori ketergantungan akan muncul pemahaman tentang keseimbangan (*equilibrium*) kesatuan (*unity*), pertanggung jawaban (*responsibility*) dan kesetaraan (*equality*), yang pada fase berikutnya membentuk sebuah pemberdayaan (*empowerment*) yang kemudian masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan teori keadilan.⁸⁷ Keadilan sosial dalam Islam mencakup, (1) keadilan distribusi kekayaan yang merata, (2) keadilan bagi orang-orang yang kurang mampu dengan menyediakan kebutuhan

⁸⁶ Gunawan Sumodiningrat, "Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Indonesian Economy and Business* 14, no. 3 (July 1, 1999), <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39431>.

⁸⁷ Gunawan Sumodiningrat, "*Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*", Edisi II. (Jakarta: PT. Bina Row Pariwara, 1997), 16-20. Teori keadilan dalam ekonomi Islam memaknai perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dalam bersosial agar supaya memperhatikan orang yang kurang mampu dalam segi sosial, sebab hal tersebut bisa menutupi atau meminimalisir jurang ketimpangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ayat yang menjadi landasan teori tersebut diantaranya:

آمُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اُجْرٌ كَبِيْرٌ (الحديد: ٧)

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Q.S. Al-Hadid: 7)

dasar mereka, dan (3) keadilan perlindungan terhadap kaum yang lemah dari segala bentuk penindasan. Salah satu tokoh teori keadilan John Rawls menyimpulkan prinsip keadilan yang tidak jauh beda dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam diantaranya: *pertama*, semua orang punya hak yang sama dalam melakukan dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia dan warga Negara. *Kedua*, ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan dapat dipenuhi dengan dua cara yaitu: (1) memberikan kesempatan dan jabatan kepada semua orang sesuai dengan kompetensinya secara jujur dan adil, (2) memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang paling tidak diuntungkan secara sosial ekonomi.⁸⁸

Prinsip keadilan di atas dekat dengan yang diungkapkan oleh Kelso dan Adler hampir setengah abad yang lalu. Keadilan ekonomi didefinisikan oleh tiga prinsip dasar: keadilan partisipatif, keadilan distributif dan keadilan pembatasan. Keadilan partisipatif membutuhkan akses dan kesempatan yang sama meskipun tidak menjamin hasil yang sama. Dengan demikian, keadilan ekonomi menolak kehadiran hak istimewa khusus, hambatan sosial, dan praktik diskriminatif. Keadilan distributif mengacu pada imbalan yang adil dan wajar untuk aktivitas produktif seseorang. Seperti halnya keadilan partisipatif, keadilan distributif runtuh ketika praktik-praktik diskriminatif dan hambatan sosial eksklusif ada. Akhirnya, prinsip pembatasan mengacu pada proses sosial, prinsip keseimbangan diperlukan untuk mendeteksi distorsi dan untuk melakukan koreksi apa pun yang diperlukan untuk memulihkan tatanan ekonomi yang adil dan seimbang untuk semua.⁸⁹ Prinsip pembatasan keadilan adalah umpan balik atau, dalam istilah moral, prinsip anti-keserakahan yang oleh beberapa orang Kelsonia disebut sebagai prinsip harmoni (*economic harmony*) dan yang lain disebut keadilan sosial.⁹⁰ Prinsip ini, dilakukan melalui upaya terorganisir untuk mengubah institusi yang tidak adil, memandu pemulihan keseimbangan antara partisipasi (*input*) dan distribusi (*out-take*) ketika salah satu prinsip dilanggar. Prinsip ini membatasi akumulasi modal monopolistik.⁹¹

Chapra mengkritik negara-negara mayoritas muslim yang lebih mementingkan membangun pertahanan untuk keamanan nasional dari pada melakukan pemberdayaan kepada warga Negara yang berada dalam garis kemiskinan. Padahal menurut dia sumber keamanan yang nyata bagi negara-negara Muslim yang lebih miskin dan berkembang terletak pada kekuatan

⁸⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *SSRN Scholarly Paper* (Rochester, NY: Social Science Research Network, April 1, 2009), <https://papers.ssrn.com/abstract=2847573>.

⁸⁹ Clement Tisdell and Shabbir Ahmad, "Microfinance: Economics and Ethics," *International Journal of Ethics and Systems* 34, no. 3 (August 3, 2018): 372–92, <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2018-0028>.

⁹⁰ Louis O. Kelso, Mortimer J. Adler, "*The Capitalist Manifesto*". (New York: Random House, 1958), 80-81.

⁹¹ Norman G. Kurland, "The Just Third Way: Basic Principles of Economic and Social Justice | Center for Economic & Social Justice," accessed March 5, 2019, <https://www.cesj.org/resources/articles-index/the-just-third-way-basic-principles-of-economic-and-social-justice-by-norman-g-kurland/>.

internal yang dicapai melalui reformasi moral, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial-ekonomi. Tidak ada jumlah pengeluaran pertahanan yang dapat memberikan keamanan terhadap disintegrasi internal yang mendapatkan momentum di banyak negara Muslim. Terkadang tujuan pembangunan pertahanan, memastikan integritas nasional dan teritorial, terancam oleh pengeluaran pertahanan yang berlebihan. Ini karena, seperti yang dikatakan dengan tepat oleh Paul Kennedy, basis ekonomi yang kuat lebih vital bagi suatu bangsa, dalam jangka panjang, daripada superioritas militer.⁹²

Teori dan konsep pemberdayaan masyarakat saat ini sangatlah banyak dan saling menyempurnakan satu sama lain. Peneliti sangat condong tawaran Chapra terhadap pemberdayaan. Sebelum itu dalam bukunya menjelaskan bahwa Allah SWT melalui ayat-ayat sucinya sangat memberdayakan kaum fakir miskin. Dia menawarkan 2 (dua) alternatif pemberdayaan yang berkeadilan. *Pertama*, rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*), dan *kedua* pengembangan sosial (*social development*) atau pemberdayaan kelompok (*community empowerment*).⁹³

C. Revolusi Ekonomi Islam di Era Digitalisasi Ekonomi

Era teknologi digital memberikan fenomena berbeda di dunia perekonomian. Fenomena ini menyediakan lingkungan bar untuk kebangkitan kelompok perusahaan baru yang didorong atau diaktifkan oleh teknologi masa kini.⁹⁴ Masyarakat di era digital dituntut bisa berinovasi dengan segala kemampuan dan skill yang dimiliki, agar supaya kekuatan-kekuatan ekonomi bisa seimbang, tidak dimonopoli oleh sekelompok orang atau komunitas yang lebih mementingkan kelompoknya. Hal itu dimaksudkan untuk menyeimbangkan peran kekuasaan perekonomian. Terutama daerah-daerah pinggiran harus menjadi penopang utama perekonomian suatu daerah dengan memulai membangun usaha-usaha kecil yang *survive*.⁹⁵ Usaha-usaha kecil yang dibangun saat ini tidak dibatasi untuk menggunakan sistem warisan dari perusahaan-perusahaan mapan yang dibangun selama suatu periode. Mereka lebih suka mengadopsi konsep-konsep baru seperti media sosial, smartphone atau sensor, di antara teknologi baru lainnya yang dirancang untuk mengeksploitasi pasar mereka.⁹⁶

⁹² United Nations Conference on Trade and Development (CTAD), "*Trade and Development Report 1985*". (New York: United Nation Publication, 1985), 123-124.

⁹³ M. Umer Chapra, "*Islam and Economic Development*". (Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1993), 47.

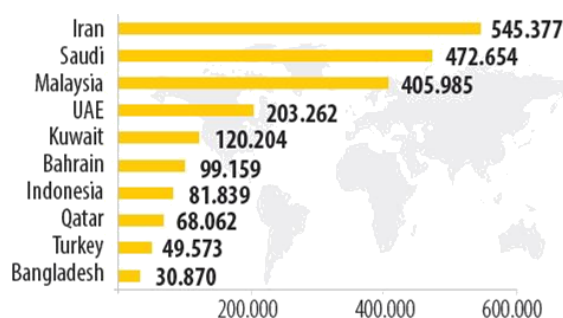
⁹⁴ Sumedha Chauhan, Parul Gupta, and Mahadeo Jaiswal, "Factors Inhibiting the Internet Adoption by Base of the Pyramid in India," *Digital Policy, Regulation and Governance* 20, no. 4 (June 11, 2018): 323–36, <https://doi.org/10.1108/DPRG-01-2018-0001>.

⁹⁵ Daniel Veit et al., "Business Models," *Business & Information Systems Engineering* 6, no. 1 (February 1, 2014): 45–53, <https://doi.org/10.1007/s12599-013-0308-y>.

⁹⁶ Eric Ansong and Richard Boateng, "Surviving in the Digital Era – Business Models of Digital Enterprises in a Developing Economy," *Digital Policy, Regulation and*

Ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa dekade mengalami naik turun. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim dapat terus menguatkan keuangan Islam. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam Indonesia siap bersaing di dunia global yang berbasis teknologi dengan segala tantangan yang akan dihadapi. Indonesia pada tahun 2016 naik peringkat ke 9 dunia, dan tahun 2017 naik ke peringkat 7 dalam kategori total asset keuangan Islam global.⁹⁷

Gambar 2.1.
Peringkat 10 Besar Total Asset Keuangan Islam Global 2017



Revolusi industri 4.0 memberikan kemajuan tersendiri bagi penikmat ekonomi Islam di Indonesia. Sebab penduduk di Indonesia mayoritas muslim berkisar 86,18% dari jumlah keseluruhan populasi.⁹⁸ Optimisme membangun kemandirian ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat sangat bisa dimungkinkan Indonesia menjadi poros kekuatan utama perekonomian dunia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus sudah mulai digencarkan di berbagai daerah, terutama memperhatikan daerah-daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan pinggiran. Dengan adanya keuangan inklusif berbasis teknologi atau yang lebih dikenal era revolusi industry 4.0, pemerintah setempat maupun pemerintah pusat dapat mempercepat menumbuhkan rasa kemandirian dalam berekonomi. Salah satunya lembaga keuangan mikro Islam, lembaga tersebut dapat menyentuh pelayanan masyarakat pada lapisan terjauh yang tidak terjamah oleh lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁹⁹ Lembaga keuangan mikro Islam yang canggih secara teknologi akan memudahkan semua pelayanan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Governance 21, no. 2 (January 14, 2019): 164–78, <https://doi.org/10.1108/DPRG-08-2018-0046>.

⁹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “*Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017*,” 4.

⁹⁸ Sensus penduduk 2010 BPS Indonesia

⁹⁹ Indra Widiarto and Ali Emrouznejad, “Social and Financial Efficiency of Islamic Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis Application,” *Socio-Economic Planning Sciences* 50 (June 1, 2015): 1–17, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2014.12.001>.

Kawula pemuda di Indonesia harus mulai didorong mengenal pelayanan keuangan berbasis teknologi, setelah itu kemudia memberdayakan mereka untuk juga memberikan pendidikan literasi keuangan masa kini kepada para pelaku usaha yang selama ini membutuhkan kemudahan bantuan modal. Formasi startup *fintech* lebih sering terjadi di negara-negara dengan ekonomi berkembang dan pasar modal salah satunya Indonesia. Semakin berkembang ekonomi dan pasar modal tradisional, semakin tinggi permintaan untuk *startup fintech*. Hipotesis ini bekerja melalui dua saluran. Seperti halnya startup lainnya, *startup fintech* membutuhkan pembiayaan yang cukup untuk mengembangkan dan memperluas model bisnis mereka. Jika pasar modal tradisional dan ventura berkembang dengan baik, pengusaha memiliki akses yang lebih baik ke modal yang diperlukan untuk mendanai bisnis mereka. Meskipun pembiayaan usaha kecil secara tradisional tidak terjadi melalui pasar modal reguler, startup fintech mungkin memenuhi syarat untuk menerima dana dari inkubator atau akselerator yang dibentuk oleh sektor keuangan tradisional. Namun, program seperti itu sebagian besar telah dibuat oleh pemain besar yang berlokasi di negara berkembang.¹⁰⁰ Selain itu, semakin berkembang ekonomi, semakin besar kemungkinan individu membutuhkan layanan seperti manajemen aset atau alat pendidikan keuangan.

Permintaan *fintech* dilihat sejauh mana teknologi terbaru tersedia dalam perekonomian, sehingga startup fintech pemula di daerah pinggiran dapat membangun model bisnis mereka pada teknologi ini. Kemajuan teknis adalah salah satu pendorong kewirausahaan yang paling penting.¹⁰¹ Karena revolusi teknologi tidak bisa dipungkiri menghasilkan peluang yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pengusaha-pegusaha pemula dengan menganalisa peluang dan kemampuan mereka.¹⁰² Perubahan teknologi memungkinkan praktik baru dan model bisnis muncul dalam kasus *startup fintech*, fenomena ini pasti mengganggu sektor jasa keuangan tradisional. Perubahan yang didorong oleh teknologi tersebut di masa lalu terjadi dengan perpindahan dari cabang perbankan

¹⁰⁰ Ronald J. Gilson and Bernard S. Black, "Does Venture Capital Require an Active Stock Market?," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, May 1, 1999), <https://papers.ssrn.com/abstract=219174>. or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.219174>

¹⁰¹ Giovanni Dosi, "Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change," *Research Policy* 11, no. 3 (June 1, 1982): 147–62, [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(82\)90016-6](https://doi.org/10.1016/0048-7333(82)90016-6). Bisa dilihat pula dalam Arend, R. J. (1999). Richard J. Arend, "Emergence of Entrepreneurs Following Exogenous Technological Change," *Strategic Management Journal* 20, no. 1 (1999): 31–47. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199901\)20:1<31::AID-SMJ19>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199901)20:1<31::AID-SMJ19>3.0.CO;2-O)

¹⁰² Stam, E. & Garnsey, E. "Entrepreneurship in The Knowledge Economy," *Centre for Technology Management (CTM) Working Paper*, No. 2007/04. Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.1923098>

ke mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan dari mesin ATM ke telepon dan perbankan berbasis online.¹⁰³

Pengembangan *Fintech* memiliki dampak besar pada pelaku usaha karena banyak produk yang dihasilkan dipasarkan dan dikenalkan berbasis online dan karenanya dapat dibeli dari berbagai kalangan. Di sisi yang lain, metode analisis data modern dan IT memungkinkan individualisasi banyak layanan keuangan secara digital. Tetapi kerja sama yang tepat waktu dengan perusahaan-perusahaan *Fintech* dapat membantu lembaga keuangan mikro menciptakan peluang baru.¹⁰⁴ *Fintech* dipandang sebagai pasar baru yang mengintegrasikan keuangan dengan teknologi.¹⁰⁵ Hadirnya teknologi keuangan menggantikan struktur keuangan tradisional dengan proses berbasis teknologi baru.

Dalam ekonomi global saat ini, industri jasa keuangan telah menjadi salah satu kontributor utama bagi produk domestik negara. Teknologi telah menjadi bagian integral dari para pelaku usaha maupun lembaga keuangan, dan saat ini lembaga keuangan telah mulai bersaing di luar layanan keuangan yang menghadapi persaingan yang semakin ketat dari berbagai kalangan. Akibatnya, lembaga keuangan tradisional, yang kurang memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai kehilangan sebagian pangsa pasar mereka.

Lembaga keuangan ekonomi Islam salah satu konsep keuangan dengan pangsa pasar yang menjanjikan.¹⁰⁶ Persaingan usaha jasa dan pelayanan mulai ditingkatkan dengan berbagai inovasi teknologi terbaru. Hal itu akan memberikan rasa kenyamanan dan kemudahan kepada para pengguna jasa. Meskipun industri keuangan secara tradisional telah menjadi pengguna awal dan pengguna intensif perkembangan baru dalam teknologi informasi dan komunikasi, munculnya model bisnis yang inovatif, kreatif, efisien dan munculnya pesaing baru memiliki pengaruh luar biasa pada dinamika industri saat ini. Dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan sangat cepat dan intensif biaya, penyedia layanan bisnis keuangan saat ini menghadapi transformasi yang substansial: keuangan digital (*digital finance*). Klien yang

¹⁰³ Stam, Erik and Garnsey, Elizabeth W., "Entrepreneurship in the Knowledge Economy," (April 1, 2007). *Centre for Technology Management (CTM) Working Paper*, No. 2007/04. Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1923098>. Bisa dilihat juga dalam Thomas Puschmann, "Fintech," *Business & Information Systems Engineering* 59, no. 1 (February 1, 2017): 69–76, <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>.

¹⁰⁴ Marina Kudinska, Inna Romānova, "Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity?," *ResearchGate*, accessed March 9, 2019, <http://dx.doi.org/10.1108/S1569-375920160000098002>.

¹⁰⁵ Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan and Buckley, Ross P., "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?," (October 1, 2015). University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047; *UNSW Law Research Paper* No. 2016-62. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2676553> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553>

¹⁰⁶ Hans Dieter SEIBEL, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 23, no. 1 (2008): 86–103, <https://www.jstor.org/stable/41220061>.

lebih mengerti teknologi lintas generasi, teknologi baru, dan digitalisasi industri menantang model bisnis penyedia layanan tradisional.¹⁰⁷ Terhadap latar belakang ini, sebagian besar pemain di industri mencoba merancang produk dan layanan keuangan yang disesuaikan, cerdas, dan fleksibel, namun hemat biaya dan berusaha untuk mencapai tingkat sentrisitas pelanggan yang baru.

D. Keuangan Mikro Islam Sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional: Peluang dan Tantangan

Visi kesejahteraan ciri khas keuangan mikro, ekonomi keuangan Islam tidak jauh berbeda. Islam, sebagai agama dan cara hidup, didasarkan pada seperangkat keyakinan agama dan norma ekonomi yang juga berfokus pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, terutama untuk bagian masyarakat yang terabaikan dan miskin. Dalam hubungannya dengan visi agama dan tujuan kesejahteraan tersebut, keuangan mikro Islam telah muncul sebagai inovasi keuangan baru dan sebagai salah satu solusi menuju poros kesejahteraan bersama.¹⁰⁸ Para ahli dalam keuangan Islam sering berpendapat bahwa kepercayaan agama di negara-negara Islam yang menentang keuangan mikro konvensional adalah salah satu alasan mengapa keuangan mikro yang sesuai dengan syariah diperlukan bahkan dibutuhkan dalam menjawab fenomena sosial yang semakin timpang.

Keuangan mikro dan keuangan Islam adalah dua inovasi keuangan yang berhasil yang telah berkembang selama tiga dekade terakhir. Keuangan mikro berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan menyediakan akses kredit yang lebih mudah bagi kaum miskin marjinal.¹⁰⁹ Islam menekankan keadilan distributif. Distribusi memiliki peringkat yang cukup tinggi dalam hirarki nilai-nilai syariah, dan merupakan kriteria Al-Qur'an yang eksplisit untuk mengevaluasi masyarakat.¹¹⁰ Penolakan untuk saling berbagi dengan yang orang membutuhkan dianggap pelanggaran seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الحاقة: ٣٤)

¹⁰⁷ Peter Gomber, Jascha-Alexander Koch, and Michael Siering, "Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions," *Journal of Business Economics* 87, no. 5 (July 1, 2017): 537–80, <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.

¹⁰⁸ William J. Hippler III, M. Kabir Hassan, and Ali Ashraf, "Performance of Microfinance Institutions in Muslim Countries," *Humanomics* 30, no. 2 (May 6, 2014): 162–82, <https://doi.org/10.1108/H-11-2013-0073>.

¹⁰⁹ Rashidah Abdul Rahman and Faisal Dean, "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance," *Humanomics* 29, no. 4 (October 28, 2013): 293–306, <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>.

¹¹⁰ Rose Abdullah and Abdul Ghafar Ismail, "Al-Tawhid in Relation to the Economic Order of Microfinance Institutions," *Humanomics* 30, no. 4 (October 30, 2014): 325–48, <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>.

Artinya: “Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan kepada orang-orang miskin.” (QS. *Al-Haqqah*: 34)

وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الفجر: ١٨)

Artinya: “Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.” (QS. *Al-Fajr*: 18)

Memerangi kemiskinan, atau pemenuhan kebutuhan, adalah tujuan utama distribusi ulang dalam Islam dan merupakan salah satu ekspresi putusan Ilahi untuk menghormati sesama. Euis Amalia berpendapat bahwa memutus rantai kemiskinan kewajiban bagi setiap muslim, utamanya bagi *stakeholder* yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kegiatan tersebut. Distribusi kekayaan yang menyuluruh menciptakan kesejahteraan yang dicitakan secara bersama dan harus berlandaskan nilai-nilai moral. Dilarang keras terjadinya penindasan serta eksploitasi antar sesama. Hal tersebut dibutuhkan keseimbangan, kebebasan, keadilan, dan kebaikan dalam distribusi kekayaan demi terciptanya *maslahah lil ummah* (kemaslahatan bagi ummat).¹¹¹

Sistem keuangan mikro sangat penting untuk pengembangan ekonomi negara mana pun dan diakui secara global. Mereka bertindak sebagai tulang punggung dengan menyalurkan bahkan dana kecil dari unit surplus ke unit defisit. keuangan mikro dianggap sebagai mesias keuangan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara miskin dan berkembang.¹¹² Keuangan mikro, yang bertujuan terutama untuk membantu kaum miskin meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka, khususnya dengan menyediakan akses ke pembiayaan mikro. Lembaga mikro memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dari segi kualitas layanan, agar bisa mencapai jangkauan yang lebih luas dan lebih dalam, dan mengurangi biaya operasional.

Pemberian pembiayaan dan aksesibilitas keuangan bagi kaum miskin melalui keuangan mikro Islam juga relevan bagi bank-bank Islam yang harus menempatkan komitmen sosial yang lebih besar untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, termasuk keadilan sosial, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, dan mendorong pembangunan ekonomi.¹¹³ Banyak peneliti percaya pada potensi besar perbankan Islam untuk terlibat dalam program keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang biasanya berada di luar sektor

¹¹¹ Euis Amalia, “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 1, 2011), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>.

¹¹² Mohammed Abdul Samad, “Islamic Micro Finance: Tool for Economic Stability and Social Change,” *Humanomics* 30, no. 3 (August 5, 2014): 199–226, <https://doi.org/10.1108/H-12-2013-0085>.

¹¹³ Asyraf Wajdi Dusuki, “Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives,” *Humanomics* 24, no. 1 (February 22, 2008): 49–66, <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>.

perbankan formal.¹¹⁴ Negara-negara di dunia yang mayoritas Muslim ditantang betul memberantas kemiskinan, mulai dari tingkat paling bawah sampai kepada tingkat paling atas. Ini yang menjadi kerisauan dari berbagai kalangan akademisi ekonomi muslim, dimana mikro ekonomi Islam belum sepenuhnya dikenalkan, dijalankan sebagai program pengentasan kemiskinan. Kampanye¹¹⁵ untuk memperkenalkan sistem ekonomi Islam butuh gerakan secara bersama-sama, hal ini menjadi tugas dari para akademisi, peneliti, tokoh agama dan *stakeholder* terkait. Daerah pelosok dan pinggiran membutuhkan bantuan pembiayaan agar peningkatan perekonomian dapat membantu keberlangsungan kehidupan mereka. Di daerah timur misalnya,¹¹⁶ masih sering dilanda situasi politik yang tidak menentu, gejolak peperangan kekuasaan maupun intervensi dari negara tertentu menyebabkan ketidakpastian iklim investasi perekonomian.

Di Indonesia sendiri dengan mayoritas penduduk muslim, angka kemiskinan mencapai 9,82% di bulan maret 2018,¹¹⁷ fenomena tersebut memang

¹¹⁴ Al-Harran, "Introduction: Cases in Islamic Finance," *Arab Law Quarterly* 14, no. 3 (January 1, 1999): 193–202, <https://doi.org/10.1163/026805599125826426>. lihat juga di Mahmoud El-Gamal, M.A., "*Islamic Finance: Law, Economics and Practice*". (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 8.

¹¹⁵ Sistem *Awareness Campaign* (Kampanye Kesadaran) pernah ditulis dan ditawarkan oleh Peneliti dalam sebuah laporan praktek kerja lapangan (PKL) tahun 2018 kepada Direktorat Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) bagian pengembangan dan kelembagaan untuk memberikan literasi dan preferensi keuangan syariah secara massif dan konsisten kepada tokoh agama, mahasiswa dan masyarakat. Sebab dalam survei literasi 2016 yang dilaksanakan oleh OJK, indeks keuangan syariah hanya 8,11%. Artinya dari 100 orang, hanya ada 8 orang yang faham keuangan syariah. di dalam Road-Map IKNB Syariah 2015-2019 dikatakan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan syariah sangatlah kecil sekitar 28,25% tahu dan 71,75% tidak tahu. Peneliti berpendapat kurangnya literasi dan preferensi masyarakat terhadap keuangan syariah juga menjadi kendala besar, selama ini pemahaman mereka menyebabkan stigma negatif, dan tidak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat Islam sendiri beranggapan pembiayaan syariah sama dengan pembiayaan konvensional. Masyarakat menyebut pembiayaan syariah hanyalah istilah saja dalam pemasaran dan promosi produk pembiayaan. Hal tersebut diakibatkan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus mampu membuat strategi edukasi dan sosialisasi yang mampu mengenalkan pembiayaan syariah kepada seluruh segmen masyarakat, baik dari kalangan menengah (*middle*) sampai pada kalangan bawah (*lower*). Sehingga literasi dan preferensi masyarakat tentang keuangan syariah dapat mendorong pengguna produk yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah. Lihat juga Laporan Otoritas Jasa Keuangan 2017.

¹¹⁶ Halima Begum et al., "Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach," *Journal of Economic and Administrative Sciences*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0007>.

¹¹⁷ Pada bulan maret 2018 penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang dengan persentase 9,82%. Kalau dibandingkan dengan maret 2017 penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang dengan persentase 10,64%. Jadi, penurunan angka kemiskinan dari maret 2017 ke maret 2018 sebesar 1,82 juta orang dengan persentase 0,82%. Bisa dilihat lengkap di

memberikan semangat optimisme untuk terus melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dari persentase 9,82% itu, masih didominasi oleh kalangan muslim,¹¹⁸ ini menjadi tugas kita bersama untuk mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro Islam dan yang terkenal diberbagai kalangan seperti *Bayt al-Maal wat Tamwil* (BMT), memiliki peluang sangat besar untuk berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan.¹¹⁹

Pengentasan kemiskinan bisa berhasil jika lembaga keuangan Islam seperti BMT secara besar-besaran dilakukan di banyak daerah.¹²⁰ Mengingat peran penting dari *Bayt al-Maal wat Tamwil* (BMT) dalam memerangi kemiskinan, diharapkan pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi Islam lokal dan internasional mengintensifkan dukungan untuk BMT. Pemerintah dapat menyalurkan sebagian dari anggaran publik melalui BMT yang kemudian mengelola dan mengatur pembiayaan untuk orang yang tepat. Dua organisasi ke-Islaman terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga dapat memaksimalkan peran BMT untuk menciptakan kemaslahatan bagi ummat. Peran BMT dapat dimaksimalkan ketika pemerintah dan komunitas Muslim saling berpangku tangan dengan baik.

Lembaga keuangan mikro Islam seperti BMT dapat menjadi lokomotif agen perubahan sosial-ekonomi (*agent of socio-economic change*)¹²¹ di tengah masyarakat saat ini. *Bayt al-Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki sistem keuangan mikro yang idealis yang dalam kerangka kerjanya menanamkan doktrin dan moralitas agung dari agama Ilahi, budaya dan nilai-nilai lokal serta metodologi keuangan yang berbeda yang bertujuan untuk meringankan kendala sosial-

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

¹¹⁸ Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, "The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution," *Humanomics* 31, no. 2 (May 11, 2015): 160–82, <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.

¹¹⁹ Muhammad Mahbubi Ali and Ir Ascarya, "Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 5, no. 2 (March 9, 2014), <https://doi.org/10.30993/tifbr.v5i2.44>.

¹²⁰ Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto and Abdul Ghafar B. Ismail, "Improving the Effectiveness of Islamic Micro-financing: Learning from BMT Experience," *Humanomics* 26, no. 1 (February 23, 2010): 65–75, <https://doi.org/10.1108/08288661011025002>.

¹²¹ Kholis, Nur, "The Contribution of Islamic Microfinance Institution in Increasing Social Welfare in Indonesia (A Case Study of Bmt's Role At Pakem Market Micro Traders Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi Islam SYIRKAH* 4, no. 1 (2009): 1978-0079. Bisa dilihat juga di Lesmana, Teddy, "The Role of Islamic Micro Financial Cooperatives (Baitul Maal Wat Tamwil) In Local Economic Development: Case Study of Three Provinces in Indonesia." *Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2008): 49-62.

ekonomi dan berbagai masalah kemiskinan yang mendera ummat.¹²² Selain itu juga, pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan mikro Islam dapat berhasil jika pembiayaan Islam dilakukan di banyak bidang secara masif, dan pemerintah ikut andil mengambil bagian dalam program yang dikembangkan ini. Untuk tujuan pendekatan holistik pengembangan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan, pengembangan spiritual, terutama melalui internalisasi nilai-nilai moral Islam dalam kesadaran wirausaha, juga diperlukan.

Keuangan mikro Islam merupakan pencapaian besar dalam mengatasi kemiskinan, lembaga ini muncul sebagai konsep baru dalam bidang keuangan mikro yang menunjukkan posisi komparatif yang lebih baik dalam mengatasi kemiskinan, terutama untuk mengurangi kemiskinan di kalangan Muslim itu sendiri di wilayah mayoritas. Melalui produk dan program pengembangan moralnya, konsep dari lembaga yang berbasis Islam ini, tidak hanya dapat mengurangi tingkat kemiskinan tetapi juga dapat mengarah pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Konsepsi *Bayt al-Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sebuah institusi yang meliputi dua jenis kegiatan: *satu*, kegiatan untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, serta infaq shadaqah lainnya dan didistribusikan kepada penerima manfaat untuk mengatasi kemiskinan. *Dua*, kegiatan untuk menciptakan nilai tambah baru bagi pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia.¹²³ Sementara itu, menurut Widodo, BMT adalah lembaga yang terdiri dari dua kegiatan sekaligus, *Bayt al-Maal* dan *Bayt Tamwil*.¹²⁴

Keuangan mikro sering didekati secara ideal, karena dirancang untuk membantu orang miskin.¹²⁵ Pada kenyataannya, seringkali ada faktor sosial daripada faktor finansial yang menentukan kemiskinan. Dhumale dan Sapcanin¹²⁶ lebih lanjut menyatakan bahwa instrumen pinjaman tidak disesuaikan dengan

¹²² Nazirwan, Mohamad. "Embracing The Islamic Community-Based Microfinance For Poverty Alleviation." (2010). https://www.researchgate.net/publication/265068882_Embracing_Microfinance_Proposed_Collaboration_Between_Zakat_Institution_And_Microfinance_Institutions

¹²³ Makhalul Ilmi S. M., "*Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan Dan Alternatif Solusi*". (Yogyakarta: UII Press, 2002), 65.

¹²⁴ *Bait al-Maal* di BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana nirlaba (sosial). Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Kemudian disalurkan ke *mustahiq* (orang yang berhak, atau untuk kebaikan yang lebih besar untuk menerima dana sosial). Sedangkan *Bait al-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dan mendistribusikan dana publik untuk motif keuntungan (laba). Pengumpulan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan distribusi dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang sesuai dengan prinsip Syariah.

¹²⁵ Faisal Dean and Rashidah Abdul Rahman, "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance," *Humanomics* 29, no. 4 (October 28, 2013): 293–306, <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>.

¹²⁶ Dhumale, Rahul, and Amela Sapcanin. "*An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance*". (World Bank, 1998), 6-7

kondisi peminjam kecil, dan pembiayaan kelembagaan jangka pendek, menengah, dan panjang biasanya tidak tersedia untuk orang miskin. Ada juga faktor sosial ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan klien. Kurangnya Sumber Daya Insani (SDI) yang terlatih merupakan tantangan utama bagi pertumbuhan, kurangnya dukungan hukum, lemahnya pengawasan dan pelatihan, kurangnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),¹²⁷ ekspansi lembaga dan kurangnya konsolidasi sektor keuangan mikro Islam di tengah persaingan ekonomi.

1. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia¹²⁸, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:¹²⁹

- a. *Livelihood Activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah harian, yang lebih dikenal sebagai sektor informal seperti contoh pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan merupakan usaha kecil yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Kaitan klasifikasi UMKM yang menjadi obyek penelitian Penulis ialah pada skala *Livelihood Activities* dan *Micro Enterprise*.

¹²⁷ Rusydiana, Aam S., and Abrista Devi. "Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP)." *Business & Management Quaterly Review* 4, no. 1 (2013): pp. 51-62. <https://core.ac.uk/display/83283333?recSetID=>

¹²⁸ Suryanto, Mr & Abdul Muhyi, Herwan. "Profile and Problem of Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 141, no. 1 (2018): pp. 48-52, <https://doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.10>.

¹²⁹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). "*Profil Bisnis usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*." (Jakarta, 2015), 23.

Berikut tabel 2.1 adalah karakteristik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta usaha besar (UB).

Tabel: 2.1
Karakteristik UMKM dan UB

UKURAN USAHA	KARAKTERISTIK
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat diganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 7. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 9. Seperti usaha perdagangan contoh pedagang kaki lima serta pedagang di pasar.
Usaha Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. 4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. 5. Sudah membuat neraca usaha. 6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 7. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam qqberwira usaha. 8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. 9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. Seperti contoh pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih

	<p>baik dengan pembagian tugas yang jelas antara lain: bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. 5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. 7. Seperti contoh usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
Usaha Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah (UM), yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Bab IV: Kriteria, Pasal 6 sebagaimana dalam tabel 2.2

Tabel: 2.2
Kriteria UMKM dan UB

UKURAN USAHA	KRITERIA	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50.000.000	Maksimal Rp. 300.000.000
Usaha kecil	>Rp. 50.000.000-Rp. 500.000.000	>Rp. 300.000.000- 2.500.000.000
Usaha Menengah	>Rp. 500.000.000-Rp. 10.000.000.000	>Rp. 2.500.000.000-Rp. 50.000.000.000
Usaha Besar	>Rp. 10.000.000.000	>Rp. 50.000.000.000

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:¹³⁰

- a. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk buah hasil tangan (*handmade*) sehingga standar kualitasnya beragam.
- b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
- c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.
- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- e. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

¹³⁰ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). "*Profil Bisnis usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*." (Jakarta, 2015), 25.

BAGIAN TIGA

GAMBARAN OBJEKTIF LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI PULAU MADURA

A. Sejarah Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri

1. Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

Inisiasi pendirian koperasi diprakarsai oleh mantan ketua umum PP. Muslimat Nahdlatul Ulama' (1995-2000) Alm. Nyai Hj. Aisyah Hamid Baidhowi, beliau adalah adik kandung dari Alm. KH. Abd. Rahman Wahid (Gus Dur). Sebagai ketua umum muslimat pada waktu itu, harus memikirkan keberlangsungan dan pemberdayaan anggota yang sangat banyak dan tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Pada waktu itu jumlah anggota muslimat NU sekitar 25 juta anggota, tentunya jumlah sedemikian rupa harus bisa dimanage dengan baik agar supaya visi misi besar Nahdlatul Ulama' benar-benar memberikan dampak sosial serta spiritual secara baik menurut tuntunan ajaran agama.¹³¹ Selama menjabat, beliau berhasil mendirikan 107 koperasi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan dapat memperbaiki aspek sosial masyarakat sekitar. Buah pemikiran yang disertai aksi nyata ini menjadi inisiatif penerus beliau melanjutkan perjuangan dalam bidang ekonomi.

Pendirian koperasi An-Nisa' Muslimat NU sebagai perusahaan induk merupakan amanat Kongres Muslimat NU di Batam, Kepulauan Riau, tahun 2006. Pendirian tersebut dirumuskan dalam master plan Muslimat NU hingga 2026 diselaraskan dengan pembangunan nasional melalui rencana program jangka menengah (RPJM) maupun rencana program jangka panjang (RPJP) Muslimat NU. Kemudian, pada harlah NU ke 62, 31 Januari 2007 secara resmi koperasi An-Nisa' didirikan. Tahun 2019 koperasi primer An-Nisa' 143 koperasi dengan 12 pusat koperasi di tingkat provinsi.¹³² Koperasi An-Nisa' menjalankan operasional sesuai tuntunan syariah Islam.

2. BMT NU

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura khususnya. Dalam beberapa tahun sebelumnya kesejahteraan masyarakat sekitar tidak ada peningkatan secara signifikan. Masyarakat kecamatan termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidup. Fenomena ini yang membuat Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Gapura prihatin. Oleh sebab itu, tahun 2003 Pengurus MWCNU Gapura memberikan tugas kepada lembaga

¹³¹ Wawancara Peneliti ketika *preliminary research* dengan ketua I primer koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU Pamekasan Nyai. Hj. Siti Halimah di kediaman beliau 24 Juli 2018.

¹³² <http://www.nu.or.id/post/read/101927/kiprah-cemerlang-muslimat-nu-di-usia-73-tahun> (artikel diakses pada 08 April 2019)

perekonomian (LP) MWCNU segera membuat solusi atas fenomena sosial masyarakat setempat. Berangkat dari kesepakatan bersama, LP MWCNU Gapura mencanangkan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keinginan tersebut pastinya diperlukan upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.¹³³

Dalam mewujudkan program yang telah disepakati bersama, serangkaian upaya telah dilakukan oleh LP MWCNU Gapura, diawali pelatihan kewirausahaan, bincang-bincang bersama alumni pelatihan untuk merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan, lokakarya tanaman alternatif selain tembakau dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama').

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat yang pertama kali diselesaikan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Ketua lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan *Bait al-Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWCNU Gapura menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam sistem syaria'ah.

Berdasarkan keputusan rapat pengurus MWCNU Gapura Sumenep pada 29 April 2007, nama BMT Nahdlatul Ulama' dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, bahwa nama Nahdlatul Ulama' tidak bisa digunakan oleh lembaga lain tanpa izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU).¹³⁴

3. BMT Sidogiri

BMT MMU (*Maslahah Mursalah lil Ummah*) PP. Sidogiri adalah cikal bakal lahirnya BMT UGT Sidogiri (Usaha Gabungan Terpadu). Berawal dari keresahan dewan pengasuh Alm. KH. Nawawi Thoyyib terhadap masyarakat sekitar yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah Islam dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya pinjaman berbunga (riba) masyarakat kepada para rentenir. Pada akhirnya beliau meminta kepada beberapa santri untuk membantu melunasi hutang-hutang mereka tanpa bunga. Fenomena inilah kemudian menjadi motivasi perjuangan oleh KH. Mahmud Ali Zain untuk mendirikan koperasi berbasis syariah, maka lahirlah BMT MMU.

Dua tahun selanjutnya, banyak masyarakat baik dari alumni maupun simpatisan meminta kepada PP. Sidogiri agar supaya mendirikan koperasi lintas

¹³³ Wawancara *preliminary research* Peneliti dengan H. Sukron Ma'mun selaku mantan ketua cabang BMT NU Tlanakan Pamekasan di kantor BMT 19 Juli 2018.

¹³⁴ <https://bmtnujatim.com/> (artikel diakses pada 09 April 2019)

daerah, permintaan yang sangat banyak dan didukung oleh para alumni, didirikanlah BMT UGT Sidogiri lintas daerah pada tanggal 22 Juni 2000. Sampai saat ini BMT UGT Sidogiri memiliki \pm 227 unit layanan, diantaranya ialah cabang Pamekasan yang mulai beroperasi tahun 2006.¹³⁵

B. Badan Hukum dan Struktur Organisasi

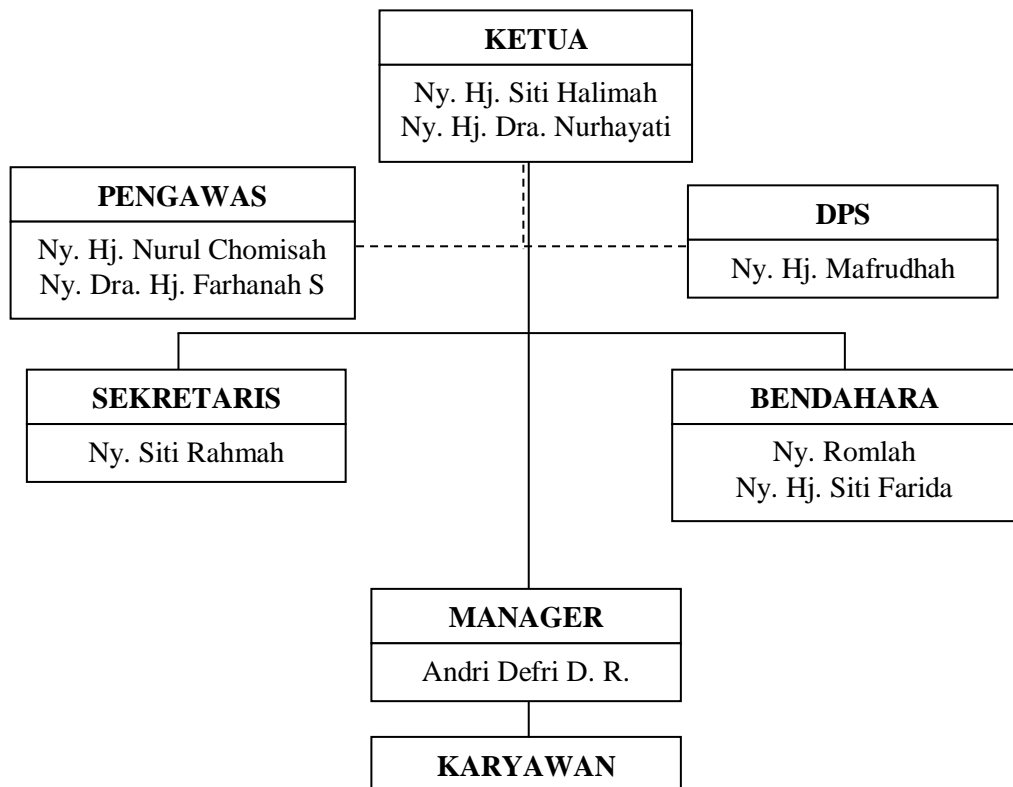
1. Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

a) Badan Hukum

Koperasi An-Nisa' Pamekasan memiliki badan hukum nomor: 8173/BH/II/1995 dan NPWP: 03-020-118-0-608-000 tertanggal 17 Maret 2010 dengan nama Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan.

b) Struktur

Gambar 3.1.
Struktur Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan



¹³⁵ Wawancara *preliminary research* Peneliti di kantor BMT dengan Ust. Abdul Hakki selaku ketua AOSP (*Account Officer Simpanan dan Pinjaman*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tanggal 22 Juli 2018.

2. BMT NU

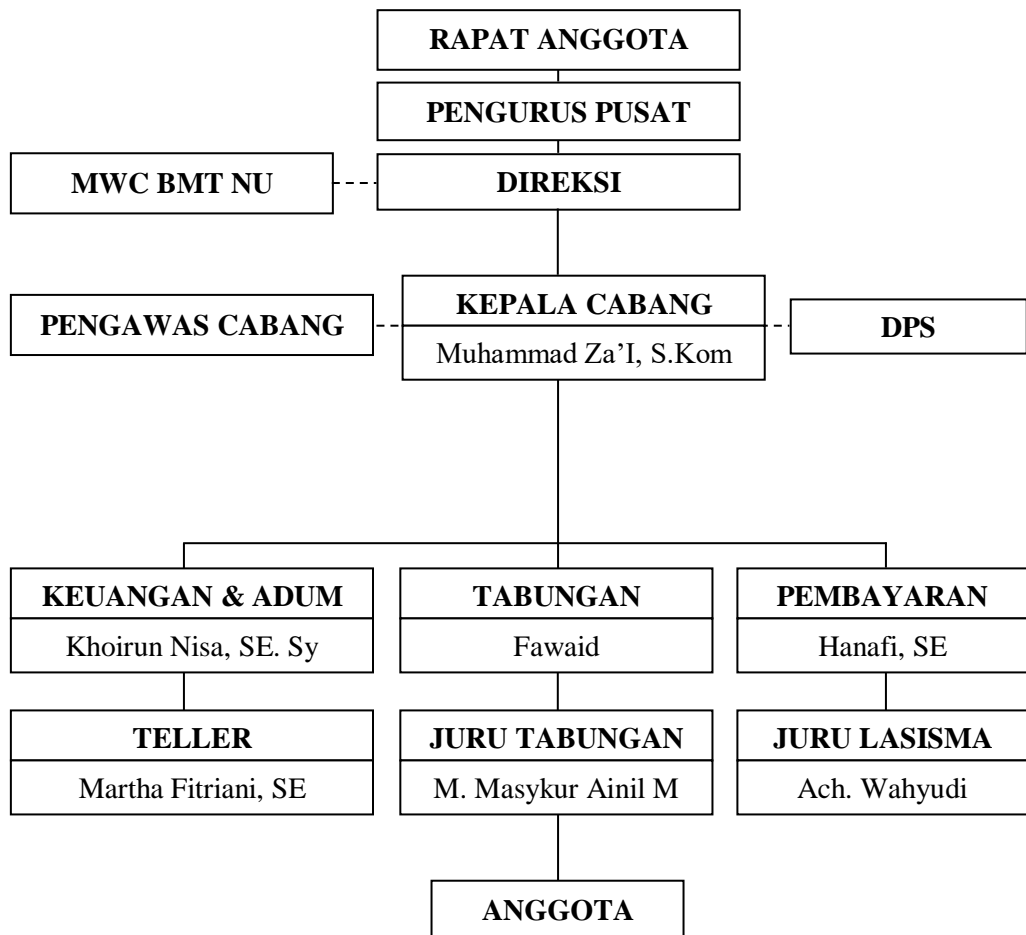
a) Badan Hukum

Pada tanggal 04 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Bait al-Maal wat Tamwil Nuansa Ummat disingkat dengan BMT NU.

b) Struktur Organisasi

Gambar 3.2

Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan



3. BMT Sidogiri

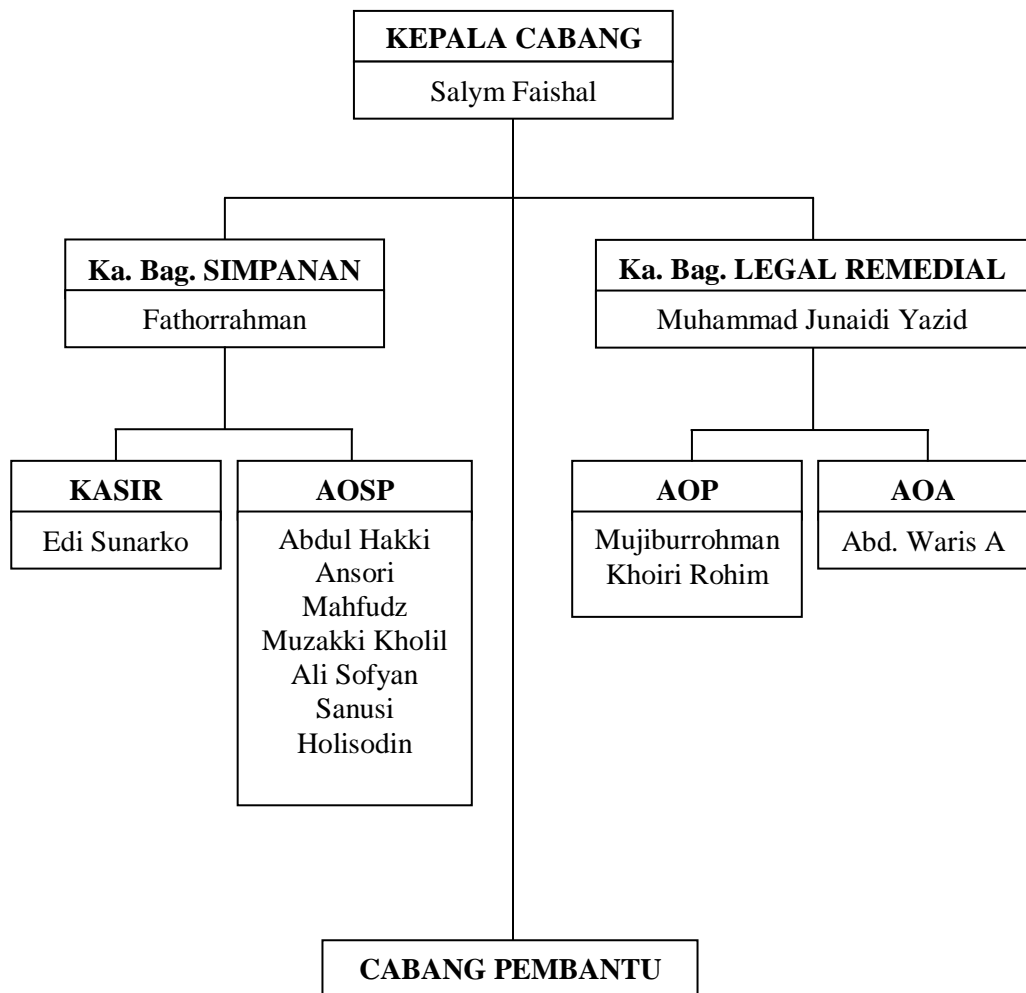
a) Badan Hukum

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” serta resmi beroperasi pada tanggal 05 Rabi’ul Awwal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 M.

b) Struktur Organisasi

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)
BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan



C. Visi Misi Lembaga

1. Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

Visi:

Maslahat, Berkah dan Menentramkan.

Misi:

1. Mengembangkan ekonomi *TITSYA* (Trading Berpola IT dan Syariah).
2. Menjadi mitra usaha bagi masyarakat kecil menengah ke bawah.
3. Membantu memudahkan Muslimat NU dan anggota Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan khususnya masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kehidupan.
4. Menjalankan fungsi sosial khususnya pada anggota dan masyarakat.
5. Menjadi wahana bagi anggota untuk berinvestasi secara aman dan nyaman sesuai syariah.
6. Mengutamakan kesejahteraan bersama.
7. Kreatif, inovatif dan profesional.
8. Membudayakan *mu'malah* secara syariah (berakhlak, jujur, amanah dan adil).

2. BMT NU

Visi:

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

Misi:

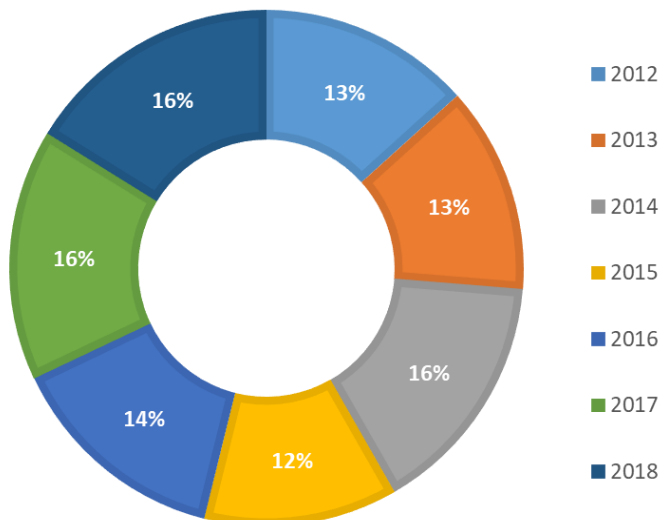
1. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
3. Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara Perseorangan maupun berbasis jamaah.
4. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf (ZISWAF).
5. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
6. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
7. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

8. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.
3. BMT Sidogiri
- Visi:
1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
 2. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.
- Misi:
1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
 2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan *maslahah*.
 3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
 4. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fathonah/Profesional*).

D. Perkembangan Usaha

1. Aset
 - a. Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

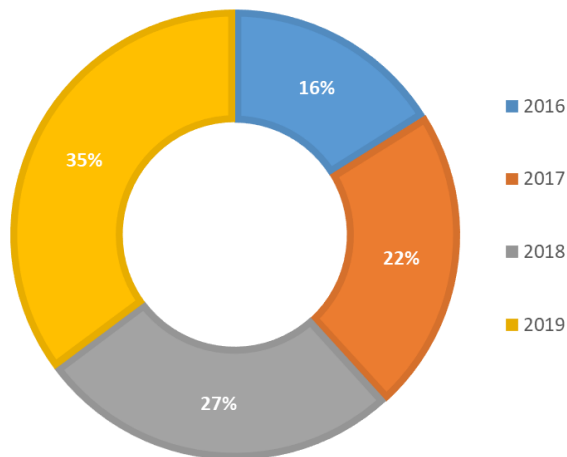
Gambar 3.4
Perkembangan Asset Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan
Tahun 2012-2018



Sumber Data: Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU diolah dari laporan RAT

b. KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan

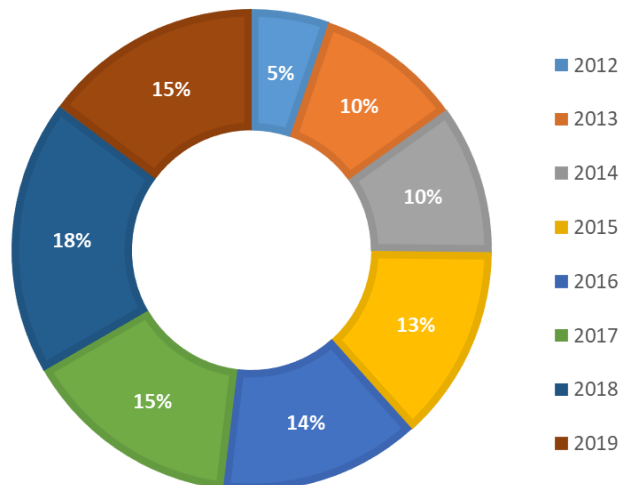
Gambar 3.5
Perkembangan Asset KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan
Tahun 2016-2019



Sumber Data: KSPPS BMT NU diolah dari laporan RAT

c. KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Gambar 3.6
Perkembangan Asset KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan
Tahun 2012-2019



Sumber Data: KSPS BMT UGT Sidogiri Cab. Pamekasan diolah dari laporan RAT

Peneliti mengkonversi data aset ke jumlah persen, sebab pemangku kebijakan di masing-masing lembaga keuangan mikro syariah tidak memberikan izin untuk melaporkan data aset lembaga dalam bentuk nominal atau jumlah.

2. Jumlah Anggota

a. Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

Tabel 3.1
Jumlah Anggota Primer Koperasi An-Nisa' IX Pamekasan
Tahun 2012-2018

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
2012	327
2013	367
2014	344
2015	293
2016	300
2017	305
2018	315
2019	345 (12 September 2019)

Sumber Data: Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

b. KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan

Tabel 3.2
Jumlah Anggota KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan
Tahun 2016-2019

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
2016	571
2017	1.572
2018	1,951
2019	2.318 (12 September 2019)

Sumber Data: KSPPS BMT NU Cabang Tlanakan Pamekasan

d. KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

Tabel 3.3
Jumlah Anggota KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan
Tahun 2012-2019

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
2012	3.781
2013	4.361

2014	4.461
2015	5.561
2016	6631
2017	7.737
2018	8.807
2019	9.976 (12 September 2019)

Sumber Data: KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan

BAGIAN EMPAT

KEUANGAN MIKRO ISLAM:

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT, RELASI DAN

INSTITUSIONAL

A. Relasi Nahdlatul ‘Ulama dan Pemberdayaan Ekonomi di Pulau Madura

Pulau Madura sering dikenal dengan basis Nahdlatul Ulama (NU)¹³⁶ oleh banyak kalangan, sebab rata-rata masyarakat Madura anggota dari Nahdlatul Ulama'.¹³⁷ Banyaknya anggota dan simpatisan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama' dapat memberikan ruang tersendiri bagi organisasi tersebut dalam memberdayakan para loyalisnya pada bidang perekonomian. Hal tersebut tergambar bahwa rata-rata dilihat pada laporan BPS (Badan Pusat Statistik) prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 2018, pulau Madura merupakan pulau penyumbang terbesar penduduk miskin. Diantaranya Kabupaten Bangkalan 19,59%, Kabupaten Sampang 21,21%, Kabupaten Pamekasan 14,47% dan Kabupaten Sumenep 20,16%.¹³⁸

Nahdlatul Ulama' memiliki pekerjaan rumah (PR) yang sangat besar untuk membantu pengentasan kemiskinan khususnya di pulau Madura. Kemiskinan masalah struktural, strategi pengentasan kemiskinanpun harus secara komprehensif, sistematis dan institusional. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro (*Micro Finance*) merupakan lembaga yang telah terbukti sangat efektif mengatasi

¹³⁶ Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (June 15, 2013): 1–32, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>.

¹³⁷ Periode setelah berdirinya NU pada tahun 1926, penurunan SI (Sarekat Islam) di Madura menandai era baru dalam sejarah orang Madura. Asosiasi SI (Sarekat Islam) dengan sikap-sikap modern dan reformasi tidak berhasil menarik orang Madura untuk terlibat dalam ranah politik. Menyusul penurunan SI, NU memainkan peran sentral dengan pengikut pedesaan. Orang-orang tertarik pada NU terutama karena orientasi non-politik organisasi pada awal berdirinya, sedangkan orientasi politik SI menyebabkan hilangnya pengikut. Seperti di Jawa, di Madura sebagian besar Nahdliyin (diciptakan untuk menyebut pengikut NU) memandang NU terutama sebagai organisasi keagamaan, dan bukan asosiasi politik. NU telah menjadi populer dan mengambil alih posisi SI pada akhir 1920-an, sebagai organisasi yang mampu menyebar ke daerah pedesaan. Refleksi kehidupan Muslim pedesaan di kepulauan berpusat di pesantren. Bagi banyak santri di Madura, menjadi seorang Muslim berarti menjadi simpatisan NU. Identifikasi yang kuat dengan NU ini tidak secara otomatis berarti bahwa mereka harus secara resmi menjadi anggota organisasi. Mereka dianggap terlahir sebagai Nahdliyin sejati yang akan menjaga prinsip-prinsip Islam *Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah* dan mematuhi instruksi para kiai.

¹³⁸ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html> (diakses pada Jum'at, 13 September 2019).

kemiskinan di semua Negara berkembang, juga termasuk di Indonesia. Contoh keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan lembaga keuangan mikro ini adalah apa yang telah dipelopori oleh seorang profesor dari Bangladesh bernama Muhammad Yunus dengan gerakan Grameen Bank.¹³⁹ Saat ini pola pemberdayaan kaum miskin model Grameen Bank telah diadopsi oleh lebih dari 130 negara di seluruh dunia.¹⁴⁰

Hemat Peneliti, Peneliti melihat masyarakat Madura telah mengalami pergeseran dalam sosiologi generasi, yang beralih dari dimensi konflik nilai sosial budaya ke dinamika ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan hubungan kekuasaan, dengan kaum millennial pada transformasi ini. Digambarkan sebagai generasi yang lahir antara awal 1980-an dan awal 2000-an, milenium ialah generasi yang paling terdidik, namun mereka dihadapkan pada sosial ekonomi yang paling sulit dan meningkatkan situasi ketimpangan generasi sepanjang masa. Ini diwujudkan melalui penurunan berkelanjutan dalam pekerjaan kaum muda, perumahan yang terjangkau, kesejahteraan sosial dan tunjangan, akses keuangan dan masih ada sebagian tingginya biaya pendidikan di institusi pendidikan tertentu. Ini menimbulkan situasi yang sangat menantang dengan tekanan pada kaum muda, meningkatnya ketegangan di antara generasi yang lebih tua dan kegelisahan tentang generasi yang akan datang.¹⁴¹

Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi milenium telah menjadi bagian integral yang tak terhindarkan dari rencana dan upaya pembangunan berkelanjutan secara global, dengan pengembangan kewirausahaan disarankan sebagai pintu gerbang penting. Argumen di balik ini adalah bahwa mempromosikan kewirausahaan kaum muda tidak hanya akan memfasilitasi pertumbuhan pasar yang inklusif, menghasilkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan,¹⁴² itu akan juga memprovokasi inovasi yang

¹³⁹ Katharine Esty, "Lessons from Muhammad Yunus and the Grameen Bank: Leading Long-Term Organizational Change Successfully," in *Leading and Managing in the Social Sector: Strategies for Advancing Human Dignity and Social Justice*, ed. S. Aqeel Tirmizi and John D. Vogelsang, Management for Professionals (Cham: Springer International Publishing, 2017), 31–39, https://doi.org/10.1007/978-3-319-47045-0_3.

¹⁴⁰ Samuel O. Idowu et al., eds., "Lending for Poverty Eradication, Professor Muhammad Yunus," in *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013), 1585–1585, https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100988.

¹⁴¹ Howe, N. and Strauss, W. "*Millennials Rising: The Next Great Generation*". (New York: Vintage Books, 2000), 234.

¹⁴² World Bank. "*Nigeria: Poverty in the Midst of Plenty: The Challenge of Growth with Inclusion: A World Bank Poverty Assessment*". World Bank, Washington, DC, 1996), 97. Bisa dilihat juga dalam jurnal Emmanuel O. Okon, "MSMEs Performance in Nigeria: A Review of Supply Chain Collaboration Challenges," *International Journal of Marketing Research Innovation* 2, no. 1 (January 20, 2018): 16–30, <https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijmri/article/view/103>.

mengganggu untuk pertumbuhan ekonomi yang efektif dan kemakmuran.¹⁴³ Tidak perlu dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan muda yang mendorong inovasi yang mengganggu, dan strategi investasi menarik yang menargetkan kebutuhan lokal, merupakan hal mendasar untuk pembangunan berkelanjutan.¹⁴⁴

Problematika Nahdlatul Ulama' sementara ini masih juga sering dipandang sebagai organisasi yang stagnan (*jumud*), tidak terlalu mampu merespon terhadap berbagai perubahan masa kini dan tidak terlalu mempunyai kemampuan untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas sufistik dalam ajaran Nahdlatul Ulama', dimana memperlihatkan pengabaian mereka terhadap kehidupan duniawi serta sebaliknya hannya berorientasi kepada kebahagiaan di akhirat.¹⁴⁵ Dengan realitas keagamaan semacam itu, kemudian Nahdlatul Ulama' dikenal sebagai kelompok masyarakat yang pasif terhadap tantangan dinamis modernisasi, dan komunitas dimana para tokoh agamanya memegang secara ketat tradisi yang mati.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama' memiliki kendala yang lebih banyak disebabkan rata-rata masyarakat Nahdlatul Ulama' berada dalam garis angka kemiskinan dan terbelakang, terutama di desa-desa dan pelosok-pelosok negeri ini memiliki aksesibilitas rendah.¹⁴⁶ Problem tersebut pernah disampaikan oleh KH. Mahfudz Shiddiq¹⁴⁷ pada acara kursus pengurus Nahdlatul Ulama' cabang Gresik 08 Muharrom 1358 H:

"Nahdlatul Ulama' sudah bertindak tiga belas tahun lamanya. Sepanjang pendapatannya para pengemudinya bahwa kelambatan atau terhentinya

¹⁴³ Christensen, Clayton M., Efosa Ojomo, and Derek van Bever. "Africa's New Generation of Innovators". *Harvard Business Review* 95, no. 1 (January-February 2017): 129-136.

¹⁴⁴ Ikedinachi K. Ogamba, "Millennials Empowerment: Youth Entrepreneurship for Sustainable Development," *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-05-2018-0048>.

¹⁴⁵ Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Fealy, Greg, Barton, Greg (ed.), *"Tradisional Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama' Negara"*. (Yogyakarta: LKiS, 1997), 7.

¹⁴⁶ Hal ini pernah diungkapkan oleh Khofifah Indar Parawansa ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU di rapat pimpinan Muslimat NU <https://www.suara.com/news/2017/03/26/183134/khofifah-sebut-nahdliyin-banyak-yang-miskin-dan-terbelakang> (diakses pada Sabtu, 14 September 2019). Pada tahun 2012 Nusrin Wahid sebagai Ketua Umum GP Ansor menyampaikan bahwa dari angka kemiskinan 29 juta ketika itu, 18,5 juta rata-rata merupakan masyarakat Nahdliyin <https://nasional.tempo.co/read/417437/rata-rata-orang-miskin-indonesia-warga-nu> (diakses pada Sabtu, 14 September 2019).

¹⁴⁷ Putra dari KH. Muhammad Siddiq Jember, kakak kandung dari KH. Ahmad Siddiq (Rois 'Aam PBNU 1984-1991) serta paman dari KH. Hamid Pasuruan. KH. Mahfudz Siddiq juga mantan ketua tanfidziyah PBNU termuda yang terpilih dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama' di Malang pada tahun 1937 M mendampingi KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rois 'Aam ketika itu.

(tidak berhasilnya) beberapa banjak oesahanja sehingga perdjalanana NO menoedjoe ke pokok toedjoeannja mendjadi terhalangi atau terhambat adalah karena NO menghadapi rintangan jang maha heibat, jaitoe kemiskinnja oemmat Islam!! perdjalanana NO menoedjoe ke pokok toedjoeannja, tersentuh (kesrimpat=jv) oleh kemiskinnja oemmat Islam."¹⁴⁸

Seiring berjalannya waktu Nahdlatul Ulama' terus berbenah dalam hal memberdayakan masyarakat kecil demi menghapuskan disparitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ialah salah satu bentuk solusi yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama', dengan berkerja sama dengan berbagai institusi keuangan ataupun pesantren, Nahdlatul Ulama' mampu memberikan sumbangsih terhadap pengurangan angka kemiskinan di pulau Madura. Seperti yang dilakukan oleh BMT Sidogiri, BMT NU dan Koperasi An-Nisa' Muslimat NU berlomba-lomba memberdayakan kaum miskin sekitar dengan visi misi besar menciptakan kemaslahatan bersama berasaskan Syariat Islam.¹⁴⁹ Dari tiga lembaga keuangan mikro syariah tersebut, didirikan oleh tokoh-tokoh terbaik Nahdlatul Ulama' sebagai jawaban tantangan zaman ke depan. Dengan begitu sesuai dengan harapan bisnis yang pernah disampaikan oleh KH. Mahfudz Shiddiq agar bisa mengatur bisnis sesuai aturan Islam. KH. Mahfudz Shiddiq menyampaikan:

"Oleh kemiskinnja oemmat Islam, dan oleh sebab terlepasnja oeroesan2 jang berkenaan dengan masjarakat ramai, misalnja hal perdagangan dan segala sesoeatoe jang bersangkoetan dengan perdagangan (sewa menjewa dllnja) jang mana oeroesan2 itoe djatoeh didalam tangannja lain golongan, maka sesoeatoe peratoerannja, sjarath roekoennja dllnja, tentoe diatoer menoeroet sebagaimana mereka soeka dan mereka pandang baik, sedang kita orang Islam, oleh sebab tidak mempoenjai apa-apa jang menjebakkan kita toeroet mengatoernja, terpaksa menoeroet tjara dan djalannja para pedagang2 itoe, walapoen tiada koerang2 jang menjalahi, atau bertentangan atau ditentang oleh Islam, misalnja

¹⁴⁸ Berita Nahdlatul Ulama, 15 Februari 1939, 171.

¹⁴⁹ Bisnis berasaskan Islam memang sudah menjadi para Masyaikh Nahdlatul Ulama' sejak lama, diharapkan usaha yang berlandaskan nilai-nilai keIslaman dapat menjadi berkah dan kesuksesan pada masa mendatang. Dalam mengatasi kemiskinan, solusi yang ditawarkan oleh HBNO (Hoofd Bestuur Nahdlatul Ulama) atau sekarang dikenal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi di dalam menjalankan bisnis bagi warga Nahdlatul Ulama' yang terpenting adalah pemenuhan syariat di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Mahfud Shiddiq:

"Tegeslah soedah bahwa perhatian NO terhadap pada ekonomie, boekanlah berarti NO soedah beroebah sifatnja, dari perhimpoean keigamaan, mendjadi perhimpoean dagang, tidak sekali-kali, hanjasenja perhatiannja NO terhadap soal ekonomie itoe, sekedar oentoek bisa melangkah kepada pokok toedjoeannja jang pertama kali, jaitoe berkembangnja dan berlakoenja Sjara' Islam (djam'ijatoen dienijjatoen machdlah."

riba, speculacie makanan (djoel beli barang makanan sebeloem gabadl) dllnja tjara dagang zaman sekarang."¹⁵⁰

Peneliti mewawancarai beberapa nasabah dari ketiga lembaga tersebut untuk benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang dampak yang telah diberikan oleh ketiga lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) tersebut bagi pengentasan kemiskinan serta perkembangan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bapak Mahdi pedagang kebutuhan keluarga ketika diwawancara mengenai perkembangan usaha mengatakan:

*"ghuleh ghi reh sa areh a lakoh jegeh ben mukkak toko nikah nak, ghi...deng sakadheng rammeh, kadheng seppéh. Mun penghaselan pasteh ongghé toron, jek ringan nyamanah oreng usaha pasteh bedéh ontong roghinah. Penghaselan sesegghut mun sabulen sekitar 4-5 jutah nak bersenah, mun bik kotorrah bisah 6 jutah. Genikoh sesering ghuleh ka olle ghebey biaya odik keluarga anak ben binih, sakadheng lebhhi ben sakadheng korang. Alhamdulillah ghik e parengih sehat nyareh rejekkeh ben pangeran, e parengih kuat a biayayaeh nak kanak a sakolah. Ben cek sakalangkongah dek ka BMT Sidogiri a berrik enjheman modal 5 jutah ka ghuleh gebey be tambe modal. Mun sebelum nginjem bik salastarenah nginjem bek bedéh perbedaan delem penghaselan toko. Se sebelummah nginjem penghaselan sekitar 3,5-4,2 jutah, pas salastarenah nginjem be tambe reng bhereng se a kabhutoh pelanggan penghaselan bisah 4-5 jutah sabulen nak. Mun majer kawejiben ka BMT Alhamdulillah e parengih lancer, deng sakadeng bek melarat polanah kadheng toko seppéh. Ontongah pihak BMT a berrik solusi ben keringanan a kadhiyéh perpanjangan tempo bektoh pembayaran ben bimbingan usaha makle lancar. Kemlaratan se ghuleh alamih mun pengusaha kenek engak ghuleh a kadhiyéh penghaselan tak tercatat rapi, tak taoh ngangguy hp lid dullid engak samangken ghebey a berrik oning produk baru dek ka pelanggan-pelanggan."*¹⁵¹

(saya sehari-hari bekerja buka usaha toko nak, terkadang rame dengan pembeli terkadang pula sepi dari pembeli. Keuntungan bisa dipastikan naik turun, kebiasaan orang berbisnis pasti ada untung dan rugi yang didapatkan. Rata-rata keuntungan bersih yang didapatkan sekitar 4-5 juta, bila dengan keuntungan kotornya bisa 6 juta. Keuntungan tersebut dijadikan sebagai biaya penghidupan keluarga, terkadang lebih dan terkadang kurang. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan dalam mencari rezeki buat biaya anak-anak sekolah. Saya juga ucapkan kepada BMT Sidogiri yang telah memberikan pinjaman tambahan modal kepada saya sebesar 5 juta rupiah. Pinjaman yang diberikan memberikan dampak baik bagi pendapatan usaha saya, yang sebelumnya hanya sekitar 3,5 juta-4,2 juta saja, setelah mendapatkan pinjaman dikelola dan dibelikan produk toko yang lebih variatif sesuai kebutuhan para pelanggan, pendapatan saya bisa sering mencapai 4-5 juta dalam satu bulan nak. Terkait hal

¹⁵⁰ Berita Nahdlatol Oelama, 15 Februari 1939, 172.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mahdi salah satu anggota BMT Sidogiri di tempat usahanya pada 06 Agustus 2019.

pembayaran kewajiban saya ke BMT sering lancar memenuhi kewajiban, walau terkadang di saat toko sepi saya agak sulit memenuhi pembayaran kewajiban pinjaman. Akan tetapi untungnya pihak BMT memberikan solusi keringanan seperti memperpanjang waktu pembayaran dan bimbingan usaha dalam memperlancar usaha. Kesulitan yang sering saya hadapi sebagai pengusaha kecil pada pembukuan atau manajemen toko dan tidak faham hp layar sentuh sebagai sarana untuk memasarkan produk baru kepada para pelanggan).

Hasil wawancara di atas salah satu fenomena yang penulis temui di lapangan, akan tetapi masih banyak problem masyarakat kecil lain, baik di pedesaan maupun di pesisir pantai mengeluhkan permasalahan usaha mereka. Melalui pengamatan dan wawancara serta penyebaran angket oleh penulis, penulis menemukan bahwa anggota BMT didominasi oleh kaum perempuan. Penemuan ini menyimpulkan kaum perempuan di Madura sudah banyak sadar untuk menggunakan akses keuangan mikro dalam memperbaiki taraf hidup. Kemiskinan meningkatkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sementara pembangunan ekonomi mempersempit kesenjangan melalui kegiatan promosi gender. Salah satu cara efektif untuk memerangi kemiskinan terutama di pedesaan daerah adalah mendorong kewirausahaan terutama di kalangan perempuan. Schumpeter menunjukkan bahwa penciptaan bisnis baru adalah pendorong penting ekonomi.¹⁵² Kewirausahaan bertindak sebagai mekanisme untuk pembangunan sosial-ekonomi,¹⁵³ pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.¹⁵⁴ Generasi lapangan kerja bagi orang-orang di daerah pedesaan melalui kewirausahaan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Konsep baru yang dikembangkan oleh London dan Hart bernama *Base of Pyramid (BoP)*¹⁵⁵ 2.0 berbicara tentang menciptakan peluang bagi orang-orang yang berada di dasar piramida dan menghasilkan US \$ 2 per hari. Konsep baru ini berbicara tentang bagaimana melibatkan orang-orang yang berada di dasar piramida dalam pembangunan sosial-ekonomi negara menghasilkan peluang kewirausahaan.¹⁵⁶

¹⁵² Schumpeter, J.A. “*The Theory of Economic Development.*” (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 169.

¹⁵³ David Audretsch, “Entrepreneurship Research,” *Management Decision* 50, no. No. 5 (May 25, 2012): 755–764, <https://doi.org/10.1108/00251741211227384>.

¹⁵⁴ James Austin, Howard Stevenson, and Jane Wei-Skillern, “Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?,” *Entrepreneurship Theory and Practice* 30, no. 1 (January 1, 2006): 1–22, <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x>. bisa dilihat juga dalam Miguel-Ángel Galindo and María-Teresa Méndez-Picazo, “Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth,” *Management Decision* 51, no. No. 3 (March 22, 2013): 501–14, <https://doi.org/10.1108/00251741311309625>.

¹⁵⁵ London, T. and Hart, S. “*Next Generation Business Strategies for the Base of the Pyramid: New Approaches for Building Mutual Value.*” (Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ, 2011), 176.

¹⁵⁶ Jeremy Hall et al., “Entrepreneurship and Innovation at the Base of the Pyramid: A Recipe for Inclusive Growth or Social Exclusion?,” *Journal of Management Studies* 49, no. 4 (2012): 785–812, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01044.x>.

Perempuan daerah pesisir Madura terutama di sekitar daerah Kabupaten Pamekasan memiliki jiwa entrepreneurship tinggi, hal ini dibuktikan dengan penemuan peneliti di lapangan, para kaum perempuan mengolah hasil laut dengan berbagai ragam bentuk masakan. Hasil tangkapan dari laut oleh para kaum ibu sebagian dikirim ke pasar dan sebagian lain diolah sendiri untuk dijadikan beragam produk masakan yang bernilai ekonomis. Sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan.

Bu Zubaidah salah satu anggota BMT NU mengatakan:

“engkok nyoba usaha reyah polanah terro a bentowah tang lakeh, tang lakeh se ka tasek majeng engkok begien se a juel ben aola dek remmah sakeranah hasel majeng reyah tak ghun e juel mattanah ka pasar, tapeh bisah e yola cem macem produk se bisah ma olle pesse. Tapeh yeh mun argeh deng sakadeng ongghe toron, apah caknah can se bedeh e tasek. Soallah reng majeng kadheng olle otabeh tak olle, sakadheng olle sakunik polanah angin santak ben ombek rajah. Mun la perpaknah angina ben ombek rajah, biasanah argeh bek larang, polanah melarat se olleyah banyak. Bek abe'en la syokkor deri asellah a usaha engak reyah tekka'ah beu amis ben areh ghik bisah olleh pesse se cokop. Ollenah kabbhi mun bersenah paleng 9 jutah sabulen, mun kotorrah e potong solar ben se laen paleng 12 jutah. Produk se bik engkok e yola deri jhukok bek banyak kiyah engak nang ghinang, pettes, krupuk, jhukok krispi ben en laenah. Masalah e delem usaha reyah se engkok rassa aghi e pembukuan penghaselan se engkok a juel, deddih delem sa bulen otabeh sataon segghut tak e temmuh, sepeuting bisah ngakan ben bisah masakolah anak mun engkok cong. Mun enjeman ka BMT engkok palengan nginjem mun la se e kabilliyeh solar ben se ka ghebeyeh modal juelen. Pernah nginjem 4,5 jutah ka BMT NU, mareh jiyeh bik engkok dhulih e serraeh perpaknah deghengan bek rammih mak dhulih lonas pas tak ker pekkeran ka kewejbhen. Alhamdulillah enjeman se deri BMT NU bisah a bhentoh ka engkok ben keluarga ben bisah nambenh ka tang penghaselan.”¹⁵⁷

(saya mencoba usaha ini sebab ingin membantu suami, suami yang melaut sedangkan saya bagian yang menjual hasil tangkapan laut suami dan dikelola bagaimana sekiranya hasil tangkapan laut tidak hanya dijual mentahnya saja, tapi bisa dibuat berbagai macam produk makanan bernilai ekonomis. Berkenaan dengan harga pasti fluktuatif, terserah bagaimana keadaan yang di laut. Nelayan pulang bisa membawa hasil tangkapan, bisa juga tidak, terkadang hasilnya sangat sedikit dikarenakan angin kencang atau ombak besar. Biasanya bila kondisi seperti tersebut, harga hasil tangkapan agak mahal. Saya sudah cukup bersyukur dari hasil tangkapan laut walau setiap hari saya berbau amis masih bisa mendapatkan uang. Keuntungan bersih yang didapatkan mungkin 9 juta dalam satu bulan, keuntungan kotor seperti solar, peralatan dan perlengkapan yang lain mungkin 12 juta. Produk yang dibuat oleh saya dari bahan ikan agak banyak seperti rengginang, petis, krupuk, ikan krispi dll. Permasalahan yang saya rasakan memang seperti penghasilan dalam satu bulan tidak terbukukan dengan baik, jadi

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Zubaidah salah satu anggota BMT NU di tempat usahanya pada 09 Agustus 2019.

kalau ditanya bagaimana penghasilan pasti dalam satu bulan atau bahkan satu tahun saya tidak tau. Yang terpenting buat saya adalah bisa buat makan dan menyekolahkan anak-anak dengan baik nak. Kalau pinjaman ke BMT saya meminjam ketika butuh solar dan modal jualan. Pernah meminjam uang ke BMT NU sebesar 4,5 juta, tapi segera saya lunasi ketika dagangan laris manis, agar supaya tidak terlalu banyak memikirkan hutang. Alhamdulillah pinjaman yang diberikan BMT bisa sedikit membantu saya dan keluarga serta memberikan efek positif terhadap keuntungan yang saya dapatkan)

Perempuan yang diberdayakan secara baik akan menjadi pendorong pembangunan ekonomi negeri. Ekonomi tumbuh lebih cepat dan kemiskinan berkurang jika ada keseimbangan antara pria dan wanita. Sejumlah besar perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh perempuan dalam 20 tahun terakhir telah menarik perhatian minat para cendekiawan dan praktisi di seluruh dunia.¹⁵⁸ Lortie beserta kawan-kawan berpendapat bahwa gender secara positif mempengaruhi kinerja sosial suatu organisasi.¹⁵⁹ Penelitian telah menunjukkan bahwa meningkatkan tingkat pekerjaan perempuan-ke-laki dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 34 persen dalam beberapa negara, dan produktivitas dapat meningkat sebanyak 25 persen sesuai dengan laporan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Industrial Development Organization*). Ini karena ketika perempuan mulai berpenghasilan, mereka membelanjakan lebih banyak untuk pendidikan anak-anak dan kesejahteraan mereka.¹⁶⁰ Mereka menciptakan modal manusia dan menciptakan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sesuai laporan UNIDO, pada tahun 2020, 870 juta wanita memasuki arus utama ekonomi untuk pertama kalinya sebagai konsumen, produsen, karyawan, atau pengusaha. Dampak ekonomi ini pada proses pembangunan sangat signifikan. Duflo telah menemukan hubungan dua arah antara pemberdayaan dan pembangunan ekonomi.¹⁶¹ Pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi dapat dirangsang oleh kewirausahaan.

Pemberdayaan merupakan multidimensi seperti, pengambilan keputusan ekonomi tidak selalu menyiratkan bahwa perempuan dapat memutuskan kontrol kelahiran dan berkontribusi pada keputusan non-keuangan. Ini membuat inisiatif

¹⁵⁸ Michela Mari, Sara Poggesi, and Luisa De Vita, "Family Embeddedness and Business Performance: Evidences from Women-Owned Firms," *Management Decision* 54, no. No. 2 (March 21, 2016): 467–500, <https://doi.org/10.1108/MD-07-2014-0453>.

¹⁵⁹ Jason Lortie, Gary J. Castrogiovanni, and Kevin C. Cox, "Gender, Social Salience, and Social Performance: How Women Pursue and Perform in Social Ventures," *Entrepreneurship & Regional Development* 29, no. 1–2 (January 1, 2017): 155–73, <https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1255433>.

¹⁶⁰ Matthias Doepke and Michèle Tertilt, "Does Female Empowerment Promote Economic Development?," *Journal of Economic Growth*, August 20, 2019, <https://doi.org/10.1007/s10887-019-09172-4>.

¹⁶¹ Esther Duflo, "Women Empowerment and Economic Development," *Journal of Economic Literature* 50, no. 4 (2012): 1051–79, <http://dx.doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>.

pembangunan alternatif, seperti kuota politik, penciptaan kesadaran, dan hak kepemilikan, intervensi penting untuk memberdayakan perempuan.¹⁶² Faktor-faktor seperti kerangka hukum dan peraturan serta norma dan budaya sosial juga memiliki dampak signifikan pada proses pemberdayaan.¹⁶³ Peneliti melihat faktor-faktor yang mengarah kepada pemberdayaan anggota BMT Sidogiri, BMT NU dan Koperasi An-Nisa' seperti temuan Swain dan Wallentin menyatakan bahwa faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang paling signifikan untuk pemberdayaan perempuan.¹⁶⁴ Otonomi anggota dalam pengambilan keputusan dan sikap sosial adalah faktor-faktor lain yang berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan anggota masing-masing BMT, terutama pada kaum perempuan.

Anggota yang ikut berpartisipasi dalam mengakses mikro keuangan syariah seperti BMT-BMT di pulau Madura menunjukkan tingginya tingkat kesadaran berekonomi dan berinovasi pada era industri 4.0 saat ini. Demi keberlangsungan eksistensi kesejahteraan keluarga yang mereka bangun, para anggota BMT dibantu oleh pengurus BMT, didorong menemukan atau membangun sebuah jaringan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, dan mobilitas yang lebih besar. Browning dan Chiappori mengemukakan bahwa tekanan sosial juga dapat mengubah kekuatan seseorang dalam pengambilan keputusan rumah tangga.¹⁶⁵ Dimasukkannya juga pengurus BMT ikut serta dalam mendorong anggota perempuan untuk berpartisipasi pada masyarakat, sehingga membuat mereka lebih aktif dalam sistem demokrasi.¹⁶⁶

Nahdlatul Ulama' sangat mendorong kepada usaha keuangan mikro (UKM) agar bisa menyediakan akses keuangan yang terjangkau bagi masyarakat kecil, utamanya para masyarakat pedesaan, pinggiran, pesisir pantai dan pelosok-pelosok daerah tanpa melihat keagamaan para anggota atau mitra usaha. Berdasarkan kitab *I'anatu al-Tthalibin*, Nahdlatul Ulama' berpendapat bahwa umat Islam dibolehkan untuk melakukan kontak bisnis dengan orang non Muslim. Bisnis sewa menyewa dengan orang non Muslim diperbolehkan

¹⁶² Armendáriz, B. and Morduch, J. "*The Economics of Microfinance*". (Cambridge: MIT Press, 2010), 357. Bisa dilihat juga dalam Naila Kabeer, "Is Microfinance a 'Magic Bullet' for Women's Empowerment? Analysis of Findings from South Asia," *Economic and Political Weekly* 40, no. 44/45 (2005): 4709–18, <https://www.jstor.org/stable/4417357>.

¹⁶³ Hanny Cueva Beteta, "What Is Missing in Measures of Women's Empowerment?," *Journal of Human Development* 7, no. 2 (July 1, 2006): 221–41, <https://doi.org/10.1080/14649880600768553>.

¹⁶⁴ Swain, R.B. and Wallentin, F.Y. "Economic or non-economic factors – what empowers women?," *International Review of Applied Economics*, Vol. 26 No. 4 (2012), pp. 425–444. <http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:126994/FULLTEXT01.pdf>

¹⁶⁵ M. Browning and P. A. Chiappori, "Efficient Intra-Household Allocations: A General Characterization and Empirical Tests," *Econometrica* 66, no. 6 (1998): 1241–78, <https://doi.org/10.2307/2999616>.

¹⁶⁶ Kalpana Bardhan and Stephan Klasen, "UNDP's Gender-Related Indices: A Critical Review," *World Development* 27, no. 6 (June 1, 1999): 985–1010, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00035-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00035-2).

meskipun barang sewaan tersebut dimanfaatkan untuk ritual ibadah si penyewa.¹⁶⁷

Usaha yang dibangun oleh para pemangku kebijakan di Nahdlatul Ulama' dalam memberdayakan masyarakat kecil dominannya berada pada garis kemiskinan, diwujudkan dengan membentuk lembaga-lembaga filantropi seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) bertugas menghimpun, mengelola dan *mentasharufkan* zakat dan shadaqah kepada *mustahiqnya*, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama' (LPNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama' di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama', Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama' (LPPNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama' di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama' di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama' (LAKPESDAM NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama' di bidang pengkajian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama' (LKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama' di bidang kesehatan. Lembaga yang dibangun tersebut berasal dari semangat juang Nahdlatul Ulama' memperhatikan kesejahteraan para warga, utamanya warga Nahdlatul Ulama'.¹⁶⁸ Sebagaimana maklumat no. 7 yang pernah ditandatangani Rais Akbar PBNU ketika itu *Hadratus Syeikh* KH. Hasyim Asy'ari:

“...Maka, saudara2koe! bertolong menolonglah kamoe dengan mengendarai poenggoeng ketabahan atas memikoel taklif (titah) nja hidoep bersama (*masjrakat-gemeenschap*), dan sekali2 djanganlah saudara2 mendjadi tjonto kemalasan pada diri saudara...kerana bahwasenja orang jang beroesaha oentoek goenanja orang djanda, dan orang miskin sadja, soedah seperti djihad (*berperang*) sabiloellah dan seperti orang beribadah semalam tidak berhenti2 dan seperti orang berpoeasa tidak berboeka2...”¹⁶⁹

Maklumat PBNU di atas memberikan gambaran bahwa memberdayakan masyarakat kecil seperti *jihad fi sabilillah* (berperang di jalan Allah SWT), menolong antar sesama dalam kebaikan adalah kewajiban yang sudah diperintah oleh Allah SWT dalam firmanNya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ (المائدة: ٢)

¹⁶⁷ LTN NU JATIM. “*Ahkamu al-Fuqaha fi Muqararati Mu'tamirati Nahdlatul Ulama'*.” (Surabaya: Diantama, 2004), 131.

¹⁶⁸ Kholid Mawardi, “NU Dan Problem Kemiskinan (Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial),” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.380>.

¹⁶⁹ Berita Nahdlatul 'Oelama, No. 7, 01 Pebruari 1937, 3.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (*Al-Maidah: 2*)

BMT hadir baik dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di pulau dituntut bisa membantu mengentaskan kemiskinan serta pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Salah satu konsep yang diusung oleh BMT ialah *empowerment* (pemberdayaan)¹⁷⁰, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan, pesisir serta pelosok-pelosok daerah. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat menjadi subyek dari *agent of change* (agen perubahan), maka dengan itu diperlukan pendekatan dan pembinaan dari pihak BMT. Menurut Khusniati Rofi’ah, BMT dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM dengan *Authority, Confidence and competence, Truth, Opportunity, Responsibility dan Support* (ACTORS):¹⁷¹

1. *Authority* (wewenang)

Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka. Masyarakat miskin diberikan sebuah kepercayaan bahwa hidup harus berubah ke arah yang lebih baik.

2. *Confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan diri)

Pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.

3. *Truth* (keyakinan)

Memberikan keyakinan kepada masyarakat atau seseorang harus selalu yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.

4. *Opportunity* (kesempatan)

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

5. *Responsibility* (tanggung jawab)

Perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan. Salah satu bentuk tanggungjawab adalah dengan senantiasa menjaga kepercayaan dengan BMT.

6. *Support* (dukungan)

Adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.

¹⁷⁰ Stefanie Chambers, “Minority Empowerment and Environmental Justice,” *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28–54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.

¹⁷¹ Khusniati Rofiah, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo,” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (December 1, 2010): 1–22–22, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.755>.

Pada era industri 4.0 saat ini, dirasa perlu BMT sendiri serta anggotanya dapat mengembangkan inovasi yang lebih canggih, sebab masyarakat semakin maju peradabannya semakin maju pula perangkat penunjangnya,¹⁷² era dunia berbasis teknologi dalam segala bidang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Ini merupakan perkembangan inovasi bagi perkembangan dunia usaha. Inovasi memainkan peran sentral dalam proses pertumbuhan ekonomi dan pengusaha adalah kendaraan untuk memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan aktivitas perusahaan dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.¹⁷³ Dengan diperkenalkannya inovasi yang lebih canggih, manfaat dari inovasi ini dipertimbangkan serta efek negatifnya terhadap masyarakat, pada pekerjaan dan pada perilaku manusia. Dari sudut pandang ekonomi, para ekonom telah menggunakan istilah yang berbeda ketika mereka berbicara tentang inovasi. Secara tradisional, inovasi telah dimasukkan dalam modal konsep akumulasi. Ketika para ekonom klasik berbicara tentang perilaku pasar dan kemajuan mekanis, mereka memasukkan inovasi.¹⁷⁴ Mereka menunjukkan relevansi besar inovasi sebagai elemen penting dari kemajuan ekonomi. Sebagai contoh, Adam Smith menyatakan bahwa pembagian kerja adalah salah satu elemen kunci dari kekayaan bangsa, elemen yang dapat didorong melalui pasar yang lebih luas. Satu jalan bagi perusahaan untuk meningkatkan pasar untuk produk mereka adalah untuk memperkenalkan inovasi dalam proses produktif untuk menghasilkan produk yang lebih kompetitif. Penting juga untuk memasukkan variabel lain dalam proses ini: iklim sosial dan peran lembaga.¹⁷⁵

Iklim sosial Dalam konteks bisnis tradisional, lembaga dianggap telah berhasil hanya jika secara finansial memuaskan semua pemangku kepentingannya¹⁷⁶ dalam jangka panjang dan atau jika keunggulan kompetitifnya

¹⁷² Fisit Suharti, "Sinergitas Islamic Microfinance Institution (IMFI): Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 31, 2018): 52–80, <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1626>.

¹⁷³ Galindo and Méndez-Picazo, "Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth." *Management Decision* 51, No. 3 (September 22, 2013), <https://doi.org/10.1108/00251741311309625>.

¹⁷⁴ Kevin Chen, "Financial Innovation and Technology Firms: A Smart New World with Machines," in *Banking and Finance Issues in Emerging Markets*, vol. 25, 0 vols., International Symposia in Economic Theory and Econometrics 25 (Emerald Publishing Limited, 2018), 279–92, <https://doi.org/10.1108/S1571-038620180000025012>.

¹⁷⁵ Md Mahfuz Ashraf et al., "Social Business as an Entrepreneurship Model in Emerging Economy," *Management Decision* 57, No. 5 (May 13, 2019), <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0343>.

¹⁷⁶ Geoffrey Heal, "Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework," *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice* 30, no. 3 (July 1, 2005): 387–409, <https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510037>.

di pasar membaik.¹⁷⁷ Sebaliknya, bisnis sosial dianggap telah berhasil hanya ketika secara berkelanjutan memuaskan semua pemangku kepentingannya dengan memecahkan masalah sosial yang ditargetkan dalam jangka panjang.¹⁷⁸ Bisnis sosial adalah model bisnis yang memaksimalkan keuntungan berbasis kewirausahaan yang terutama berfokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan.¹⁷⁹

Dari berbagai macam usaha, disarankan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat miskin, penting untuk memiliki kewirausahaan kolaboratif di tingkat masyarakat.¹⁸⁰ Sejalan dengan ini, lembaga yang bertanggung jawab secara sosial saat ini lebih tertarik memanfaatkan keterampilan mereka untuk meminimalkan masalah sosial menggunakan keahlian bisnis mereka dengan cara-cara yang sama seperti yang dilakukan bisnis sosial secara berkelanjutan.¹⁸¹ Dalam hal ini, bisnis sosial mengadaptasi prinsip-prinsip bisnis dengan cara yang dapat membantu lembaga keuangan untuk menggunakan solusi berbasis pasar untuk mengatasi masalah sosial tertentu yang disebabkan oleh kemiskinan.¹⁸²

Permasalahan utama yang sering terjadi di pedesaan dan pesisir pulau Madura sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Problematika dan Solusi yang Diharapkan

PROBLEMATIKA SAAT INI	SOLUSI YANG DIHARAPKAN
1. Lemahnya kesadaran berwirausaha 2. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi	1. Bentuk usaha yang berorientasi pasar 2. Peningkatan penguasaan teknologi yang bisa menciptakan inovasi terbaru

¹⁷⁷ Lee Burke and Jeanne M. Logsdon, "How Corporate Social Responsibility Pays Off," *Long Range Planning* 29, no. 4 (August 1, 1996): 495–502, [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)00041-6](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00041-6).

¹⁷⁸ Villis, U., Strack, R., Bruysten, S. and Yunus, M. "*The Power of Social Business: Lessons from Corporate Engagements with Grameen*", 2013. http://socialbusinesspedia.com/CaseStudy_Report_PDF/BCG_Report_2013.pdf (diakses pada Kamis, 16 September 2019).

¹⁷⁹ Beckmann, M., Zeyen, A. and Krzeminska, A. "Mission, finance, and innovation: the similarities and differences between social entrepreneurship and social business" *BT-social business: theory, practice, and critical perspectives*, in Grove, A. and Berg, G.A. Springer, Berlin and Heidelberg, (2014), 23-41, doi: 10.1007/978-3-642-45275-8_2.

¹⁸⁰ Changhwan Shin, "A Conceptual Approach to the Relationships between the Social Economy, Social Welfare, and Social Innovation," *Journal of Science and Technology Policy Management* 7, no. No. 2 (July 4, 2016): 154–72, <https://doi.org/10.1108/JSTPM-08-2015-0027>.

¹⁸¹ Villis, U., Strack, R., Bruysten, S. and Yunus, M. "*The Power of Social Business: Lessons from Corporate Engagements with Grameen*", 2013. http://socialbusinesspedia.com/CaseStudy_Report_PDF/BCG_Report_2013.pdf (diakses pada Kamis, 16 September 2019).

¹⁸² Yunus, M., Dalsace, F., Menasce, D. and Faivre-Tavignot, B. "Reaching the Rich World's Poorest consumers", *Harvard Business Review*, Vol. 3 No. 1, (2015), 46-53, <https://hbr.org/2015/03/reaching-the-rich-worlds-poorest-consumers>.

3. Rendahnya sumber daya manusia	3. Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas
4. Kurangnya informasi dan pangsa pasar	4. Peningkatan sistem informasi dan perluasan pangsa pasar
5. Keterbatasan modal usaha dan modal kerja	5. Penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha
6. Tidak memiliki sistem manajemen dan budaya organisasi yang baik	6. Hadirnya organisasi dan manajemen yang profesional
7. Lebih bangga menggunakan bahan impor	7. Menanamkan cinta produk nasional
8. Kurangnya efek <i>political will</i> dari pemerintah	8. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pedesaan dan pesisir
9. Belum maksimalnya lembaga ekonomi pedesaan	9. Tersedianya lembaga perekonomian berbasis desa yang memadai

Melihat problematika di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil pulau Madura harus benar-benar memberikan dampak peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata. Maka dengan itu, pemberdayaan ekonomi umat bisa dilihat dari 3 (tiga) aspek:¹⁸³

1. Menciptakan kondisi dan iklim usaha yang dapat mengembangkan potensi masyarakat.
2. Memperkuat potensi ekonomi masyarakat melalui peningkatan taraf kehidupan, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan baru.
3. Mencegah eksploitasi dan monopoli perekonomian yang menyebabkan ketidakstabilan persaingan usaha.

Gambaran tiga aspek tersebut harus selalu diupayakan, agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional. Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional akan mewujudkan terciptanya kesejahteraan secara merata, adil, seimbang.¹⁸⁴ Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi umat pada umumnya memiliki tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Seperti besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan keberlangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun

¹⁸³ Mubyarto. “*Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*.” (Yogyakarta: Adtya Media, 1997), 37-38.

¹⁸⁴ Anggito Abimanyu. “*Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat*.” (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000), 74.

kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana sarana dakwah Islam yang dapat diimplementasikan melalui *zakat, infak, shadaqah, waqaf* yang menjadi bagian dari pilar perekonomian umat secara universal.¹⁸⁵

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2018, pulau Madura yang terdiri dari 4 Kabupaten menyumbang kemiskinan paling besar.¹⁸⁶ lihat tabel 4.2:

Tabel 4.2.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018

Kode	Kabupaten/ Kota	2018				
		Jumlah	Persentase	P1	P2	Garis
		Penduduk	Penduduk			Kemiskinan
		Miskin (000)	Miskin			(Rp/Kap/bulan)
3501	Kab. Pacitan	78,64	14,19	1,73	0,32	268 592
3502	Kab. Ponorogo	90,22	10,36	1,30	0,26	297 467
3503	Kab. Trenggalek	83,50	12,02	1,85	0,42	308 644
3504	Kab. Tulungagung	75,23	7,27	0,98	0,21	328 640
3505	Kab. Blitar	112,40	9,72	1,33	0,28	305 440
3506	Kab. Kediri	177,20	11,31	1,71	0,39	294 098
3507	Kab. Malang	268,49	10,37	1,67	0,39	314 550
3508	Kab. Lumajang	103,69	9,98	1,38	0,31	281 461
3509	Kab. Jember	243,42	9,98	1,45	0,33	324 174
3510	Kab. Banyuwangi	125,50	7,80	1,40	0,35	339 891
3511	Kab. Bondowoso	110,98	14,39	2,12	0,51	363 443
3512	Kab. Situbondo	80,27	11,82	1,49	0,31	294 209
3513	Kab. Probolinggo	217,06	18,71	3,42	0,91	402 532
3514	Kab. Pasuruan	152,48	9,45	1,50	0,37	331 057
3515	Kab. Sidoarjo	125,75	5,69	1,03	0,31	437 899
3516	Kab. Mojokerto	111,55	10,08	1,81	0,48	370 610
3517	Kab. Jombang	120,19	9,56	1,34	0,30	374 895
3518	Kab. Nganjuk	127,28	12,11	2,07	0,53	388 186
3519	Kab. Madiun	77,75	11,42	1,60	0,34	327 536
3520	Kab. Magetan	64,86	10,31	1,16	0,20	319 909
3521	Kab. Ngawi	123,09	14,83	1,96	0,40	301 158
3522	Kab. Bojonegoro	163,94	13,16	1,87	0,39	330 544
3523	Kab. Tuban	178,64	15,31	2,55	0,65	328 268
3524	Kab. Lamongan	164,00	13,80	2,83	0,86	360 444
3525	Kab. Gresik	154,02	11,89	1,79	0,45	438 704
3526	Kab. Bangkalan	191,33	19,59	3,57	1,00	369 455
3527	Kab. Sampang	204,82	21,21	3,06	0,64	325 825
3528	Kab. Pamekasan	125,76	14,47	1,70	0,32	317 144
3529	Kab. Sumenep	218,60	20,16	3,57	1,15	340 033

¹⁸⁵ M. Dawam Rahardjo. "Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi." (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 389.

¹⁸⁶ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html> (diakses pada Jum'at, 17 September 2019).

3571	Kota Kediri	21,90	7,68	0,87	0,18	453 807
3572	Kota Blitar	10,47	7,44	1,05	0,31	425 832
3573	Kota Malang	35,49	4,10	0,55	0,11	507 114
3574	Kota Probolinggo	16,90	7,20	0,89	0,17	479 267
3575	Kota Pasuruan	13,45	6,77	0,90	0,19	415 171
3576	Kota Mojokerto	7,04	5,50	0,59	0,10	437 231
3577	Kota Madiun	7,92	4,49	0,31	0,04	446 525
3578	Kota Surabaya	140,81	4,88	0,81	0,20	530 178
3579	Kota Batu	7,98	3,89	0,55	0,12	467 073
JAWA TIMUR		4 332,59	10,98	1,94	0,50	373 574

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat tabel 4.4, empat kabupaten di pulau Madura menyumbangkan 740,51 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Setara dengan penduduk miskin di 4 Kabupaten (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo) dan 9 kota (Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu).

Jumlah penduduk miskin pulau Madura menjadi perhatian tersendiri bagi para Ulama dan tokoh masyarakat setempat. Diantaraya peneliti mewawancarai ketua PCNU Pamekasan KH. Taufik Hasyim:¹⁸⁷

“Mun ngabes dek jumlah orang-orang miskin e pulau Madhureh jet cek merengisseh, tak bisa dipungkiri jet engak jiyeh keadaanya. Ben banyak masyarakat Madhureh tingkat pendidiknah di bawah rata-rata katembheng bik kabupaten/kota selaen e jebeh temor. Sebab polanah jeriyeh reng Madhureh ghik banyak odik e garis kemiskinan e dhisah ben peseser, sekalipun andik usaha tapeh andik inovasi usaha se bek canggih tak bisah bersaing bik reng orang se sateyah se la sa kabbbhinah berbasih teknologi. Areyah merupakan tanggung jawab bersama selaku orang se berpendidikan untuk a bentoh ngube mindset orang Madhureh se bek ketinggalan jeman engak sateyah. Banyak macem usaha se e kalakoh orang madhureh tak mampu bersaing e kancah regional apah pole e kancah nasional sajen jeu. Karenah ekonomi e Madhureh e yangghep tadek apah, mangkanah banyak reng Madhureh se merantau ka luar Madhureh gebhey nyareh kasab keluarganah. Mangkanah mak pola dengan hadirnya BMT-BMT se berbasis syariah bisah a bhentoh masyarakat madhureh se betul-betul bedeh gheris kakorangan, memberdayakan fakir miskin, ben mun bisah penelitian a reyah bisah a berrik masukan dan pandangan ka pemerintah, makle menghasilkan kebijakan se teppak ben sepak ka rakyat kenek. Nahdlatul Ulama’ se la ngopenih masyarakat madhureh ben deddih identitas reng Madhureh teros a usaha aghi a ghebey solusi terbaik guna memberdayakan masyarakat miskin, contonah engak membangun koperasi ben BMT-BMT se professional ben bisah a berrik dampak positif dek peningkatan penghaselan orang disah, reng peseser, reng ghunung ben reng sok pelosok e Madhureh.”

¹⁸⁷ Wawancara dengan KH. Taufik Hasyim selaku Ketua PCNU Pamekasan 2016-2021 pada 27 Agustus 2019 di Kantor PCNU Pamekasan.

(Melihat jumlah orang miskin di pulau Madura sangat mengerikan, tidak bisa dipungkiri memang seperti itu kenyataannya, dan masih sangat banyak tingkat pendidikan masyarakat Madura di bawah rata-rata bila dibandingkan dengan tingkat pendidikan di kabupaten atau kota yang lain di Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan orang Madura masih banyak hidup di garis kemiskinan terutama orang-orang pedesaan dan pesisir. Sekalipun punya usaha sendiri tapi tidak memiliki inovasi canggih untuk bisa bersaing dengan pengusaha millennial yang menggunakan peralatan teknologi serba canggih. Problematika ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang yang berpendidikan untuk membantu merubah pola pikir orang Madura lebih maju, kreatif dan inovatif. Kita lihat bersama sangat banyak macam usaha yang dicoba dibangun oleh masyarakat Madura, akan tetapi tidak mampu bersaing di level regional, apalagi di level nasional. Fenomena lain juga, masih banyak orang Madura sendiri beranggapan bahwa di Madura sedikit pekerjaan, sedikit pendapatan dan perekonomian sering sulit. Sehingga banyak orang Madura merantau ke luar Madura untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Maka dari itu, mungkin dengan semakin massifnya BMT-BMT berbasis syariah seperti BMT yang anda teliti bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura yang berada di garis kemiskinan, bisa memberdayakan orang-orang fakir miskin dan jikalau bisa semoga penelitian ini dapat memberikan masukan atau pandangan kepada pemerintah daerah agar supaya membuat kebijakan pro rakyat kecil dan mendukung usaha yang mereka kembangkan. Nahdlatul Ulama' yang sudah lama memberdayakan masyarakat Madura dan jadi identitas orang Madura sendiri terus berusaha menciptakan solusi terbaik guna membantu masyarakat di pedesaan dan pesisir Madura seperti membangun BMT atau Koperasi syariah yang professional dan kompeten. Sehingga memberikan dampak positif kepada peningkatan masyarakat desa atau di pesisir pantai pulau Madura).

Gerakan pemberdayaan yang diusung oleh BMT dan Koperasi berbasis syariah di Madura menurut para tokoh Nahdlatul Ulama' harus lebih bisa profesional, kompeten, inovatif, kreatif, dan canggih bila ingin benar-benar memberikan dampak positif bagi para anggotanya. Sebab persaingan usaha semakin ketat, diharapkan para pemangku kebijakan termasuk pula pemerintah setempat memberikan dukungan dan kebijakan yang pro rakyat kecil, utamanya masyarakat Madura.¹⁸⁸ Gerakan pemberdayaan sendiri sudah sesuai dengan nilai-

¹⁸⁸ KH. Sahal Mahfudz memberikan langkah-langkah terkait gerakan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi pemangku kebijakan Nahdlatul Ulama' di semua tingkatan dengan: *Pertama*, menentukan obyek pemberdayaan. Langkah ini mengidentifikasi terlebih dahulu yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. *Kedua*, penggunaan media yang sesuai dengan obyek sasaran pemberdayaan. *Ketiga*, menggunakan strategi yang tepat agar tujuan yang dicapai bisa dieksekusi dengan baik. *Keempat*, membuat *planing* (perencanaan) yang matang. *Kelima*, menggunakan pendekatan partisipatif selama proses pemberdayaan. Dengan langkah strategis tersebut diharapkan masyarakat NU terutamanya di pulau Madura dapat menumbuhkembangkan etos kerja, etos transformasi,

nilai Al-Qur'an seperti, menjunjung etos kerja, etos transformasi, etos intelektual, etos penghargaan dan etos sosial.¹⁸⁹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

1. Etos Kerja

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: ١٠٥)

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Taubah: 105)

2. Etos Transformasi

ادْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِهِمْ بِاَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (النحل: ١٢٥)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. Al-Nahl: 125)

3. Etos Intelektual

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المجادلة: ١١)

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah SWT memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah SWT meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

4. Etos Penghargaan

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزلة: ٧)

etos intelektual, etos penghargaan dan etos sosial yang tinggi. Lihat pula dalam Sahal Mahfudh. “Nuansa Fikih Sosial”. Cet. II. (Yogyakarta: LKiS, 2003), 97.

¹⁸⁹ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmadi Syafie. “Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi”. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 28.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.” (*Al-Zalzalah: 7*)

5. Etos Sosial

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وَلَا يُخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الماعون: ١-٣)

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (*QS. Al-Ma’un: 1-3*)

KH. Tholhah Hasan¹⁹⁰ yang masyhur dengan kezuhudan dan etos kerjanya mengidentifikasi bahwa di dalam Al-Qur’an terdapat 360 ayat berbicara “*Al-‘Amal*”, 109 ayat “*Al-Fi’l*”, 67 ayat “*Al-Kasb*”, dan 30 ayat “*As-Sa’yu*”. Semua ayat-ayat tersebut mengandung ajaran yang berkaitan dengan kerja, menetapkan sikap-sikap terhadap pekerjaan, memberi arahan dan motivasi, bahkan contoh-contoh konkret tanggung jawab dalam bekerja. Islam memandang bekerja sebagai hal yang luhur dan sebagai salah satu perwujudan ibadah, selama niatnya benar dan aplikasinya tidak menyalahi aturan Allah SWT. Islam juga memberikan motivasi serta rangsangan kuat kepada orang-orang yang suka bekerja dengan baik, bukan hanya dengan keuntungan dunia tetapi juga pahala di akhirat.¹⁹¹ Sejak awal Islam hadir, sudah membina lingkungan sosio-kultural untuk menciptakan dunia usaha yang berorientasi dunia akhirat, agar manusia tidak saling menindas satu sama lain.

Masyarakat *Nahdliyyin*¹⁹² terutama para pelaku usaha dibimbing secara baik dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memegang teguh prinsip pemberdayaan ekonomi Nahdlatul Ulama’ yaitu, ‘*Adl* (adil), ‘*Ihsan* (kebajikan) dan *Shadaqah* (bersedekah).¹⁹³ Berlandaskan firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. (المطففين: ١-٥)

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila

¹⁹⁰ Mantan Wakil Rais ‘Aam PBNU di masa KH. Sahal Mahfudz dan mantan Ketua Tanfidziyah IV (bidang urusan luar negeri) 1990-1994.

¹⁹¹ Muhammad Tholhah Hasan. “*Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia*”, Cet. IV. (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 238-244.

¹⁹² Kata *Nahdliyyin* merupakan sebutan bagi para pengikut amaliyah Nahdlatul Ulama’. KH. Maimoen Zubair mengklasifikasi kata *Nahdliyyin* pada dua kelompok, *pertama*, anggota alami ialah orang yang mengikuti para ulama berlandaskan amalan-amalan Nahdlatul Ulama’. *Kedua*, anggota organisasi ialah orang yang tercatat secara administratif di Nahdlatul Ulama’.

¹⁹³ R. Andi Irawan, “Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 8, 2016): 149–62, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.149->.

mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar.” (QS. Al-Muthoffin: 1-5)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. (البقرة: ٢١٩)

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219)

Ayat-ayat di atas mengajarkan kepada para pelaku usaha senantiasa berlaku jujur dan adil sebagai bentuk moralitas kepada Sang Maha Pencipta.¹⁹⁴ Pemberdayaan tanpa diselaraskan dengan tiga konsep di atas, mustahil mencapai kemaslahatan bersama dengan pemerataan ekonomi di pulau Madura. Sebab akan menimbulkan monopoli pasar dan eksploitasi perekonomian besar terhadap pemusatan kekayaan. Sebagaimana teori kapitalisme ekonomi yang dibawa oleh Adam Smith bahwa inti dari pasar bebas adalah setiap individu berhak mengejar setiap kepentingannya masing-masing.¹⁹⁵

Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diatasi. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab structural terhadap masalah kemiskinan.¹⁹⁶ Islam berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.¹⁹⁷

Gus Dur berpendapat bahwa implementasi ekonomi Islam harus berlandaskan nilai-nilai moralitas dan diorientasikan demi mewujudkan keadilan sosial dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak.¹⁹⁸ Dan jika kita cermati, prinsip-prinsip di atas sejalan dengan nilai-nilai

¹⁹⁴ Asghar Ali Engineer. “Islam dan Pembebasan”. Cet. II. (Yogyakarta: LKiS, 2007), 62-65.

¹⁹⁵ Qodri A. Azizy. “Melawan Globalisasi”. Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 45.

¹⁹⁶ Yusuf al-Qardhawi. “Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajahā al-Islām”. (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985), 33-34.

¹⁹⁷ Abad Badruzaman. “Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh’afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 137.

¹⁹⁸ Abdurrahman Wahid. “Islamku, Islam Anda, Islam Kita”. Cet. II. (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 164.

Mabadi' Khoiru al-Ummah al-Khamsah,¹⁹⁹ yaitu *as-Shidq* (kejujuran), *al-Wafa bil-'Ahd* (komitmen atau disiplin), *al-'Adalah* (keadilan), *al-Istiqomah* (konsisten), *al-Ta'awun* (saling tolong menolong) dan *al-Amanah* (dapat dipercaya).²⁰⁰ *Mabadi' Khoiru al-Ummah* sendiri dirumuskan pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama' ke-XIII di Magelang 1939 M sebagai landasan moral bagi gerakan ekonomi kaum santri, khususnya kaum *Nahdliyyin*.²⁰¹

Dominasi kaum *Nahdliyyin* di pulau Madura menjadi *opportunity* (peluang) bagi pengurus *Bayt al-Maal wat Tamwil* (BMT) dalam menyediakan akses keuangan, pembinaan dan pemberdayaan usaha bagi masyarakat pedesaan serta masyarakat pesisir Madura. Tiga lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi obyek penelitian Peneliti digagas oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama', sebagai bentuk perhatian dan keprihatinan mereka kepada masyarakat sekitar utamanya warga Nahdlatul Ulama' yang masih banyak berada dalam garis kemiskinan. Melihat trend peningkatan anggota serta aset yang dimiliki oleh Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri di daerah Pamekasan, Peneliti bisa berharap memberikan harapan baru bagi kesejahteraan serta iklim usaha masyarakat Madura. Komitmen lembaga keuangan mikro syariah di Pulau Madura harus selalu didukung oleh semua elemen masyarakat, baik para Kiyai, tokoh, peneliti, pemerintah ataupun *stakeholder* yang berkepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Secara umum perkembangan iklim usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sepanjang 2016-2017 terus meningkat. Peningkatan tersebut bisa dijadikan ukuran pada perkembangan dua tahun selanjutnya yaitu di tahun 2018-2019. lihat tabel 4.3 laporan perkembangan UMKM di Indonesia selama 2016-2017.

Penulis menemukan konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU, BMT NU dan BMT Sidogiri di pulau Madura yang

¹⁹⁹ Konsep yang digagas oleh KH. Mahfudz Shiddiq (Presiden HBNO ketika itu) dijadikan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi *Nahdliyyin* yang tertuang dalam *Mabadi' Khair al-Ummah* pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama' di Magelang 1939. Prinsip *Mabadi' Khair al-Ummah* (prinsip dasar pembentukan ummat terbaik) pada saat itu masih berisi tiga prinsip yang dikenal dengan *Mabadi' Khair al-Ummah al-Tsalatsah* (Trisila *Mabadi'*) yaitu, *pertama: as-Shidq* (kejujuran), *kedua: al-Wafa bil-'Ahd* (komitmen/disiplin) dan *ketiga: al-Ta'awun* (saling tolong menolong). Sesuai dengan perkembangan zaman dan ekonomi, maka di Munas Nahdlatul Ulama' tahun 1992 di Lampung, *Mabadi' Khair al-Ummah al-Tsalatsah* ditambah dua prinsip yaitu, *al-'Adalah* (keadilan), *al-Istiqomah* (konsisten). Kemudian biasa dikenal dengan *Mabadi' Khair al-Ummah al-Khamsah* (Pancasila *Mabadi'*). KH. Ahmad Siddiq (adik kandung KH. Mahfudz Shiddiq Rois 'Aam PBNU 1984-1991) menyatakan *Mabadi' Khair al-Ummah al-Khamsah* ini digunakan sebagai sarana mengembangkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat sosialis religius yang dicita-citakan bersama oleh Nahdlatul Ulama' dan Negara.

²⁰⁰ Soeleiman Fadeli. "Antologi Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah NU". Cet. III. (Surabaya: Khalista, 2010), 76. Lihat juga dalam Abdul Muchith Muzadi. "Mengenal Nahdlatul 'Ulama". Cet. I. (Surabaya: Khalista, 2004), 43.

²⁰¹ Tashwirul Afkar. "Ekonomi NU: Mengembalikan Spirit Nahdlatul Tujjar". Edisi No. 28 Tahun 2009. (Jakarta: Lakpesdam NU, 2009), 20.

dibantu oleh para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama' sesuai dengan proses pemberdayaan yang ditawarkan oleh Pearse dan Stiefel. Keduanya menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu, primer dan sekunder.²⁰² Kecenderungan primernya adalah proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan ataupun kemampuan kepada masyarakat, agar masing-masing dari mereka menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekundernya melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong, memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. Sehingga terciptalah *equilibrium* (keseimbangan) ekonomi,²⁰³ keseimbangan material dan spiritual,²⁰⁴ serta keadilan pasar bagi pengusaha kecil.²⁰⁵

Tabel 4.3.²⁰⁶

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)
Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2016	
			JUMLAH	PANGSA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	61.656.547	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Unit)	61.651.177	99,99
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	60.863.578	98,71
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	731.047	1,19
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	56.551	0,09
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.370	0,01

²⁰² Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka. "Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi". (Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), 56-57.

²⁰³ Euis Amalia, "Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 1, 2011), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>.

²⁰⁴ M. Umer Chapra, "Islam and Economics Challenge". (Leicester UK: The Islamic Foundation, 2002), 358.

²⁰⁵ Al-Ghazali. "Ihyâ Ulûm al-Dîn". Juz IV. (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), 94.

²⁰⁶ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KUKM RI) di laman <http://www.depkop.go.id/data-umkm> (diakses pada Rabu, 18 September 2019).

2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	116.273.356	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Orang)	112.828.610	97,04
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	103.839.015	89,31
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.402.073	4,65
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.587.522	3,09
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.444.746	2,96
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	11.712.450,6	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Rp. Milyar)	7.009.283,0	59,84
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	4.292.287,8	36,65
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.128.056,8	9,63
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.588.938,3	13,57
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	4.703.167,6	40,16
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (A+B)	(Rp. Milyar)	9.045.739,5	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Rp. Milyar)	5.171.063,6	57,17
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.736.613,7	30,25
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.123.131,8	12,42
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.311.318,0	14,50
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.874.675,9	42,83
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B)	(Rp. Milyar)	1.774.626,9	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Rp. Milyar)	255.126,1	14,38
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	22.719,3	1,28
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	45.536,4	2,57
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	186.870,4	10,53
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.519.500,8	85,62
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	3.556.258,8	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Rp. Milyar)	2.057.972,0	57,87
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	262.271,0	7,37
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	749.745,5	21,08
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.045.955,5	29,41

	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.498.286,9	42,13
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (A+B)	(Rp. Milyar)	2.736.245,3	
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	(Rp. Milyar)	1.451.396,8	53,04
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	194.124,6	7,09
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	471.627,5	17,24
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	785.644,8	28,71
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.284.848,5	46,96

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		PERKEMBANGAN TAHUN 2016-2017	
		JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	62.928.077		1.271.529	2,06
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	62.922.617	99,99	1.271.440	2,06
	- Usaha Mikro (UMi)	62.106.900	98,70	1.243.322	2,04
	- Usaha Kecil (UK)	757.090	1,20	26.043	3,56
	- Usaha Menengah (UM)	58.627	0,09	2.075	3,67
	B. Usaha Besar (UB)	5.460	0,01	90	1,67
2	TENAGA KERJA (A+B)	120.260.185		3.986.829	3,43
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	116.673.416	97,02	3.844.806	3,41
	- Usaha Mikro (UMi)	107.232.992	89,17	3.393.977	3,27
	- Usaha Kecil (UK)	5.704.321	4,74	302.248	5,60
	- Usaha Menengah (UM)	3.736.103	3,11	148.580	4,14
	B. Usaha Besar (UB)	3.586.769	2,98	142.023	4,12
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	12.840.859,0		1.128.408,4	9,63
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7.704.635,9	60,00	695.352,9	9,92
	- Usaha Mikro (UMi)	4.727.989,4	36,82	435.701,6	10,15
	- Usaha Kecil (UK)	1.234.210,7	9,61	106.153,9	9,41
	- Usaha Menengah (UM)	1.742.435,7	13,57	153.497,4	9,66
	B. Usaha Besar (UB)	5.136.223,1	40,00	433.055,5	9,21

4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (A+B)	9.504.148,6		458.409,2	5,07
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5.425.414,7	57,08	254.351,1	4,92
	- Usaha Mikro (UMi)	2.856.607,8	30,06	119.994,0	4,38
	- Usaha Kecil (UK)	1.191.871,1	12,54	68.739,3	6,12
	- Usaha Menengah (UM)	1.376.935,8	14,49	65.617,8	5,00
	B. Usaha Besar (UB)	4.078.734,0	42,92	204.058,1	5,27
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B)	2.104.433,9		329.807,0	18,58
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	298.208,7	14,17	43.082,6	16,89
	- Usaha Mikro (UMi)	26.466,4	1,26	3.747,1	16,49
	- Usaha Kecil (UK)	52.085,4	2,48	6.549,0	14,38
	- Usaha Menengah (UM)	219.656,9	10,44	32.786,5	17,55
	B. Usaha Besar (UB)	1.806.225,1	85,83	286.724,3	18,87
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	3.844.657,2		288.398,4	8,11
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.236.739,8	58,18	178.767,9	8,69
	- Usaha Mikro (UMi)	282.701,5	7,35	20.430,5	7,79
	- Usaha Kecil (UK)	813.853,9	21,17	64.108,5	8,55
	- Usaha Menengah (UM)	1.140.184,4	29,66	94.228,9	9,01
	B. Usaha Besar (UB)	1.607.917,4	41,82	109.630,6	7,32
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (A+B)	2.904.617,3		168.372,0	6,15
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.546.380,4	53,24	94.983,6	6,54
	- Usaha Mikro (UMi)	203.583,0	7,01	9.458,4	4,87
	- Usaha Kecil (UK)	496.161,1	17,08	24.533,6	5,20
	- Usaha Menengah (UM)	846.636,3	29,15	60.991,6	7,76
	B. Usaha Besar (UB)	1.358.236,9	46,76	73.388,4	5,71

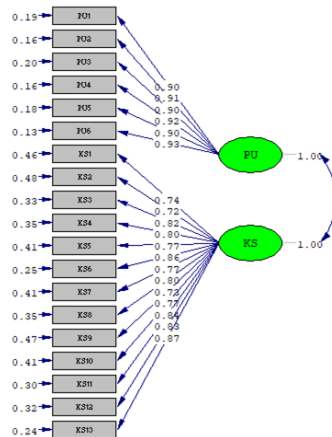
Sumber Data: Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah dari data BPS.

B. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengaruh Perkembangan UMKM Terhadap Kesejahteraan
 - a. Hasil Validitas dan Reliabilitas dengan metode CFA

Semua item pada gambar 4.1 masing-masing variabel valid karena memiliki nilai *loading factor* di atas 0,5 dan nilai VE diatas 0,50. Semua variabel reliabel karena memiliki nilai CR lebih besar dari 0,70.

Gambar: 4.1
Hasil Validitas dan Reliabilitas dengan metode CFA



Chi-Square=383.54, df=151, P-value=0.00000, RMSEA=0.076

b. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas

No	Variabel	Indikator	Standard Loading (Loading Factor)	Standar Loading ²	Measurement Error (1-Std Loading ²)	Construct Reliability	Variance Extracted
1	Perkembangan UMKM	PU1	0.90	0.81	0.19	0.97	0.83
		PU2	0.91	0.83	0.17		
		PU3	0.90	0.81	0.19		
		PU4	0.92	0.85	0.15		
		PU5	0.90	0.81	0.19		
		PU6	0.93	0.86	0.14		
		Sigma	5.46	4.97	1.03		
		Sigma ²	29.81				
2	Kesejahteraan	KS1	0.74	0.55	0.45	0.96	0.63
		KS2	0.72	0.52	0.48		
		KS3	0.82	0.67	0.33		
		KS4	0.80	0.64	0.36		
		KS5	0.77	0.59	0.41		
		KS6	0.86	0.74	0.26		
		KS7	0.77	0.59	0.41		
		KS8	0.80	0.64	0.36		
		KS9	0.73	0.53	0.47		
		KS10	0.77	0.59	0.41		
		KS11	0.84	0.71	0.29		
		KS12	0.83	0.69	0.31		

		KS13	0.87	0.76	0.24		
		Sigma	10.32	8.22	4.78		
		Sigma^2	106.50				

Hasil pada gambar 4.1 dan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator pada variabel-variabel laten telah memenuhi validitas dan reliabilitas yang baik pada estimasi *standardized solution*. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada variabel laten Pemberdayaan UMKM dan Kesejahteraan telah lolos uji validitas, karena telah memenuhi persyaratan yaitu nilai loading factors $\geq 0,50$ dan nilai *Variance Extracted* masing-masing variabel lebih besar dari 0,50. Selain itu juga semua variabel reliabel karena memiliki nilai CR lebih besar dari 0,70.

Nilai *standardize loading factor* suatu indikator menunjukkan seberapa besar kontribusi indikator atau konstruk tersebut dalam menjelaskan variabel latennya. Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas diketahui bahwa pada variabel Pemberdayaan UMKM yang memiliki *loading factor* terbesar yaitu indikator nomor 6 (PU6) sebesar 0,93 yang berarti bahwa indikator tersebut merupakan yang terbesar kontribusinya dalam menjelaskan variabel Pemberdayaan UMKM. Pada variabel Kesejahteraan, nilai *loading factor* terbesar terdapat pada indikator nomor 13 (KS13) yaitu sebesar 0,87 yang berarti bahwa indikator tersebut merupakan yang terbesar kontribusinya dalam menjelaskan variabel Kesejahteraan dengan jumlah rata-rata pembiayaan Rp. 2.000.000.

c. Uji Normalitas

Gambar: 4.2
Hasil Uji Normalitas

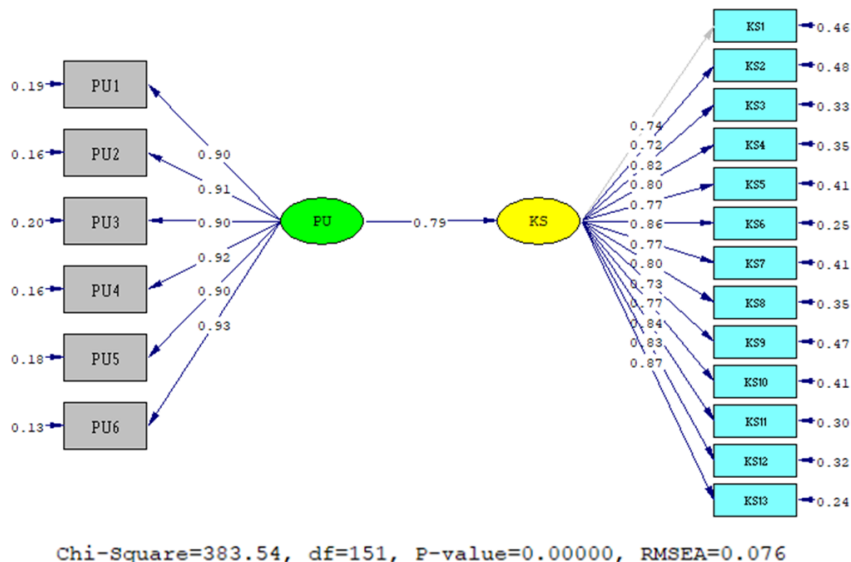
Test of Univariate Normality for Continuous Variables							
Variable	Skewness		Kurtosis		Skewness and Kurtosis		
	Z-Score	P-Value	Z-Score	P-Value	Chi-Square	P-Value	
PU1	1.622	0.105	1.227	0.220	4.135	0.126	
PU2	1.442	0.149	0.604	0.546	2.444	0.295	
PU3	1.500	0.134	1.089	0.276	3.437	0.179	
PU4	1.462	0.144	0.635	0.526	2.539	0.281	
PU5	1.632	0.103	0.940	0.347	3.547	0.170	
PU6	1.424	0.154	0.807	0.419	2.681	0.262	
KS1	1.096	0.273	-1.938	0.053	4.958	0.084	
KS2	1.432	0.152	-1.666	0.096	4.826	0.090	
KS3	1.424	0.154	-0.610	0.542	2.400	0.301	
KS4	0.943	0.346	-1.879	0.060	4.420	0.110	
KS5	0.972	0.331	-0.647	0.517	1.365	0.505	
KS6	1.485	0.138	-1.063	0.288	3.334	0.189	
KS7	1.083	0.279	-1.862	0.063	4.639	0.098	
KS8	1.292	0.196	-1.027	0.305	2.724	0.256	
KS9	1.112	0.266	-1.747	0.081	4.288	0.117	
KS10	0.887	0.375	-1.586	0.113	3.302	0.192	
KS11	1.072	0.284	-1.980	0.048	5.068	0.079	
KS12	0.978	0.328	-1.647	0.100	3.670	0.160	
KS13	1.553	0.120	-0.448	0.654	2.613	0.271	

Hasil gambar 4.2 nilai *P Value Skewness and Kurtosis* lebih besar dari 0,05 sehingga semua data berdistribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi dalam SEM antara lain yaitu normalitas. Normalitas merupakan bentuk distribusi data pada suatu variabel matriks tunggal untuk menghasilkan distribusi normal. Apabila distribusi data mampu membentuk distribusi normal, maka normalitas data tersebut terpenuhi. Hasil uji statistik dikatakan tidak valid apabila normalitas data tidak terpenuhi.²⁰⁷

d. Analisis SEM Model *Path Coefficients*

Pada gambar 4.3 nilai R^2 sebesar 0,62 yang berarti bahwa variabel Perkembangan UMKM mampu menjelaskan variabel Kesejahteraan sebesar 62% atau bisa juga pengaruh variabel Pemberdayaan UMKM terhadap variabel Kesejahteraan sebesar 62%. Diketahui persamaan struktural pada model penelitian ini yaitu $KS = 0,79*PU$, yang berarti bahwa variabel Kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,79 setiap variabel Pemberdayaan UMKM meningkat satu satuan.

Gambar. 4.3
Hasil Analisis SEM Model *Path Coefficients*



Persamaan Struktural:

$$KS = 0.79*PU,$$

$$R^2 = 0.62$$

²⁰⁷ Imam Ghozali. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23." (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 43. Lihat juga dalam Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. "SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset." (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 53.

Nilai R^2 sebesar 0,62 yang berarti bahwa besarnya pengaruh Pemberdayaan UMKM terhadap Kesejahteraan adalah sebesar 62% dengan varians kesalahan (*error variance*) sebesar 0,38. Pada persamaan tersebut, terlihat bahwa variabel Kesejahteraan hanya dipengaruhi oleh variabel Pemberdayaan UMKM, padahal dalam kondisi yang sesungguhnya, variabel Kesejahteraan tidak mungkin hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut, karena variabel Kesejahteraan juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam persamaan tersebut terdapat varians kesalahan. Peneliti menemukan varians kesalahan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di lapangan. Bahwa para anggota lembaga keuangan mikro syariah di Madura masih banyak mengeluhkan kecanggihan atau kemudahan dalam bertransaksi. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi adanya kecenderungan para anggota untuk juga menggunakan produk dari bank atau lembaga keuangan yang konvensional. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu anggota Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, BMT.

*“Ghuleh ghik tak pateh sepenuhnya ngangghuy layanan Koperasi Muslimat, polanah bek melarat mun perpaknah mondhut deh obeng e saat bhutoh e tenga malem otabeh delem kabede'en mendadak. Bhideh sareng bank-bank a kadhiyeh BRI, BNI ben BCA se ampon bisah transfer lebet internet banking otabeh sms banking otabeh lebet ATM se ampon e sedhia aghi e tempat-tempat umum. Deddih ghuleh nyabek otabeh nginjem ka Koperasi ghun mun cek bhutonah pas e neng Bank bek melarat se olleyah pembiayaan sebeb ghuleh masyarakat kenek.”*²⁰⁸

(Saya tidak sepenuhnya memakai layanan Koperasi Muslimat NU, sebab sulit untuk ambil uang simpanan bila dibutuhkan dalam keadaan mendadak atau mendesak apalagi ketika dibutuhkan di saat tengah malam. Beda dengan bank-bank seperti BRI, BNI atau BCA yang bisa mentransfer uang lewat Internet banking, mobile banking atau lewat ATM yang telah disediakan di tempat-tempat umum. Jadi, saya memakai layanan Koperasi hnya ketika membutuhkan pinjaman dan di bank agak dipersulit bagi masyarakat kecil seperti saya).

“Kakorangan tentoh ghi bedeh, mun e BMT NU kakdintoh ghik tak pateh canggih a engak bank, deddih mun negguweh saldo kaksah ghik osa dentek lagghuk osa cetak buku tabungan otabeh a Tanya ka petugas se a leng-leng gebey narik tabungan kakkdissah. Mun neng bank samangken bisah lebet hp, mun bedeh masalah otabeh se terro e Tanya aghinah bisah e layanah 24 jam lebet telegram kan cek saenah. Ghi ghuleh ngangghuy layanan BMT ghun polanah tabarrukan dek ka ulama se nganjur aghi ngangghuy layanan BMT. Ghi pola deddih barokanah anak potoh abdhinah. Mun canggih ben gempang e layanan ghik saean e bank pas ghik lebbih aman e bank menurut ghuleh ghi. Polanah

²⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Ny. Sutindah salah satu anggota Koperasi An-Nisa' Muslimat NU di kediamannya pada 05 September 2019.

lengkap bik satpammah, pak polisi ben alarm. Mun e BMT sobung, sareh pon BMT kakmah sobung mun e kakdintoh."²⁰⁹

(Kekurangan dari setiap BMT akan tetap selalu ada, kalau di BMT NU tidak terlalu canggih saja tidak seperti di bank. Jadi seperti mau lihat saldo masih harus nunggu esok harinya atau cetak buku tabungan dulu atau nunggu petugas yang biasa datang untuk melayani simpanan. Kalau bank lihat saldo bisa lewat hp dan kalau ada masalah atau pertanyaan bisa dilayani 24 jam melalui via telegram dan buat saya menikmati layanan. Saya memakai layanan BMT hanya ingin mengharap berkah kepada ulama atau guru yang menganjurkan sya memakai layanan BMT. Mungkin dengan saya mengikuti perintah ulama dan guru bisa menjadi keberkahan bagi saya dan keluarga. Kalau masalah canggih dan kemudahan masih kalah dengan bank serta lebih aman menurut saya. Soalnya kalau di bank lengkap dengan satpam, pak polisi dan alarm tanda bahaya. Kalau di BMT tidak ada, dipersilahkan cari BMT manapun di Madura belum seperti itu).

Hasil wawancara di atas diidentifikasi oleh Peneliti menjadi nilai negatif bagi lembaga keuangan mikro syariah. Peneliti juga menemukan penelitian serupa tentang penggunaan layanan berbasis teknologi terhadap perbankan syariah di Arab Saudi oleh Ilham Hassan Fathelrahman Mansour, Abuzar M.A. Eljelly, Abdelgardir M.A. Abdullah²¹⁰ yang menemukan bahwa sikap pelanggan terhadap berbagai teknologi bank tidak sama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan bank yang merupakan pengguna ATM dipengaruhi oleh kenyamanan, kemudahan penggunaan dan kualitas layanan, sedangkan kredibilitas tidak dilihat sebagai pendorong yang signifikan. Pengguna ponsel lebih banyak dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan dan kualitas layanan, sedangkan pelanggan internet dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan serta kredibilitas sistem. Di bawah tiga model, sikap muncul sebagai faktor mediasi penuh untuk niat perilaku pelanggan.

Bank syariah mengandalkan, pada masa awal mereka, pada proses manual untuk sejumlah kecil produk dan layanan. Kebutuhan akan otomatisasi, demikian dikatakan, datang dengan peningkatan kecanggihan, volume data, kompleksitas dan manfaat biaya dalam berbagai produk dan layanan. Benar-benar dinyatakan bahwa teknologi informasi untuk bank konvensional lebih berkembang daripada bank syariah. Tingginya permintaan terhadap produk dan layanan teknologi mendorong persaingan dan dengan demikian membawa efisiensi dan penghematan pada produk dan layanan bank konvensional.²¹¹

²⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Misnadin salah satu anggota BMT NU di kediamannya pada 05 September 2019.

²¹⁰ Ilham Hassan Fathelrahman Mansour, Abuzar M. A. Eljelly, and Abdelgardir M. A. Abdullah, "Consumers' Attitude towards e-Banking Services in Islamic Banks: The Case of Sudan," *Review of International Business and Strategy* 26, no. 2 (June 6, 2016): 244–60, <https://doi.org/10.1108/RIBS-02-2014-0024>.

²¹¹ Khir, Kamal. Lobesh Gupta and Bala Shanmugan. *"Islamic Banking: A Practical Perspective."* (Petaling Jaya: Selangor Darul Ehsan Pearson Longman, 2008), 82.

Industri perbankan syariah masih dalam masa pertumbuhan dan tidak menikmati permintaan besar untuk produk dan layanan yang disesuaikan atau dimodifikasi, berjuang untuk mengamankan efisiensi dan penghematan biaya yang sebanding dengan rekan-rekan konvensional mereka.

E-banking umumnya diyakini memengaruhi profitabilitas dan kinerja secara positif dan sedemikian rupa untuk membenarkan biaya besar yang terkait dengan infrastruktur teknologi. Namun demikian, ada akumulasi bukti bahwa biaya yang terkait dengan e-banking yang mencakup infrastruktur, pemeliharaan berkelanjutan dan pelatihan karyawan lebih tinggi daripada pendapatan dari layanan elektronik,²¹² dalam kasus bank-bank Eropa dan Al-Smadi dan Al-Wabel²¹³ studi tentang Jordanian Banks.

Electronic Banking menawarkan kemudahan bagi pelanggannya melalui penghematan waktu, dan layanan perbankan 24 jam 7 hari seminggu tanpa antri atau waktu tunggu yang tidak perlu. Studi Dennis dan Papamatthaiou²¹⁴ tentang motivasi e-shopping menemukan bahwa kenyamanan secara signifikan berkorelasi dengan niat untuk pembeli online. Juga para peneliti telah menemukan hubungan positif antara persepsi kenyamanan dan penggunaan Perbankan online.²¹⁵

e. Analisis SEM model T *Values*

Pemberdayaan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan karena nilai t value = 11,48 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel = 1,96. Nilai *path coefficient* sebesar 0,79 menunjukkan bahwa arah pengaruh variabel Pemberdayaan UMKM terhadap Kesejahteraan ada positif yaitu sebesar 0,79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau meningkat Pemberdayaan UMKM maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan, begitu

²¹² Javier Delgado, Ignacio Hernando, and Maria J. Nieto, "Do European Primarily Internet Banks Show Scale and Experience Efficiencies?," *European Financial Management* 13, no. 4 (2007): 643–71, <https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00377.x>.

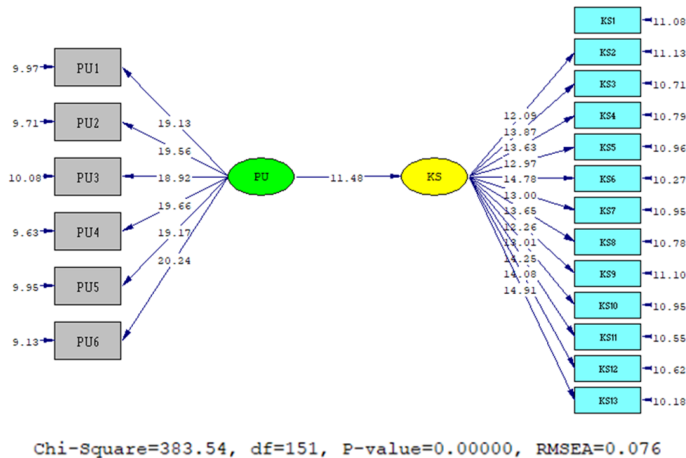
²¹³ Al-Smadi, Mohammad & Al-Wabel, Saad. The Impact of E- Banking on The Performance of Jordanian Banks. *Journal of Internet Banking and Commerce* 16, no. 2 (2011): 1-10, https://www.researchgate.net/publication/289005410_The_Impact_of_E-Banking_on_The_Performance_of_Jordanian_Banks atau bisa diakses di <http://www.arraydev.com/commerce/jibc/>

²¹⁴ Dennis, C. and Papamatthaiou. "Shoppers Motivations for E-shopping –Work in Progress." *European Institute of Retail and Services Studies, 10th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Sciences 2003*. Portland, OR, EIRASS.

²¹⁵ Vichuda Nui Polatoglu and Serap Ekin, "An Empirical Investigation of the Turkish Consumers' Acceptance of Internet Banking Services," *International Journal of Bank Marketing* 19, no. 4 (July 1, 2001): 156–16, <https://doi.org/10.1108/02652320110392527>. bisa juga dilihat dalam Gerrard, Philip & Cunningham, J. "The Diffusion of Internet Banking Among Singapore Consumers." *International Journal of Bank Marketing* 21, no 1 (February 2003): 16-28. <https://doi.org/10.1108/02652320310457776>.

pula sebaliknya. Kenaikan dan penurunan variabel kesejahteraan mengikuti persamaan strukturalnya. Lihat gambar 4.4 di bawah ini.

Gambar. 4.4
Hasil Analisis SEM Model T Value



Persamaan:

$$KS = 0.79 * PU$$

f. Uji Kecocokan Model *Goodness of Fit Index* (GFI)

Goodness of Fit Index (GFI) dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut, karena pada dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan tidak ada model sama sekali ($\Sigma(0)$).

Nilai GFI berkisar antara 0 (*poor fit*) sampai 1 (*perfect fit*), dan nilai GFI ≥ 0.90 merupakan good fit (kecocokan yang baik), sedangkan $0.80 \leq \text{GFI} < 0.90$ sering disebut sebagai margin fit. Berikut gambar 4.5 hasil uji kecocokan model *Goodness of Fit Index* (GFI)

Gambar. 4.5
Hasil Uji Kecocokan Model *Goodness of Fit Index* (GFI)

```

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 151
Minimum Fit Function Chi-Square = 353.65 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 383.54 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 232.54
90 Percent Confidence Interval for NCP = (178.68 ; 294.16)

Minimum Fit Function Value = 1.31
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.86
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.66 ; 1.09)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.076
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.066 ; 0.085)
P-value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.71
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.51 ; 1.94)
ECVI for Saturated Model = 1.41
ECVI for Independence Model = 0.73

Chi-Square for Independence Model with 171 Degrees of Freedom = 18249.45
Independence AIC = 18287.45
Model AIC = 461.54
Saturated AIC = 388.08
Independence CAIC = 18374.89
Model CAIC = 641.82
Saturated CAIC = 1254.40

Normed Fit Index (NFI) = 0.98
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.87
Comparative Fit Index (CFI) = 0.99
Incremental Fit Index (IFI) = 0.99
Relative Fit Index (RFI) = 0.98
Critical N (CN) = 149.38

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.041
Standardized RMR = 0.041
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.87
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.84
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.69

```

g. Ringkasan Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.5.

Hasil Perhitungan Uji Kecocokan Model *Goodness of Fit Index* (GFI)

NO	UKURAN GOF	TINGKAT TARGET KECOCOKAN	HASIL ESTIMASI	TINGKAT KECOCOKAN
1	<i>Root Mean Square Error of Approximation</i> (RMSEA) P (Close Fit)	$RMSEA \leq 0,08$ $p \geq 0,05$	0,076	<i>Good Fit</i>
2	<i>Normal Fit Index</i> (NFI)	$NFI \geq 0,90$	0,98	<i>Good Fit</i>
3	<i>Non-Normal Fit Index</i> (NNFI)	$NNFI \geq 0,90$	0,99	<i>Good Fit</i>
4	<i>Comparative Fit Index</i> (CFI)	$CFI \geq 0,90$	0,99	<i>Good Fit</i>
5	<i>Incremental Fit Index</i> (IFI)	$IFI \geq 0,90$	0,99	<i>Good Fit</i>
6	<i>Relative Fit Index</i> (RFI)	$RFI \geq 0,90$	0,98	<i>Good Fit</i>
7	<i>Root Mean Square Residual</i> (RMR)	$RMR \leq 0,05$	0,041	<i>Good Fit</i>
8	<i>Goodness of Fit Index</i> (GFI)	$GFI \geq 0,90$	0,87	<i>Marginal Fit</i>
9	<i>Adjusted Goodness of Fit Index</i> (AGFI)	$AGFI \geq 0,90$	0,84	<i>Marginal Fit</i>

Pada gambar 4.5 dan dijelaskan dalam tabel 4.2 nilai RMSEA kurang dari 0,08 dan secara keseluruhan model sudah **Good Fit** sehingga model penelitian sudah baik dan dapat diterima.

Nilai RMSEA pada penelitian ini sebesar 0,076. Hal ini mengindikasikan bahwa model tersebut sudah fit karena nilai $RMSEA \leq 0,08$. Nilai $RMSEA \leq 0,05$ menandakan close fit, sedangkan $0,05 < RMSEA \leq 0,08$ menunjukkan good

fit²¹⁶ mengelaborasi lebih jauh berkaitan dengan cut point ini dengan menambahkan bahwa nilai RMSEA antara 0.08 sampai 0.10 menunjukkan mediocre (marginal) fit, serta nilai RMSEA > 0.10 menunjukkan poor fit.

Menurut Ghazali dan Fuad,²¹⁷ suatu model dikatakan good fit apabila memiliki nilai NFI $\geq 0,9$. Pada model penelitian ini *good fit* karena memiliki nilai NFI sebesar 0,98. NNFI digunakan untuk mengatasi permasalahan kompleksitas model dalam perhitungan NFI. Nilai NNFI pada model ini adalah 0,99 sehingga model dinilai good fit.

Suatu model dikatakan baik apabila memiliki nilai CFI yang mendekati 1 dan 0,9 merupakan batasan model dikatakan fit di Bentler dalam Ghazali dan Fuad.²¹⁸ Model pada penelitian ini dianggap sudah good fit karena memiliki nilai CFI 0,99.

Suatu model dikatakan baik apabila memiliki nilai IFI yang mendekati 1 dan 0,9 merupakan batasan model dikatakan fit sebagaimana di Bentler dalam Ghazali dan Fuad.²¹⁹ Model pada penelitian ini dianggap sudah good fit karena memiliki nilai CFI 0,99.

Menurut Ghazali dan Fuad,²²⁰ suatu model dikatakan baik apabila memiliki nilai RFI yang mendekati 1 dan 0,9 merupakan batasan model dikatakan fit. Model pada penelitian ini dianggap good fit karena memiliki nilai RFI 0,98.

RMR merupakan rata-rata residual antara matriks kovarians/korelasi yang teramati dengan hasil estimasi. Menurut Yamin dan Kurniawan,²²¹ model dianggap good fit jika nilai RMR < 0,05. Nilai RMR pada model penelitian ini sebesar 0,041 yang berarti bahwa model sudah good fit.

Menurut Wijanto,²²² suatu model dikatakan good fit apabila memiliki GFI $\geq 0,9$ dan dikatakan marginal fit apabila memiliki $0,8 \leq \text{GFI} \leq 0,9$. Dalam model penelitian ini, nilai GFI-nya adalah sebesar 0,87 sehingga dapat dikatakan marginal fit.

²¹⁶ Michael W. Browne and Robert Cudeck, "Alternative Ways of Assessing Model Fit," *Sociological Methods & Research* 21, no. 2 (November 1, 1992): 230–58, <https://doi.org/10.1177/0049124192021002005>. Lihat juga dalam Wijanto, Setyo Hari. "Structural equation modeling dengan Lisrel 8.8: konsep dan tutorial." (Yogyakarta: Graha Ilmu 3.1, 2008), 54.

²¹⁷ Ghazali, Imam, and Fuad. "Structural equation modeling: Teori, konsep, dan aplikasi dengan program Lisrel 8.80." (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 66.

²¹⁸ Ghazali, Imam, and Fuad. "Structural equation", h. 68.

²¹⁹ Ghazali, Imam, and Fuad. "Structural equation", h. 68.

²²⁰ Ghazali, Imam, and Fuad. "Structural equation", h. 69.

²²¹ Yamin, Sofyan, and Heri Kurniawan. "Structural equation modeling: Belajar lebih mudah teknik analisis data kuesioner dengan Lisrel-PLS." (Jakarta: Salemba Infotek 2009), 31.

²²² Wijanto, S. "Structural Equation Modelling dengan Lisrel 8.8." (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 25.

Menurut Wijayanto,²²³ suatu model dikatakan good fit apabila memiliki $AGFI \geq 0,9$ dan dikatakan marginal fit apabila memiliki $0,8 \leq AGFI \leq 0,9$. Dalam model penelitian ini, nilai AGFI-nya adalah sebesar 0,84 sehingga dapat dikatakan marginal fit.

Berdasarkan hasil uji kecocokan model diketahui bahwa secara keseluruhan model sudah *good fit* sehingga model penelitian tersebut dapat diterima.

C. Strategi Relasi dan Pemberdayaan

1. Militansi Organisasi dan Tokoh Masyarakat

Nahdlatul Ulama' sudah menjadi identitas masyarakat Madura, selayaknya Nahdlatul Ulama' memikirkan strategi terbaiknya untuk bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Madura. Dalam mengimplementasikan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat *Nahdliyyin* tidaklah semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan kerangka dan konsep pemberdayaan ekonomi berasaskan nilai-nilai keIslamaan.²²⁴ Faktanya memang membutuhkan penelaahan teks-teks ayat Al-Qur'an, hadits serta pendapat para ulama untuk menciptakan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ideal serta islami. Landasan keagamaan dalam implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal urgen, sebab saat ini umat Islam dihadapkan pada praktik ekonomi global yang bersandarkan pada paham kapitalisme. Secara prinsipil kapitalisme hendak mewujudkan agenda liberalisasi ekonomi di semua sektor kehidupan.²²⁵

Pemberdayaan ekonomi di pulau Madura pada dasarnya membutuhkan perhatian dari banyak pihak, utamanya pemerintah, lembaga pendidikan, peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para Ulama', tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, maupun lembaga-lembaga yang lain ikut semangat membangun kesejahteraan masyarakat Madura secara bersama-sama. Organisasi memiliki peran penting dalam mendukung perempuan, laki-laki dan rumah tangga, serta berharap mereka mendapatkan kesejahteraan. Organisasi dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat seperti layanan konseling dan dukungan, peningkatan kesadaran dan advokasi, bantuan hukum dan keuangan mikro. Layanan tersebut dapat membantu orang untuk mencapai kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan mereka, serta mengendalikan hidup mereka sendiri dan akhirnya menjadi diberdayakan.²²⁶ Di sisi lain, Stromquist²²⁷ telah

²²³ Wijanto, S. "*Structural Equation Modelling* h. 30.

²²⁴ R. Andi Irawan, "Memobilisasi Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 169–82, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/11/7>.

²²⁵ Qodri A. Azizy. "*Melawan Globalisasi*". Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 56.

²²⁶ Vandana Desai, "NGOs, Gender Mainstreaming, and Urban Poor Communities in Mumbai," *Gender and Development* 13, no. 2 (2005): 90–98. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332290>

²²⁷ Teegen, Hildy, Jonathan P. Doh, and Sushil Vachani. "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An

mencatat tiga fungsi utama organisasi masyarakat seperti, pemberian layanan kesejahteraan, keterampilan dasar, penyediaan pendidikan seperti keterampilan dasar dan analisis lingkungan sosial yang sering kritis. Organisasi dengan berbagai relasinya bisa menghasilkan produk pemberdayaan bagi kaum miskin,²²⁸ khususnya perempuan miskin, melalui kombinasi kredit mikro, peningkatan kesadaran, pelatihan untuk anggota kelompok, dan layanan sosial lainnya.²²⁹

Tiga lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, BMT NU dan BMT UGT Sidogiri masing-masing memiliki relasi tersendiri, baik dari tokoh masyarakat, Kiyai, Ibu Nyai, ataupun dari pengusaha sesama mikro. Sebagaimana hasil wawancara Peneliti dengan pihak pengelola BMT UGT Sidogiri:

*"Mun kerjasama di cabang Pamekasan secara khusus sobung, genikah merupakan wewenang pengurus pusat membangun kerjasama bik berbagai orang, perusahaan, lembaga, organisasi otabeh komunitas. Tapeh mun setingkat cabang mun ghun promosi produk BMT ghi lebet tokoh masyarakat sekitar, jaringan alumni, keluarga, cakancak sekenal semmak ben media sosial masing pengurus cabang. Soallah BMT Sidogiri mun promosi produk tak nganggu media cetak otabeh lebet televisi."*²³⁰

(Secara khusus kerjasama di cabang Pamekasan tidak ada, hal itu adalah wewenang pengurus pusat BMT Sidogiri, baik dengan perorangan, perusahaan, lembaga, organisasi atau komunitas. Kalau setingkat cabang seperti ini jika ingin memperpromosikan produk BMT cukup dengan lewat tokoh masyarakat yang disegani, jaringan alumni, keluarga, teman dekat dan media sosial dari masing-masing pengurus cabang. Sebab BMT tidak mempromosikan produk lewat media cetak ataupun televisi sebagaimana produk perbankan dll).

Sedangkan salah satu potongan wawancara Peneliti dengan salah satu pengurus Koperasi An-Nisa' Muslimat NU sebagai berikut:

"Kerjasama pasteh bedeh tapeh kerjasama mun edhinnak bedeh setertulis ben bedeh se tak tertulis. Contoh, mun se tertulis a kadhiyeh bik lembaga swadaya masyarakat, perusahaan otabeh badan otonom se bedeh e lingkungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' pamekasan. Mun kerjasama se tak tertulis engak ka e Kiyah, Bu Nyaih, tokoh pengusaha otabeh tokoh

International Business Research Agenda." *Journal of International Business Studies* 35, no. 6 (2004): 463-83. <http://www.jstor.org/stable/3875234>.

²²⁸ Ahmad Suhendi, "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial," *Informasi* 18, No. 2 (1 Juli, 2013): 105-116, <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>

²²⁹ Biswajit Ghosh, "NGOs, Civil Society and Social Reconstruction in Contemporary India," *Journal of Developing Societies* 25, no. 2 (April 1, 2009): 229-52, <https://doi.org/10.1177/0169796X0902500205>.

²³⁰ Wawancara Peneliti di kantor BMT dengan Ust. Abdul Hakki selaku ketua AOSP (Account Officer Simpanan dan Pinjaman) BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tanggal 27 Agustus 2019.

masyarakat se laen ghebey penguatan relasi Koperasi Muslimat kedepannya ben pemberdayaan dek ka anggota Koperasi."²³¹

(Di sini kerjasama pasti ada, hanya saja ada kerjasama yang tertulis da nada yang tidak tertulis. Contoh, kalau kerjasama yang tertulis dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan atau badan otonom di lingkungan nahdatul Ulama'. Kalau kerjasama yang tidak tertulis seperti Kiyai, Bu Nyai, tokoh pengusaha atau tokoh masyarakat sebagai upaya penguatan relasi Koperasi Muslimat ke depannya serta penguatan pemberdayaan ekonomi anggota-anggota Koperasi An-Nisa').

Peneliti juga mewawancara ketua²³² BMT NU terkait cara promosi dan strategi kerjasama dengan berbagai pihak dalam membantu memberdayakan masyarakat sebagai berikut:

"Kerjasama se e bangun bik BMT NU tentonah ampon lebet pengurus pusat secara formal. Deddih e cabang sisa menindaklanjuti hasil kerjasama se deri pusat ghebey relasi delem penguatan lembaga ben pengembangan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dek ka masyarakat tentonah tak bisah mun a jhelen kadhibik, pastenah pagghun bhutoh dek ka lembaga, organisasi otabel LSM se depadeh e visi misi memberdayakan masyarakat bebe."

(Kerjasama yang dibangun oelh BMT NU secara formal sudah diwakili oleh pengurus BMT NU pusat. Di cabang-cabang BMT NU hanya menindaklanjuti hasil kerjasama tersebut dalam hal penguatan relasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi butuh partner secara bersama-sama dalam memberdayakan masyarakat. Contoh seperti lembaga, organisasi atau LSM yang sama visi misinya memberdayakan masyarakat bawah).

Dari potongan wawancara serta pengamatan Peneliti di lapangan, tiga lembaga keuangan mikro syariah di atas membangun relasi organisasi maupun tokoh masyarakat,²³³ masing-masing sebagai sarana promosi produk usaha dan penguatan pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan, pelatihan serta sarana perluasan pasar bagi para pelaku usaha. Sehingga Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dipandang perlu bagi Nahdlatul Ulama' bisa menghasilkan kader-kader militan ahli ekonomi sebagai upaya komitmen organisasi pengayom masyarakat kecil yang digaungkan semenjak awal berdiri. Walaupun secara prinsip-prinsip keorganisasian dan dilengkapi dengan berbagai atribut, seperti lembaga-lembaga

²³¹ Wawancara Peneliti di kantor Koperasi An-Nisa' dengan Siti Maswaini selaku staff Manager Koperasi Cabang Pamekasan tanggal 28 Agustus 2019.

²³² Wawancara Peneliti di kantor BMT NU dengan Muhammad Za'i selaku Kepala Cabang BMT NU Tlanakan Pamekasan tanggal 30 Agustus 2019.

²³³ Peranan tokoh masyarakat lokal yang proaktif dalam hal ini sebagai perwujudan dari pranata sosial. Pranata sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan membutuhkan potensi, sumber, dan stimulan. Tokoh masyarakat lokal yang diwujudkan melalui pranata sosial, bekerja bergotong royong secara efektif dan efisien dilakukan dalam kelompok kerja untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. Apabila pemberdayaan masyarakat dapat terwujud, maka pembangunan kesejahteraan sosial dapat digapai.

yang memiliki arah pada pengembangan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia, tetapi hasil di lapangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diakui kurang mendapatkan perhatian serius jika dibandingkan dengan program-program keagamaan.²³⁴ Karena itu, sekarang sudah saatnya Nahdlatul Ulama' menjelang usia satu abad melakukan evaluasi serius dan menata organisasi secara rapi, serta melakukan seleksi kader yang loyal dan militan, agar cita-cita Nahdlatul ulama' sebagai organisasi sosial keagamaan dapat terealisasi secara sempurna.

2. Pondok Pesantren

Perspektif para pakar tentang pondok pesantren secara mayoritas mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga tradisional yang bergerak dalam bidang pendidikan tradisional yang masih mempertahankan pembelajaran kitab-kitab klasik.²³⁵ Jika kita melihat potensi yang dimiliki oleh pesantren sekarang ini sebagaimana pendapat Azyumardi Azra pesantren saat ini sangat diharapkan tidak lagi sekedar memainkan fungsi tradisionalnya²³⁶ seperti tranmisi, transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama. Pesantren juga harus menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan tidak kalah penting juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Maka, dari itulah fungsi pondok pesantren tidak hannya sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama bisa juga dikatakan “Ulama” (*center of excellence*), lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*), tetapi juga diharapkan menjadi lembaga yang dapat melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).²³⁷

Dengan *power* (kekuatan) yang dimiliki pesantren, pesantren mempunyai potensi besar untuk bisa menjadi *role models* (panutan) pemberdayaan bagi ummat terutama dalam bidang ekonomi. Mengimplementasikan pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan dakwah *bil hal* (tindakan) serta melaksanakan

²³⁴ R. Andi Irawan, “Memobilisasi Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 169–82, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/11/7>. Bisa dilihat juga dalam Mahrus El-Mawa dkk. “20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU”. Cet I. (Jakarta: Lakpesdam NU, 2005), 56.

²³⁵ Arief Subhan. “*Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*.” (Jakarta: Kencana, 2012), 189. Lihat juga dalam Oman Fathurahman, “Jaringan Ulama: Pembaharuan Dan Rekonsiliasi Dalam Tradisi Intelektual Islam Di Dunia Melayu-Indonesia,” *Studia Islamika* 11, no. 2 (2004): 361–85, <https://doi.org/10.15408/sdi.v11i2.606>.

²³⁶ Azyumardi Azra. “*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*.” (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

²³⁷ Amin Haidari, dkk. “*Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*.” (Jakarta: IRD Press, 2004), 193-194.

ilmu-ilmu yang diajarkan secara kongkrit. Memenuhi kegiatan ekonomi adalah amanah Allah SWT²³⁸ sebagaimana dalam firman-Nya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)

Aplikasi kesejahteraan di dunia harus sesuai yang diajarkan oleh Islam, yaitu jauh dari saling mendzolimi atau mengeksploitasi ekonomi.²³⁹ Harus berkeadilan, jujur serta memikirkan kesejahteraan rakyat yang masih jauh dari kesejahteraan.²⁴⁰ Konsep Islam tersebut seharusnya menjadi pijakan pesantren untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, membimbing dan mendampingi ummat. Dengan demikian status harta secara *de jure* yang menjadi milik manusia menghasilkan hubungan yang seimbang antara manusia dengan Allah SWT memiliki implikasi.²⁴¹ Melihat hal tersebut sebenarnya pesantren mempunyai kekuatan yang bisa dimanfaatkan pesantren untuk melakukan pemberdayaan dalam ekonomi kerakyatan. Pesantren yang secara langsung bersentuhan dengan umat bisa menjadi media pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Pengaruh pondok pesantren kepada para santri, alumni, simpatisan serta masyarakat sekitar memberikan rasa empati kepada sesama agar senantiasa memperhatikan lingkungan sosial.²⁴² Pesantren mengenalkan pasal-pasal *mu’amalah* (interaksi sosial) sebagai modifikasi perekonomian secara lengkap dan terperinci.²⁴³ Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat

²³⁸ Muh. Syafi’I Antonio. “Bank Syari’ah dari Teori ke Paraktek”. (Jakarta, Gema Insani, 2001), 143. Lihat juga dalam Yusuf Qardhawi. “*Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*.” (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 24.

²³⁹ A. Qodri Azizy. “*Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*.” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25.

²⁴⁰ Al-Bahi. “*Manhaj Al-Qur’an fi Tawtir al-Mujtama’*.” (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 157.

²⁴¹ Mohammad Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* VI, No. 1 (2015): 37–56, <https://doi.org/DOI:10.21580/economica.2015.6.1.785>.

²⁴² Abd A’la. “*Pengembangan Metodologi pemahaman Keagamaan*.” Makalah disampaikan dalam Mukhtar Pemikiran Islam di Lingkungan NU, Sukorejo, PBNU, 3-5 Oktober 2003, 4.

²⁴³ Sahal Mahfudz. “*Nuansa Fiqh Sosial*.” (Yogyakarta: LKiS, 1994), 151.

pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren yang tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.²⁴⁴ Semangat pondok pesantren memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memasukkan kurikulum keterampilan,²⁴⁵ usaha kreatif dll untuk bekal para santri di kemudian hari.

Aspek lain signifikansi pelibatan pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, berpeluang pada kenyataan bahwa masyarakat Madura yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya berada di daerah pedesaan. Pada posisi tersebut, pondok pesantren yang pada kenyataannya memang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan,²⁴⁶ merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan. Secara tidak langsung masyarakat sekitar mengapresiasi usaha pesantren melakukan pemberdayaan ekonomi kepada mereka, disebabkan juga kharismatik yang dimiliki oleh pimpinan pesantren sebagai tokoh masyarakat.²⁴⁷

Kharismatik seorang Kiyai berpengaruh besar terhadap keputusan masyarakat bawah di pulau Madura untuk menggunakan lembaga pembiayaan mikro syariah. Sebagaimana Peneliti dapatkan dari petikan wawancara dengan pengelola BMT dan beberapa anggotanya.

*“Jet mun BMT Sidogiri tak ngangguy sponsor engak ran Koran otabel engak e televisi-televisi. BMT Sidogiri e delem a berrik oning dek ka masyarakat ngangguy media sosial, ben jaringan alumni se pon menyebar bedeh e man kakman e Madhureh. E madhureh tokoh masyarakat ben e Kiyah se ngaghungih pesantren rata-rata alumni Sidogiri. Deddih dek ka masyarakat tentang info-info seputar BMT bisah lekas depak ben a berrik pengaruh dek ka reng orang gebey nyobak produk-produk keuangan BMT. Sebab Kiyah mun e Madhureh lebbhi sakteh deri Bupati, Kepala Dhisah, Rektor sekalipun sadhejeh pagghun torok ocak dek ka bhu dhhunah Kiyah. Napah pole a dhebu ka treh santreh, sadhejeh wali santri ben simpatisan pagghun kabenyaan ta’dzim ben torok ocak dek ka Kiyah.”*²⁴⁸

²⁴⁴ Achmad Zaini. “Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education.” (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 126.

²⁴⁵ Abdurrahman Wahid. “Prisma Pemikiran Gus Dur.” (Yogyakarta: LKiS, 1999), 114.

²⁴⁶ Usman Sunyoto. “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 38.

²⁴⁷ Huub de Jonge. “Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi.” (Jakarta: Gramedia, 1989), 242-244.

²⁴⁸ Wawancara Peneliti di Kantor BMT dengan Ust. Abdul Hakki selaku ketua AOSP (Account Officer Simpanan dan Pinjaman) BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan tanggal 27 Agustus 2019.

(BMT Sidogiri memang tidak memakai sponsor melalui Koran ataupun televisi dalam memberikan informasi seputar keberadaan dan produk dari BMT. Akan tetapi pemberitahuan seputar BMT Sidogiri melalui media sosial masing-masing pengurus BMT dan jaringan alumni pesantren yang telah tersebar secara merata di seluruh pelosok Madura. Perlu diingat bahwa para Kiyai yang memiliki pesantren di Madura rata-rata alumni pesantren Sidogiri. Jadi informasi tentang BMT berikut produknya dapat banyak diketahui masyarakat luas dipengaruhi oleh kata-kata Kiyai. Sebab para Kiyai di pulau Madura kata-katanya lebih sakti daripada Bupati, Kepala Desa atau Rektor sekalipun masyarakat tetap lebih tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Kiyai. Kiyai memberikan intruksi kepada santri saja, wali santri dan simpatisan akan juga tunduk kepada apa yang disampaikan oleh beliau).

Peneliti juga berhasil mewawancara salah satu anggota BMT yang ternyata alumni dari salah satu pesantren di Madura sebagai berikut:

*"Abdhinah oning dek ka BMT kakkintosh deri bhu debhunah Kiyah abdhinah, sabeb abdhinah mantan kabhulenah Kiyah sabbenah, segghut e kon pakon nyupir beliau sareng keluarga dhelem selaen. Kiyah sering a debhu dek masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan, pemberdayaan msayarakat kenek ben peningkatan ekonomi e jeman mangken. Polanah samangken dhebunah beliau dibutuhkan orang se inovatif ben kreatif e dunia usaha, alumni pesantren benni pas deddih kiyah kabbhi otabel ustadz kabbhi. Pesantren ghun a bhentoh mendidik ben mencetak kader-kader bangsa se beghus, sesuai tuntunan al-Qur'an ben'hadits. Deddih napak beih lulus deri pesantren kor tetep berjiwa santreh, makle tetep bisah mengembangkan diri sesuai passion masing-masing berlandaskan kebaikan ben nilai-nilai keIslaman. Delem hal ekonomi kiyah segghut a dhbeu dek ka santreh ben masyarakat mun bisah mun a usaha ponapak beih ngangguy produk-produk keuangan se halal ben sejeu deri riba a kadhiyeh BMT otabel koperasi se syariah, makle hasel usahana berkah ben odiknah selamat dunyah akhirat."*²⁴⁹

(Saya mengetahui BMT dari penyampaian Kiyai saya, sebab saya dulu mantan *khadam* Kiyai juga. Saya sering diminta jadi supir beliau dan keluarga. Kiyai sering menyampaikan nasehat kepada masyarakat ketika diminta mengisi pengajian tentang pentingnya kesejahteraan dalam keluarga, pemberdayaan masyarakat kecil dan peningkatan ekonomi di zaman sekarang. Zaman sekarang kata beliau sangat dibutuhkan orang yang inovatif serta kreatif di dunia usaha, lulus dari pesantren salah bila menjadi ulama atau ustadz semua. Akan tetapi pesantren hanya membantu mendidik dan mencetak kader-kader bangsa yang baik sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Punya pekerjaan atau punya cita-cita apapun itu kalau sudah lulus dari pesantren harus tetap berjiwa santri, dipersilahkan mengembangkan diri sesuai *passion* masing-masing tapi wajib berlandaskan kebaikan, kemaslahatan dan nilai-nilai keIslaman. Dalam hal

²⁴⁹ Wawancara Peneliti dengan Bapak Moh. Renaldi salah satu anggota dari BMT yang Peneliti jadikan obyek penelitian pada tanggal 02 September 2019 di rumah Bapak Moh. Renaldi Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

ekonomi Kiyai sering menyampaikan kepada para santri dan masyarakat luas dalam berusaha ditekankan memakai jasa lembaga keuangan yang halal dan jauh dari riba, seperti produk pembiayaan dll dari BMT atau koperasi syariah agar supaya hasil usahanya berkah serta kehidupannya selamat di dunia maupun di akhirat kelak).

Kiyai adalah aktor utama dalam hubungan Negara-masyarakat di pulau Madura. Kiyai merupakan perantara sosial, politik, ekonomi, dan budaya,²⁵⁰ serta gelar bangsawan Madura²⁵¹ memiliki fungsi yang berkontribusi dengan caranya sendiri dalam dinamika masyarakat Madura. Peneliti juga sependapat sebagaimana pandangan Elly Touwen-Bouwsma, di tingkat desa pulau Madura dukungan Kiyai adalah kunci untuk melibatkan penduduk desa dalam pelaksanaan program pemerintah dan pemberdayaan ekonomi.²⁵²

3. Pemberdayaan dan Pendampingan

Strategi pemberdayaan dari tiga *Bayt al-Maal wat Tamwil* yang menjadi obyek penelitian berbeda-beda, Peneliti menemukan strategi dan konsep pendampingan kepada masyarakat kecil di pulau Madura oleh salah satu BMT memberikan efek penguatan jiwa kewirausahaan serta semangat memperbaiki taraf hidup keluarga. Hal tersebut dilakukan oleh Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, Koperasi rutin memberikan pendampingan serta pemberdayaan ekonomi kepada para anggota melalui workshop, seminar dan pelatihan usaha untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha yang terdaftar sebagai anggota Koperasi. Pendampingan diberikan oleh pihak Koperasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya bergerak pada bidang keuntungan (laba), tetapi juga pada sosial (nirlaba) seperti pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat kecil.

Strategi pemberdayaan dan model pemberdayaan Koperasi An-Nisa' sejalan dengan pemikiran Suharto²⁵³ bahwa pemberdayaan melalui 5 (lima) "P" yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. *Pemungkinan*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang

²⁵⁰ Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (June 15, 2013): 1–32, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.51.1.1-32>.

²⁵¹ Zainalfattah. "*Sedjarah Tjaranya Pemerintahan di Daerah-daerah di Kepulauan Madura dengan Hubungannya*." (Pamekasan: The Paragon Press, 1951), 68–69.

²⁵² Elly Touwen-Bouwsma. "*The Ulama of Madura: Rise and Expansion of a Religious Regime*," in Mart Bax, Peter Kloos and Adrianus Koster (ed.). "*Faith and Polity on Religion and Politics*." (Amsterdam: VU University Press, 1992), 100.

²⁵³ Edi Suharto. "*Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*." (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997), 218–219.

menghambat perbaikan taraf hidup keluarga.²⁵⁴ *Penguatan*, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.²⁵⁵ *Perlindungan*, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah,²⁵⁶ dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.²⁵⁷ *Penyokongan*, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.²⁵⁸ *Pemeliharaan*, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.²⁵⁹

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Silkhondze, orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya

²⁵⁴ Stefanie Chambers, "Minority Empowerment and Environmental Justice," *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28–54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.

²⁵⁵ Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, "Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment," in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 75–96, https://doi.org/10.1057/9781137372697_7.

²⁵⁶ Md Mahmudul Alam, Salwana Hassan, and Jamaliah Said, "Performance of Islamic Microcredit in Perspective of Maqasid Al-Shariah: A Case Study on Amanah Ikhtiar Malaysia," *Humanomics* 31, no. 4 (November 9, 2015): 374–84, <https://doi.org/10.1108/H-12-2014-0072>.

²⁵⁷ M. Umer Chapra, *"The Economic System of Islam"*. (Lahore: Oxford University Press, 1970), 4. Lihat juga dalam Lauren Gurrieri et al., "Social Marketing and Social Movements: Creating Inclusive Social Change Coalitions," *Journal of Social Marketing* 8, no. 4 (August 8, 2018): 354–77, <https://doi.org/10.1108/JSOCM-12-2016-0078>.

²⁵⁸ Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, "The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution," *Humanomics* 31, no. 2 (May 11, 2015): 160–82, <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.

²⁵⁹ Halima Begum et al., "Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach," *Journal of Economic and Administrative Sciences*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0007>.

berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok.²⁶⁰ Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* serta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampaian informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat lebih dominan. Pemberdayaan tanpa pendampingan tidak akan bisa menghasilkan pribadi-pribadi inovatif, kreatif, imajinatif dan visioner.

Pendampingan usaha sangat diperlukan bagi anggota-anggota lembaga keuangan mikro syariah, efektifitas kegiatan pendampingan memberikan kesadaran diri dalam memiliki jiwa-jiwa *entrepreneurship* dan perorganisasian dengan baik. Hal ini tergambar dari hasil wawancara Peneliti dengan pengelola dan anggota Koperasi An-Nisa' Muslimat NU. Jumaningyati salah satu anggota Koperasi An-Nisa' Muslimat NU mengatakan kepada Peneliti:

*"E koperasi An-Nisa' abdhinah ampon bek abit deddih anggota, ampon korang lebbhi enem sampek pettong taonan kakkdintoh. Selama deddih anggota abdhinah norok pelatihan ben semacemmah jughenan bek segghut, soallah bisah olle elmuh ben inovasi usaha se terbaru ben canggih. Kakkdintoh mungkin caepon abdhinah Koperasi An-Nisa' terro anggotanah bisah mandiri, kreatif, inovatif ben bisah ma beghus dek ka keadaan keluarga. Deddih mun pon usaha bek macet ben bedeh kendala bisah olle solusi deri elmuh se ka olle deri pelatihan. Pasteh pengalaman se deri pelatihan bisah e praktek aghi sesuai arah se pon e berrik sareng pembicara. Mun ghik posang anggota bisah ngubhungih pihak Koperasi ben e bhentoh dihubungkan dek ka pembicara untuk bhisah a bhentoh a bombing."*²⁶¹

(Saya menjadi anggota koperasi An-Nisa' sudah cukup lama, kurang lebih sekitar enam sampai tujuh tahun. Selama menjadi anggota Koperasi, saya sering mengikuti berbagai macam pelatihan dll, soalnya bisa mendapatkan ilmu, pengalaman serta inovasi usaha yang terbaru dan canggih. Menurut saya Koperasi An-Nisa' Muslimat NU Pamekasan tidak hannya memberikan akses keuangan tapi juga menciptakan anggota Koperasi yang mandiri, kreatif, inovatif dan bisa memperbaiki taraf kesejahteraan keluarga masing-masing. Jadi, bila terjadi kendala usaha bisa mencoba solusi yang didapatkan dari pembicara pelatihan dll yang sudah pengalaman di bidangnya. Kalau masih bingungpun dalam menghadapi kedala usaha, anggota bisa menghubungi pihak koperasi dan dibantu dihubungkan langsung dengan pembicara atau *stakeholder* yang terkait untuk mendapatkan bimbingan)

²⁶⁰ Sikhondze, Wilson B. "The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland". *Adult Education and Development* No. 53 (1999), Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn: 112/DW.

²⁶¹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Jumaningyati salah satu anggota dari Koperasi An-Nisa' Muslimat NU pada tanggal 03 September 2019 di rumah Ibu Jumaningyati Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Keterangan wawancara pemberdayaan dan pendampingan kepada anggota Koperasi juga didapatkan dari Staff Manager Koperasi An-Nisa' Muslimat NU:

"Pendampingan deri koperasi jet ampon e padeddih agenda rutin, setiyap 2 otabeh 3 bulen sakalean pasteh bedeh pelatihan, seminar, workshop ben semacemmah se bisah menunjang dek ka usahanah para anggota koperasi. Sebeb epon koperasi ngaghungih agenda a kadhiyeh kaktintah makle bisah a berrik efek positif dek usaha se ampon e kembang aghi sareng para anggota lebih lagi e tamben inovasi ben kreasi se engak samangken. Serah oning dari hasil pelatihan se pabede'aghi sareng koperasi bisah deddih konsep se sukses diterapkan oleh para anggota selaku pelaku usaha. Koperasi kaktintah ghun deddih fasilitator se bisah a bhentoh ka bhuto'nah para anggota koperasi, polanah kaktintah jughenan deddih agenda besar yang pernah dicita-citakan bik para pendiri Nahdlatul Ulama' ben Ibu-Ibu Nyai seppo se ampon berjuang e muslimat NU. Koperasi jughenan bisah a fasilitasi para anggota se aktif norok pelatihan, seminar ben workshop mun bhutoh bimbingan langsung deri pematari otbeh pembicara bisah langsung e bhentoh dihubungkan selama pembicara se ahli delem bidangnya bisah a berrik bimbingan. Mun bedeh anggota se usahanah ngalami kendalah pas kawajibnah macet, koperasi bisah jughen a berrik keringanan a ropa'aghi tabe'en bhektoh tanpa tambe'en biaya. Mangkanah cek ngarebbeh pengurus koperasi dek ka anggota kaktintah bisah norok aktif pelatiha, seminar, workshop ben semacemmah sopajhe'eh bisah ngembang aghi usahanah ben nemmuh solusi e setiap masalah-masalah usahanah."²⁶²

(Pendampingan yang diadakan melalui pelatihan, seminar atau workshop oleh pihak koperasi, merupakan agenda rutin di setiap dua atau tiga bulan sekali agar bisa menunjang kepada pengembangan usaha para anggota. Maka dengan itu koperasi mengadakan kegiatan seperti hal tersebut bisa memberikan efek positif terhadap usaha-usaha yang telah berhasil dikembangkan oleh para anggota dengan lebih baik lagi disertai inovasi dan kreasi kekinian. Siapa tau hasil dari hasil pelatiha, seminar ben workshop bisa menjadi konsep sukses dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan oleh koperasi benar-benar membantu kebutuhan para anggota. Sebab memberdayakan para kaum perempuan menjadi agenda besar dari yang pernah dicita-citakan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama' serta Para Ibu Nyai Sesepeh yang sudah lama berjuang untuk Muslimat NU. Koperasi juga bisa memberikan fasilitas yang aktif mengikuti pelatihan jika membutuhkan bimbingan langsung dari pembicara yang memang ahli di bidangnya akan dibantu dihubungkan oleh koperasi. Jikalau ada usaha anggota yang mengalami kendala dan kewajibannya kepada koperasi tersendat, maka koperasi juga memberikan keringanan berupa tambahan waktu tanpa disertai denda atau biaya tambahan sampai batas waktu yang telah dimusyawarahkan oleh pengurus dan anggota yang bersangkutan. Makanya, pihak koperasi sangat mengharapkan kepada para anggota untuk turut aktif dalam pelatihan, seminar

²⁶² Wawancara Peneliti di kantor Koperasi An-Nisa' dengan Siti Maswaini selaku Staff Manager Koperasi Cabang Pamekasan tanggal 28 Agustus 2019.

dan workshop biar terus bisa mengembangkan usahanya serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya).

Berbeda lain dengan BMT NU dan BMT Sidogiri, keduanya dalam mendampingi usaha yang dikembangkan oleh para anggota BMT hanya dengan melalui pendekatan-pendekatan persuasif jika anggota BMT dirasa mengalami masalah yang mengakibatkan masalah juga dalam hal kewajiban kepada BMT, itupun dilakukan pendampingan oleh pihak BMT sendiri tanpa didampingi oleh orang yang kompeten dalam bidang usaha yang digeluti oleh anggota. Sebagaimana pengamatan Peneliti pada tiga obyek penelitian tersebut, model pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa' Muslimat NU lebih banyak diharapkan dan lebih relevan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah daripada pendampingan persuasif hanya dilakukan ketika mengalami kendala pembayaran kewajiban kepada BMT.²⁶³ Pemberdayaan dan pendampingan harus diintegrasikan melalui proses yang benar yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung.²⁶⁴

Kegiatan pemberdayaan dan pendampingan sejalan dengan definisi istilah BMT yang memiliki dua fungsi, yaitu sosial (nirlaba) dan profit (laba).²⁶⁵ Pelibatan masyarakat secara langsung merupakan menjadi faktor pemberdayaan dalam upaya melakukan pendampingan, pembinaan serta dapat menumbuhkan sifat kreatif dalam diri anggota BMT atau Koperasi.²⁶⁶ Pemberdayaan merupakan alat menuju kesejahteraan, dalam artian pemberdayaan kepada individu atau kelompok usaha yang dilakukan oleh yang punya kemampuan.²⁶⁷ Akan tetapi

²⁶³ Model Pendampingan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk partisipatif dalam upaya memberikan upaya-upaya solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Aspek-aspek utama yang diberikan dalam pendampingan terkait perubahan karakter agar memiliki pola pikir yang maju sehingga mandiri serta wawasan keilmuan untuk mencapai kesejahteraan. Seperti contoh: 1) Penguatan spiritual sebagai pembinaan karakter dalam upaya memperkuat keimanan. Tujuan dari pembinaan spiritual adalah menanamkan kejujuran, tawakkal, berusaha merubah keadaan ke arah yang lebih baik, 2) Peningkatan wawasan keilmuan, berkaitan dengan upaya-upaya pengaturan keuangan khususnya ekonomi rumah tangga serta meningkatkan pendapatan, 3) Monitoring dan evaluasi, dalam program pemberdayaan keduanya adalah langkah untuk melihat tingkat keberhasilan sebuah program pemberdayaan. Tiga model pendampingan tersebut menjadi kendaraan dalam rangka pemenuhan pemberdayaan masyarakat. Lihat juga dalam N.Oneng Nurul Bariyah. "*Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*." (Jakarta: Wahana Kardofa, 2012), 223.

²⁶⁴ Izza Mafrihah. "*Multidimensi Kemiskinan*." (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009), 171.

²⁶⁵ Obaidullah, Mohammed & Shirazi, Nasim. *IRTI Islamic Social Finance Report 2017*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26825.44645>.

²⁶⁶ Hartomi Maulana, Dzuljastri Abdul Razak, and Adewale Abideen Adeyemi, "Factors Influencing Behaviour to Participate in Islamic Microfinance," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, April 16, 2018, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0134>.

²⁶⁷ Jim Ife. "*Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*." (Australia: Longman, 1995), 61.

pendampingan tidak kalah pentingnya dari pemberdayaan sebagai alat kesejahteraan, alat tanpa kendaraan tidak bisa terlaksana secara baik. Maka kendaraan dari keberhasilan usaha adalah pendampingan. Sehingga keduanya berkesinambungan dalam menghasilkan 3 (tiga) aspek:²⁶⁸

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), bebas dari kebodohan dan kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya.
- c. Berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Tidak cukup mengandalkan lembaga keuangan mikro syariah, tetapi juga harus melibatkan instansi-instansi terkait dalam hal pemberdayaan, pendampingan, pembinaan dll untuk lebih cepat menciptakan keberhasilan iklim usaha skala usaha mikro. Berikut pada tabel 4.6 Peneliti mengidentifikasi analisis kebutuhan pemberdayaan dan pendampingan bagi UMKM dari berbagai *stakeholder* di pulau Madura.

Tabel: 4.6
Analisis Kebutuhan Pemberdayaan dan Pendampingan Bagi UMKM Dari Berbagai *Stakeholder* di Pulau Madura

NO	KEBUTUHAN PEMBELAJARAN	KEBUTUHAN LEMBAGA DAN ANGGOTA SEKARANG	
		INSTITUSI	KEGIATAN
1	Kemampuan Managemen	Disperindag dan PKM Perguruan tinggi LSM Disnaker Diskop UMKM	Pelatihan Pembinaan Pengabdian Masyarakat Bimbingan usaha Kursus Magang Workshop
2	Kemampuan Teknologi	Disperindag dan PKM Perguruan tinggi LSM Sekolah kejuruan, Disnaker	Pelatihan Pembinaan Pengabdian Masyarakat Bimbingan usaha Kursus Magang
3	Pengetahuan Permodalan	Disperindag dan Diskop UMKM	Pembinaan Pelatihan

²⁶⁸ Edi Suharto. “Membangun Masyarakat Membangun Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.” (Bandung: Refika Aditama, 2006), 58.

4	Pengembangan Pemasaran	Disperindag	Pembinaan organisasi Pendaftaram Perizinan Pembinaan niaga Kemitraan Pembinaan Koperasi
5	Peningkatan Kewirausahaan	Disperindagkop Diskop UMKM Perguruan tinggi LSM Disnaker	Pelatihan-pelatihan
6	Layanan Permodalan	Perbankan BUMN	Promosi pinjaman Modal terkait proyek
7	Pengelolaan Resiko	Diskop UMKM	Pelatihan Pembinaan Bimbingan usaha

Analisis kebutuhan pemberdayaan dan pendampingan di atas menjadi solusi bersama terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk juga kepada tiga lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang Peneliti jadikan obyek penelitian saat ini untuk terus melakukan pendampingan dan bermitra dengan para *stakeholders* terkait agar mendapatkan hasil maksimal dalam melakukan pemberdayaan serta pendampingan kepada para anggota. Pada tabel 4.7 Peneliti juga melakukan pemetaan pemberdayaan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh tiga obyek penelitian.

Tabel. 4.7.

Peta Pemberdayaan dan Pendampingan Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Pulau Madura

NO	NAMA LKMS	KEGIATAN	
		PEMBERDAYAAN	PENDAMPINGAN
1	Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU	1. Memberikan akses pembiayaan murah kepada masyarakat kecil	1. Pelatihan 2. Pembinaan 3. Bimbingan Usaha 4. Seminar 5. Workshop
2	BMT NU	1. Memberikan akses pembiayaan murah kepada masyarakat kecil 2. Menyediakan produk simpanan saling menguntungkan	1. Memberikan tawaran solusi bila terjadi masalah atau kendala usaha

		3. Menyediakan produk jasa yang terpercaya	
3	BMT Sidogiri	1. Memberikan akses pembiayaan murah kepada masyarakat kecil 2. Menyediakan produk simpanan saling menguntungkan 3. Menyediakan produk jasa yang terpercaya	1. Memberikan tawaran solusi bila terjadi masalah atau kendala usaha

4. Produk Layanan

Produk layanan pada tiga lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura berbeda-beda, mereka membuat produk berdasarkan kebutuhan segmentasi pasar wilayahnya masing-masing, baik yang produktif maupun konsumtif. Beragamnya penyediaan produk layanan yang disediakan, memudahkan para anggota untuk memilih dan menggunakan produk layanan mana yang dapat membantu kebutuhan mereka dalam berusaha. Berikut Peneliti berikan rincian tabel 4.8, 4.9 dan 4.10 produk layanan tiga lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura.

a. Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

Tabel: 4.8

Produk Layanan Koperasi An-Nisa' IX Muslimat NU

NO	PRODUK LAYANAN	JENIS PRODUK	KETERANGAN
1	Pembiayaan	<i>Qardul Hasan</i>	Pembiayaan dengan tanpa mengambil keuntungan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan.
2	Simpanan	<i>Musyarakah</i>	Simpanan dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela memakai akad <i>Musyarakah</i> dengan bagi hasil Anggota 30% dan Koperasi 70%
3	Jasa	Pembayaran Tagihan PLN/BPJS, Telephone, Pulsa dll.	

b. BMT NU

Tabel: 4.9

Produk Layanan BMT NU

NO	PRODUK LAYANAN	JENIS PRODUK	KETERANGAN
1	Pembiayaan	<i>Al-Qardul Hasan</i>	Pembiayaan dengan jasa

			seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo
		Murabahah dan <i>Bai' Bitsamanil Ajil</i>	Pembiayaan dengan pola jual beli barang dengan harga jual sesuai kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (<i>Bai' Bitsamanil Ajil</i>) dan atau cash tempo (<i>Murabahah</i>)
		<i>Mudlarabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan atau sebagian modal kerja dengan pola bagi hasil. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan dan cash tempo.
		<i>Rahn</i>	Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan bisa perpanjang maksimal 3 kali.
		LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)	Merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.
		Hidup Sehati	Pembiayaan Hidup Sehat Islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/toilet/kamar mandi dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad <i>Murabahah</i> .
2	Simpanan	SIAGA (Simpanan Anggota)	Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad <i>Musyarakah</i> .
		SIDIK FATHONAH (Simpanan	Simpanan bagi yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi

		Pendidikan Fathonah)	hasil 45 %. Menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .
		SAJADAH (Simpanan Berjangka <i>Wadi'ah</i> Berhadiah)	Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad <i>Wadiah Yad Al-Dhamanah</i> .
		SIBERKAH (Simpanan Berjangka <i>Mudharabah</i>)	Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> . Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun.
		SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)	Simpanan yang dapat mempermudah menunaikan haji dan umrah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> setoran awal minimal RP. 1.000.000 dan selanjutnya setoran sesuai kemampuan.
		SABAR (Simpanan Lebaran)	Simpanan untuk memenuhi kebutuhan lebaran dengan keuntungan dari bagi hasil 55%. Menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000.
		TABAH (Tabungan <i>Mudharabah</i>)	Simpanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran/penarikan kapan saja dan memperoleh bagi hasil 40%. Menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> .
		TARAWI (Tabungan Ukhrawi)	Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dengan menggunakan akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> . Setoran awal Rp. 25.000 selanjutnya minimal Rp. 5.000 dengan bagi hasil 50%.
3	Jasa	Trasfer/Kiriman Antar Bank Dalam & Luar Negeri.	
		Pendaftaran Haji dan Umrah.	
		Pembayaran Tagihan PLN/BPJS, Telephone, Pulsa dll.	
		Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi.	

c. BMT UGT Sidogiri

Tabel: 4.10

Produk Layanan BMT UGT Sidogiri

NO	PRODUK LAYANAN	JENIS PRODUK	KETERANGAN
1	Pembiayaan	UGT GES (Gadai Emas Syariah)	Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.
		UGT MUB (Modal Usaha Barokah)	Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.
		UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)	Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
		UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)	Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.
		UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)	Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.
		UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)	Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomo seat porsi haji.
2	Simpanan	Tabungan Umum Syariah	Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT.
		Tabungan Haji Al-Haromain	Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 50% anggota: 50% BMT.
		Tabungan Umrah Al-Hasanah	Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan

			anggota melaksanakan ibadah umroh. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.
		Tabungan Idul Fitri	Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.
		Tabungan Lembaga Peduli Siswa	Tabungan umum yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.
		Tabungan Qurban	Tabungan umum untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.
		Tabungan Tarbiyah	Tabungan umum untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (instalment) dan dilengkapi dengan asuransi. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT.
		Tabungan Mudharabah Berjangka	Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah beragam.
		Tabungan MDA Berjangka Plus	Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Menggunakan akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> dengan nisbah 45% anggota: 55% BMT.

3	Jasa	Trasfer/Kiriman Antar Bank Dalam & Luar Negeri.
		Pendaftaran Haji dan Umrah.
		Pembayaran Tagihan PLN/BPJS, Telephone, Pulsa dll.
		Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi.

Hasil produk layanan dari masing-masing lembaga dapat dianalisa bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan maka, semakin banyak memberikan pilihan kepada para anggota untuk dapat memilih produk mana yang bisa menjawab serta memenuhi kebutuhan keuangan usaha. Tentunya wajib diimbangi dengan pelayanan dan infrastruktur yang memudahkan bagi anggota untuk selanjutnya, disesuaikan terhadap perkembangan zaman.

BAGIAN LIMA PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang telah diuraikan oleh Peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, strategi gerakan sosial yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura mencakup 4 (empat) elemen: 1) Membangun militansi organisasi dan tokoh masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, BMT NU dan BMT UGT Sidogiri masing-masing memiliki relasi tersendiri, baik dari tokoh masyarakat, Kiyai, Ibu Nyai, ataupun dari pengusaha sesama mikro. Ketiganya membangun relasi organisasi maupun tokoh masyarakat, masing-masing sebagai sarana promosi produk usaha dan penguatan pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan, pelatihan serta sarana perluasan pasar bagi para pelaku usaha. Sehingga Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dipandang perlu bagi Nahdlatul Ulama' bisa menghasilkan kader-kader militan ahli ekonomi sebagai upaya komitmen organisasi pengayom masyarakat kecil yang digaungkan semenjak awal berdiri. 2) Jaringan Pondok Pesantren. Pengaruh pondok pesantren kepada para santri, alumni, simpatisan serta masyarakat sekitar memberikan rasa empati kepada sesama agar senantiasa memperhatikan lingkungan sosial. Pondok pesantren mengenalkan pasal-pasal *mu'amalah* (interaksi sosial) sebagai modifikasi perekonomian secara lengkap dan terperinci. Pondok pesantren dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran pesantren bagi pemangku kebijakan lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura yang sama-sama memiliki pandangan sama terhadap pemberdayaan bagi masyarakat kecil. 3) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan. Dari tiga *Bayt al-Maal wat Tamwil* yang menjadi obyek penelitian berbeda-beda dari segi pemberdayaan dan pendampingan, Peneliti menemukan strategi dan konsep pendampingan kepada masyarakat kecil di pulau Madura oleh salah satu BMT memberikan efek penguatan jiwa kewirausahaan serta semangat memperbaiki taraf hidup keluarga. Hal tersebut dilakukan oleh Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, Koperasi rutin memberikan pendampingan serta pemberdayaan ekonomi kepada para anggota melalui workshop, seminar dan pelatihan usaha untuk mengembangkan usaha para pelaku usaha yang terdaftar sebagai anggota Koperasi. Berbeda lain dengan BMT NU dan BMT Sidogiri, keduanya dalam mendampingi usaha yang dikembangkan oleh para anggota BMT hanya dengan melalui pendekatan-pendekatan persuasif jika anggota BMT dirasa mengalami masalah yang mengakibatkan masalah juga dalam hal kewajiban kepada BMT, itupun dilakukam pendampingan oleh pihak BMT sendiri tanpa didampingi oleh

orang yang kompeten dalam bidang uaha yang digeluti oleh anggota. Sebagaimana pengamatan Peneliti pada tiga obyek penelitian tersebut, model pendampingan yang dilakukan oleh Koperasi An-Nisa' Muslimat NU lebih banyak diharapkan dan lebih relevan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah daripada pendampingan persuasif hanya dilakukan ketika mengalami kendala pembayaran kewajiban kepada BMT. 4) Hasil produk layanan. Produk layanan pada tiga lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura berbeda-beda, mereka membuat produk berdasarkan kebutuhan segmentasi pasar wilayahnya masing-masing, baik yang produktif maupun konsumtif. Beragamnya penyediaan produk layanan yang disediakan, memudahkan para anggota untuk memilih dan menggunakan produk layanan mana yang dapat membantu kebutuhan mereka dalam berusaha. Dan yang menjadi penghambat dari berkembangnya tiga lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi An-Nisa' Muslimat NU, BMT NU dan BMT UGT Sidogiri) yang menjadi obyek penelitian dari Peneliti ialah kurang banyak memiliki inovasi dalam bidang teknologi. Sehingga memperlambat kemudahan pelayanan bagi anggota.

Kedua, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) kepada usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan karena nilai t value = 11,48 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel = 1,96. Pada hasil Hasil Analisis SEM Model *Path Coefficients* variabel Perkembangan UMKM mampu menjelaskan variabel Kesejahteraan sebesar 62% atau bisa juga pengaruh variabel perkembangan UMKM terhadap variabel kesejahteraan sebesar 62% dengan jumlah rata-rata pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000. pada hasil besaran kontribusi indikator bahwa variabel pemberdayaan UMKM (PU) memiliki kontribusi terbesar yang terdapat pada indikator 6 (PU6) dengan bobot nilai 0,93. Sedangkan pada variabel kesejahteraan (KS) terdapat di indikator 13 (KS13) yaitu sebesar 0,87 yaitu terbesar kontribusinya dalam menjelaskan variabel kesejahteraan.

B. Saran-Saran

Dari gerakan sosial pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah di pulau Madura berkerjasama dengan berbagai pihak seperti pesantren, tokoh masyarakat, ormas dll diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Sehingga diperlukan pula saran bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Akademisi dan Praktisi

Model dari penelitian ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan akademisi sebagai tambahan referensi gerakan sosial pemberdayaan ekonomi melalui karya tulis ataupun melalui forum-forum ilmiah.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat diharapkan selalu ikut berpartisipasi aktif mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersinergi dengan lembaga keuangan mikro syariah.

hadirnya pemerintah di berbagai sektor umkm sebagai bentuk pengayoman dan pelayanan kepada para pelaku usaha mikro dan masyarakat dengan menyediakan akses maupun regulasi yang memastikan eksistensi keberadaan lembaga keuangan mikro syariah.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Model dan strategi yang dikembangkan perlu kiranya ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata. Sebab model dan strategi perlu terus diperbaharui dan dimodifikasi sesuai tuntutan zaman agar supaya bisa memberikan hasil sebaik-baiknya. Pemberdayaan menjadi kunci penting bagi lembaga keuangan mikro syariah, mengingat masyarakat Madura yang mengakses keuangan rata-rata masih berpendidikan rendah. Perlu kiranya lembaga intens mengadakan pelatihan, workshop, seminar dll yang sifatnya memberikan pandangan baru kepada para masyarakat utamanya anggota lembaga dalam hal mengembangkan usahanya.

Lembaga keuangan mikro syariah juga harus selalu bisa berinovasi dalam bidang teknologi agar supaya tidak ketinggalan dari teknologi terbaru dalam bidang keuangan atau sering dikenal dengan *Fintech*. Dan agar selalu bisa memberikan pelayanan terbaik serta kemudahan bagi para anggota dalam menggunakan layanan produk yang disediakan oleh lembaga.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian dengan hasil model yang telah dihasilkan oleh Peneliti ini, terutama dalam hal pemberdayaan berikut konsep serta gerakan sosial perlu kiranya dijadikan penelitian lanjutan atau pengembangan penelitian. Agar supaya model penelitian yang telah dihasilkan oleh Peneliti sebelumnya, peneliti selanjutnya terus bisa mengembangkan, menguji atau bahkan memodifikasi yang lebih signifikan terhadap fenomena sosial yang terus berkembang pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Alfred Simba. *"The Role of Microfinance Institutions in Enhancing Women Entrepreneurship: The Case Study of Finca Tanzania, Kinondoni Municipality"*. Master of Business Administration in Finance (MBA) of the Open University of Tanzania, 2013.
- Anthony Giddens, *"Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics"*. Oxford: Balckwel Publishers, 1994.
- A. Qodri Azizy. *"Melawan Globalisasi."* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- A. Qodri Azizy. *"Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam."* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abad Badruzaman. *"Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh"afin dengan Pendekatan Keindonesiaan)." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.*
- Abd A'la. *"Pengembangan Metodologi pemahaman Keagamaan."* Makalah disampaikan dalam Mukhtar Pemikiran Islam di Lingkungan NU, Sukorejo, PBNU, 3-5 Oktober 2003.
- Abdul Muchith Muzadi. *"Mengenal Nahdlatul 'Ulama."* Cet. I. Surabaya: Khalista, 2004.
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Fealy, Greg, Barton, Greg (ed.), *"Tradisional Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara"*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Abdurrahman Wahid. *"Islamku, Islam Anda, Islam Kita"*. Cet. II. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Abdurrahman Wahid. *"Prisma Pemikiran Gus Dur."* Yogyakarta: LKiS, 1999
- Achmad Zaini. *"Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim His Contribution to Muslim Education."* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Ahmad Shibghatullah Mujaddidi. *"Peran Strategis Baitul Maal wat Tamwil Dalam Mengatasi Praktek Rentenir: Studi BMT NU Jawa Timur."* Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.
- Al-Bahi. *"Manhaj Al-Qur'an fi Tawtir al-Mujtama'."* Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

- Al-Ghazali. *"Ihyâ Ulûm al-Dîn."* Juz IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Idonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amin Haidari, dkk. *"Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global."* Jakarta: IRD Press, 2004.
- Anggito Abimanyu. *"Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Umat."* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2000.
- Arief Subhan. *"Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia."* Jakarta: Kencana, 2012.
- Armendáriz, B. and Morduch, J. *"The Economics of Microfinance."* Cambridge: MIT Press, 2010.
- Asghar Ali Engineer. *"Islam dan Pembebasan".* Cet. II. Yogyakarta: LKiS, 2007
- Azyumardi Azra. *"Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia."* Jakarta: Kencana, 2013.
- Bollen, K.A. & Long, J.S. *"Testing Structural Equation Models".* Newbury Park, CA: Sage, 1993.
- Burhan Bungin, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif"*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Charles Tilly, *"Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons"*. New York: Russel Sage Foundation, 1984.
- _____, *"The Handbook of Political Sociology"*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Dadang Juliantara dan Fauzi Noer, *"Menyatakan Keadilan Agraria: Manual Kursus Intensif Untuk Aktivis Pembaruan Agraria"*. Jakarta: BK KPA, 2000.
- David A. Locher, *"Collective Behavior"*. New Jersey: Prentice Hall, 2002.
- Dawam Rahardjo, *"Gerakan Keagamaan dan Civil Society"*. Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: PT. Remaja Posdakarrya, 2003.
- DEKS Bank Indonesia-Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD. *"Usaha Mikro Islam: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah"*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016.
- Dhumale, Rahul, and Amela Sapcanin. *"An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance"*. World Bank, 1998.

- Edi Suharto. *"Membangun Masyarakat Membangun Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial."* Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Edi Suharto. *"Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran."* Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997.
- Elly Touwen-Bouwsma. *"The Ulama of Madura: Rise and Expansion of a Religious Regime,"* in Mart Bax, Peter Kloos and Adrianus Koster (ed.). *"Faith and Polity on Religion and Politics."* Amsterdam: VU University Press, 1992.
- Ghazal M. Zulfiqar. *"Microfinance: A Tool for Financial Access, Poverty Alleviation or Gender Empowerment? Empirical Findings from Pakistan"*. University of Massachusetts Boston, 2013.
- Gills, Barry K. *"Globalization and Politics of Resistance"*. New York: Palgrave, 2000.
- Gunawan Sumodiningrat, *"Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat"*, Edisi II. Jakarta: PT. Bina Row Pariwara, 1997.
- Hair, dkk. *"Multivariate Data Analysis Pearson"*. Pearson Education, 2014.
- Howe, N. and Strauss, W. *"Millennials Rising: The Next Great Generation"*. New York: Vintage Books, 2000.
- Huub de Jonge. *"Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi."* Jakarta: Gramedia, 1989.
- Imam Ghazali. *"Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 19."* Semarang: Undip, 2011.
- _____. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23."* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- _____. and Fuad. *"Structural equation modeling: Teori, konsep, dan aplikasi dengan program Lisrel 8.80."* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Izza Mafruhah. *"Multidimensi Kemiskinan."* Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009.
- Javier Delgado, Ignacio Hernando, and María J. Nieto, "Do European Primarily Internet Banks Show Scale and Experience Efficiencies?," *European Financial Management* 13, no. 4 (2007): 643–71, <https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00377.x>.
- Jhon Friedman, *"Empowerment The Politics of Alternative Development"*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1992.

- Jhon Kenneth Galbraith. *"The Nature Mass Peverty"*. London: Harvard University Press, 1979.
- Jhon W. Creswell, *"Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches"*. USA: Sage Publications, 2009.
- Jim Ife. *"Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice."* Australia: Longman, 1995.
- Kasdi, Aminuddin, *"Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak BTI di Jawa Timur 1960-1965"*. Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Khursyid Ahmad, *"Studies in Islamic Economics"*. Jeddah: The Islamic Foundation and King Abdulaziz University, 1982.
- Khair, Kamal. Lobesh Gupta and Bala Shanmugan. *"Islamic Banking: A Practical Perspective."* Petaling Jaya: Selangor Darul Ehsan Pearson Longman, 2008.
- Kline, R. B. *"Methodology in the Social Sciences. Principles and Practice of Structural Equation Modeling"*. (2nd ed.). New York, NY, US: Guilford Press, 2005
- Lorne L. Dawson, *"Cults and New Religious Movements"*, London: Sage Publication, 2003.
- Louis O. Kelso, Mortimer J. Adler, *"The Capitalist Manifesto"*. New York: Random House, 1958.
- London, T. and Hart, S. *"Next Generation Business Strategies for the Base of the Pyramid: New Approaches for Building Mutual Value."* Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ, 2011.
- LTN NU JATIM. *"Ahkamu al-Fuqaha fi Muqararati Mu'tamirati Nahdlatul Ulama'."* Surabaya: Diantama, 2004.
- M. Dawam Rahardjo. *"Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi."* Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Mahrus El-Mawa dkk. *"20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU."* Cet I. Jakarta: Lakpesdam NU, 2005.
- Mubyarto. *"Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia."* Yogyakarta: Adtya Media, 1997.
- Muh. Syafi'I Antonio. *"Bank Syari'ah dari Teori ke Paraktek."* Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Muhammad Tholhah Hasan. *"Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia"*, Cet. IV. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

- Makhalul Ilmi S. M., *"Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan Dan Alternatif Solusi"*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Manoj Kumar Bhusal. *"Does Microfinance Really Empower? A Study on The Contribution of Microfinance in Empowering The Poor Women of Northen Bangladesh"*. Diaconia University of Applied Sciences Finland, 2010.
- Mahmood Ahmed, *"The Role of RDS in the Development of Women Entrepreneurship Under Islamic Microfinance: A Case Study of Bangladesh."* In M. Obidullah & H. Salma (Eds.), *Islamic Microfinance for Micro and Medium Enterprises*. Jeddah: IRTI and UBD, 2011.
- Mahmoud El-Gamal, M.A., *"Islamic Finance: Law, Economics and Practice"*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*". Jakarta: LP3ES, 1995.
- Mas'ood, *"Politik, Birokrasi dan Pembangunan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Manfreed Zeller & Richard L. Meyer, *"Improving the Performance of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact"*. In Mamfreed Zeller & Richard L. Meyer (Eds.), *"The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach and Impact."* Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002.
- Minto Waluyo. *"Panduan dan Aplikasi Struktural Equation Modelling untuk Aplikasi Model dalam Penelitian Teknik Industri, Psikologi, Sosial dan Manajemen."* Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Moh. Natsir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalai Indonesia, 2009.
- Mohammed El-Komi & Rachel Croson, *Experiment in Islamic Microfinance*. Dallas: University of Texas, 2011.
- Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, *"Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment,"* in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing, London: Palgrave Macmillan UK, 2014.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mubyarto. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- M. Obaidullah & T. Khan, *"Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiative"*. Jeddah: IRTI-IDB, 2008
- M. Umer Chapra, *"What Is Islamic Economics?"*. Jeddah: IRTI, 2001.

- _____, *"The Economic System of Islam"*. (Lahore: Oxford University Press, 1970.
- _____, *"Islam and Economics Challenge"*. Leicester UK: The Islamic Foundation, 2002.
- _____, *"Islam and Economic Development"*. Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1993.
- N.Oneng Nurul Bariyah. *"Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi."* Jakarta: Wahana Kardofa, 2012.
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmadi Syafie. *"Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi."* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Otoritas Jasa Keuangan, *"Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017."*
- Ony S. Priyono dan A. M. W. Pranarka. *"Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi"*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 1996.
- Patrick Baron (ed), *"Local Conflict and Community Development in Indonesia Assesing the Impact of the Kecamatan Development Program"*. Jakarta: Indonesian Social Development, 2006.
- Robert Chambers, *"Rural Development: Putting The Last First"*. New York: Logman inc, 1983.
- Robert Ndungu Kamau. *"The Impact of Microfinance Services on Women Empowerment: A Case Study of Kikuyu Division"*. Masters of Business Administraton (MBA) School of Business Administration University of Nairobi, 2012.
- Sahal Mahfudh. *"Nuansa Fikih Sosial."* Cet. II. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Sarjono, Haryadi & Winda Julianita. *"SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset."* Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Schumpeter, J.A. *"The Theory of Economic Development."* Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Soeleiman Fadeli. *"Antologi Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah NU"*. Cet. III. Surabaya: Khalista, 2010.
- Sidney G. Tarrow, *"Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics"*. New York: Cambridge University Press, 2011.
- Smith, Jackie, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco (eds). *"Transnational Social Movements and Global Politics: Solidarity Beyon the State."* New York: Cambridge University Press, 1997.

- Sri Edi Swasono. *Keindonesiaan; Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: Aditya Media, 2015.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeta, 2011.
- _____, “*Statika Untuk Penelitian*”. Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tashwirul Afkar. “*Ekonomi NU: Mengembalikan Spirit Nahdlatut Tujjar*.” Edisi No. 28 Tahun 2009. Jakarta: Lakpesdam NU, 2009.
- Timur Mahardika. “*Gerakan Massa: Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*”. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000.
- T. El-Diwany (ed.), “*Islamic Banking and Finance: What it Is and What It Could Be*”. Boston: 1 st Ethical Chritable Trust, 2010.
- Usman Sunyoto. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- United Nations Conference on Trade and Development (CTAD), “*Trade and Development Report 1985*”. New York: United Nation Publication, 1985.
- Wijanto, Setyo Hari. “*Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8: Konsep dan Tutorial*.” Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- World Bank. “*Nigeria: Poverty in the Midst of Plenty: The Challenge of Growth with Inclusion: A World Bank Poverty Assessment*”. World Bank, Washington, DC, 1996.
- Yamin, Sofyan, and Heri Kurniawan. “*Structural equation modeling: Belajar lebih mudah teknik analisis data kuesioner dengan Lisrel-PLS*.” Jakarta: Salemba Infotek 2009
- Yusuf al-Qardhawi. “*Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajahā al-Islām*.” Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985.
- Yusuf Qardhawi. “*Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*.” Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

B. Jurnal Nasional dan Internasional

- Abul Hassan, “The Challenge in Poverty Alleviation: Role of Islamic Microfinance and Social Capital,” *Humanomics* 30, no. 1 (February 4, 2014): 76–90, <https://doi.org/10.1108/H-10-2013-0068>.

- _____, "Financial Inclusion of the Poor: From Microcredit to Islamic Microfinancial Services," *Humanomics* 31, no. 3 (July 22, 2015): 354–371, <https://doi.org/10.1108/H-07-2014-0051>.
- Abul Hassan and Sabur Mollah, "Small Solutions: Poverty Alleviation Through Islamic Microfinance," in *Islamic Finance: Ethical Underpinnings, Products, and Institutions*, ed. Abul Hassan and Sabur Mollah (Cham: Springer International Publishing, 2018), 149–82, https://doi.org/10.1007/978-3-319-91295-0_12.
- Ahmad Izudin, "Gerakan Sosial Dan Nalar Islam Progresif: Mencari Titik Temu Kerangka Metateori," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (January 11, 2018): 281–300–300, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04>.
- Ahmad Suhendi, "Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial," *Informasi* 18, No. 2 (1 Juli, 2013): 105–116, <https://doi.org/10.33007/inf.v18i2.73>
- Al-Harran, "Introduction: Cases in Islamic Finance," *Arab Law Quarterly* 14, no. 3 (January 1, 1999): 193–202, <https://doi.org/10.1163/026805599125826426>.
- Al-Smadi, Mohammad & Al-Wabel, Saad. The Impact of E- Banking on The Performance of Jordanian Banks. *Journal of Internet Banking and Commerce* 16, no. 2 (2011): 1–10, https://www.researchgate.net/publication/289005410_The_Impact_of_E-Banking_on_The_Performance_of_Jordanian_Banks atau bisa diakses di <http://www.arraydev.com/commerce/jibc/>
- Andi Purwono, "Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama' (NU) Indonesia". *Jurnal Politik Profetik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 2 No. 2 tahun 2013*.
- Anwar Abbas, "Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", *Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, no. 67 (Juli 2009).
- Antoinette Coleman and Howard M. Rebach, "Poverty, Social Welfare and Public Policy," in *Handbook of Clinical Sociology*, ed. Howard M. Rebach and John G. Bruhn, Clinical Sociology: Research and Practice (Boston, MA: Springer US, 2001), 353–92, https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1217-2_18.
- Anwar Abbas, "Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", *Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, no. 67 (Juli 2009).
- Arner, Douglas W. and Barberis, Janos Nathan and Buckley, Ross P., "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?." (October 1, 2015). University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047;

UNSW Law Research Paper No. 2016-62. Available at SSRN:
<https://ssrn.com/abstract=2676553> or
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2676553>

- Asyraf Wajdi Dusuki, "Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives," *Humanomics* 24, no. 1 (February 22, 2008): 49–66, <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>.
- Beckmann, M., Zeyen, A. and Krzeminska, A. "Mission, finance, and innovation: the similarities and differences between social entrepreneurship and social business" *BT-social business: theory, practice, and critical perspectives*, in Grove, A. and Berg, G.A. Springer, Berlin and Heidelberg, (2014), 23-41, doi: 10.1007/978-3-642-45275-8_2.
- Biswajit Ghosh, "NGOs, Civil Society and Social Reconstruction in Contemporary India," *Journal of Developing Societies* 25, no. 2 (April 1, 2009): 229–52, <https://doi.org/10.1177/0169796X0902500205>.
- Changhwan Shin, "A Conceptual Approach to the Relationships between the Social Economy, Social Welfare, and Social Innovation," *Journal of Science and Technology Policy Management* 7, no. No. 2 (July 4, 2016): 154–72, <https://doi.org/10.1108/JSTPM-08-2015-0027>.
- Christensen, Clayton M., Efosa Ojomo, and Derek van Bever. "Africa's New Generation of Innovators". *Harvard Business Review* 95, no. 1 (January-February 2017): 129-136.
- Claes Fornell and David F. Larcker, "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error," *Journal of Marketing Research* 18, no. 1 (1981): 39–50, <https://doi.org/10.2307/3151312>.
- Crowley, S. L., & Fan, X. Structural Equation Modeling: Basic Concepts and Applications in Personality Assessment Research. *Journal of Personality Assessment* 68, No. 3 (1997), 508-531. http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa6803_4
- David Audretsch, "Entrepreneurship Research," *Management Decision* 50, no. No. 5 (May 25, 2012): 755–764, <https://doi.org/10.1108/00251741211227384>.
- Darwanto. "Startegi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan". *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. VIII No. 2 Desember 2014, 501-522.
- Daniel Veit et al., "Business Models," *Business & Information Systems Engineering* 6, no. 1 (February 1, 2014): 45–53, <https://doi.org/10.1007/s12599-013-0308-y>.
- David Pettinicchio, "Elites, Policy, and Social Movements | On the Cross Road of Polity, Political Elites and Mobilization," accessed February 20, 2019,

<https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S0895-993520160000024006>.

- Deden Suparman, “Kewirausahaan-Sosial Berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) (Studi Analisis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Ummat atas Unit Usaha-Sosial Persis, NU, dan Muhammadiyah di Kabupaten Garut),” *JURNAL ISTEK: Vol. VI, No. 1–2, 158-164*. August 1, 2015.
- Desi Rahmawati, “Gerakan Petani Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia: Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTAM),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 3 (2003): 29–58, <https://doi.org/10.22146/jsp.11084>.
- Dennis, C. and Papamatthaiou. “Shoppers Motivations for E-shopping –Work in Progress.” *European Institute of Retail and Services Studies, 10th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Sciences 2003*. Portland, OR, EIRASS.
- Dimpos Manulu, “Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara,” *Populasi* 18, no. 1 (July 12, 2016), <https://doi.org/10.22146/jp.12066>.
- Dina Elshurafa, “Islamic Capitalism—An Imminent Reality or a Hopeful Possibility for Islamic Finance?,” *Arab Law Quarterly* 26, no. 3 (2012): 339–60, <https://www.jstor.org/stable/23235576>.
- Dzurotul Qorina, Suwito Eko Pramono, and Ibnu Sodik, “Peranan Muslimat Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Sosial Keagamaan Di Batang Tahun 1998-2010,” *Journal of Indonesian History* 4, No. 1, 2015.
- Edib Smolo and M. Kabir Hassan, “The Potentials of Mushārakah Mutanāqisah for Islamic Housing Finance,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 4, No. 3. August 30, 2011.
- Emmanuel O. Okon, “MSMEs Performance in Nigeria: A Review of Supply Chain Collaboration Challenges,” *International Journal of Marketing Research Innovation* 2, no. 1 (January 20, 2018): 16–30, <https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijmri/article/view/103>.
- Esther Duflo, “Women Empowerment and Economic Development,” *Journal of Economic Literature* 50, no. 4 (2012): 1051–79, <http://dx.doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>.
- Eric Ansong and Richard Boateng, “Surviving in the Digital Era – Business Models of Digital Enterprises in a Developing Economy,” *Digital Policy, Regulation and Governance* 21, no. 2 (January 14, 2019): 164–78, <https://doi.org/10.1108/DPRG-08-2018-0046>.
- Euis Amalia, “Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro Di Indonesia,”

- Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (September 1, 2011), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497>.
- Faisal Dean and Rashidah Abdul Rahman, "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance," *Humanomics* 29, no. 4 (October 28, 2013): 293–306, <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>.
- Fisit Suharti, "Sinergitas Islamic Microfinance Institution (IMFI): Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 31, 2018): 52–80, <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1626>.
- Galindo and Méndez-Picazo, "Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth," *Management Decision* 51, No. 3 (September 22, 2013), <https://doi.org/10.1108/00251741311309625>.
- Geoffrey Heal, "Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework," *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice* 30, no. 3 (July 1, 2005): 387–409, <https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510037>.
- Gerrard, Philip & Cunningham, J. "The diffusion of Internet Banking Among Singapore Consumers." *International Journal of Bank Marketing* 21, no 1 (February 2003): 16-28. <https://doi.org/10.1108/02652320310457776>.
- Giovanni Dosi, "Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change," *Research Policy* 11, no. 3 (June 1, 1982): 147–62, [https://doi.org/10.1016/0048-7333\(82\)90016-6](https://doi.org/10.1016/0048-7333(82)90016-6).
- Gunawan Sumodiningrat, "Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Journal of Indonesian Economy and Business* 14, no. 3 (July 1, 1999), <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39431>.
- Halima Begum et al., "Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach," *Journal of Economic and Administrative Sciences*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0007>.
- Hanny Cueva Beteta, "What Is Missing in Measures of Women's Empowerment?," *Journal of Human Development* 7, no. 2 (July 1, 2006): 221–41, <https://doi.org/10.1080/14649880600768553>.
- Hartomi Maulana, Dzuljastri Abdul Razak, and Adewale Abideen Adeyemi, "Factors Influencing Behaviour to Participate in Islamic Microfinance," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, April 16, 2018, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0134>.
- Hans Dieter SEIBEL, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision," *Sojourn: Journal of*

- Social Issues in Southeast Asia* 23, no. 1 (2008): 86–103, <https://www.jstor.org/stable/41220061>.
- Halima Begum et al., “Development of Islamic Microfinance: A Sustainable Poverty Reduction Approach,” *Journal of Economic and Administrative Sciences*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0007>.
- Hefner, Robert W. “*Islamic Economics and Global Capitalism*.” *Society* 44, no. 1, 2006.
- Hooper, D., Coughlan, J., and Mullen, M. R. Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 6, No. 8 (2008): 53-60 <http://www.ejbrm.com/vol6/v6-i1/v6-i1-papers.htm>
- Indra Widiarto and Ali Emrouznejad, “Social and Financial Efficiency of Islamic Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis Application,” *Socio-Economic Planning Sciences* 50 (June 1, 2015): 1–17, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2014.12.001>.
- Ikedinachi K. Ogamba, “Millennials Empowerment: Youth Entrepreneurship for Sustainable Development,” *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, November 29, 2018, <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-05-2018-0048>.
- James Austin, Howard Stevenson, and Jane Wei-Skillern, “Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?,” *Entrepreneurship Theory and Practice* 30, no. 1 (January 1, 2006): 1–22, <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x>.
- Jason Lortie, Gary J. Castrogiovanni, and Kevin C. Cox, “Gender, Social Salience, and Social Performance: How Women Pursue and Perform in Social Ventures,” *Entrepreneurship & Regional Development* 29, no. 1–2 (January 1, 2017): 155–73, <https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1255433>.
- Jeremy Hall et al., “Entrepreneurship and Innovation at the Base of the Pyramid: A Recipe for Inclusive Growth or Social Exclusion?,” *Journal of Management Studies* 49, no. 4 (2012): 785–812, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01044.x>.
- Jeffrey Berejikian, “Revolutionary Collective Action and the Agent-Structure Problem,” *The American Political Science Review* 86, no. 3 (1992): 647–657, <https://doi.org/10.2307/1964128>.
- Jhon Friedman, “Empowerment, The Politics of Alternative Development,” *Capital & Class* 18, no. 2 (July 1, 1994): 142–44, <https://doi.org/10.1177/030981689405300115>.

- Kalpana Bardhan and Stephan Klasen, "UNDP's Gender-Related Indices: A Critical Review," *World Development* 27, no. 6 (June 1, 1999): 985–1010, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00035-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00035-2).
- Katharine Esty, "Lessons from Muhammad Yunus and the Grameen Bank: Leading Long-Term Organizational Change Successfully," in *Leading and Managing in the Social Sector: Strategies for Advancing Human Dignity and Social Justice*, ed. S. Aqeel Tirmizi and John D. Vogelsang, Management for Professionals (Cham: Springer International Publishing, 2017), 31–39, https://doi.org/10.1007/978-3-319-47045-0_3.
- Kevin Chen, "Financial Innovation and Technology Firms: A Smart New World with Machines," in *Banking and Finance Issues in Emerging Markets*, vol. 25, 0 vols., International Symposia in Economic Theory and Econometrics 25 (Emerald Publishing Limited, 2018), 279–92, <https://doi.org/10.1108/S1571-038620180000025012>.
- Kholid Mawardi, "NU Dan Problem Kemiskinan (Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24090/komunika.v7i2.380>.
- Khusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (December 1, 2010): 1-22–22, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.755>.
- Kholis, Nur, "The Contribution of Islamic Microfinance Institution in Increasing Social Welfare in Indonesia (A Case Study of Bmt's Role At Pakem Market Micro Traders Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi Islam SYIRKAH* 4, no. 1 (2009): 1978-0079.
- Lauren Gurrieri et al., "Social Marketing and Social Movements: Creating Inclusive Social Change Coalitions," *Journal of Social Marketing* 8, no. 4 (August 8, 2018): 354–77, <https://doi.org/10.1108/JSOCM-12-2016-0078>.
- Lee Burke and Jeanne M. Logsdon, "How Corporate Social Responsibility Pays Off," *Long Range Planning* 29, no. 4 (August 1, 1996): 495–502, [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(96\)00041-6](https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00041-6).
- Leo d'Anjou and John Van Male, "Between Old and New: Social Movements and Cultural Change," *Mobilization: An International Quarterly* 3, no. 2 (October 1, 1998): 207–26, <https://doi.org/10.17813/mai.3.2.mv32162701623653>.
- Lesmana, Teddy, "The Role of Islamic Micro Financial Cooperatives (Baitul Maal Wat Tamwil) In Local Economic Development: Case Study of Three Provinces in Indonesia." *Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (2008): 49-62.

- M. Browning and P. A. Chiappori, "Efficient Intra-Household Allocations: A General Characterization and Empirical Tests," *Econometrica* 66, no. 6 (1998): 1241–78, <https://doi.org/10.2307/2999616>.
- Matthias Doepke and Michèle Tertilt, "Does Female Empowerment Promote Economic Development?," *Journal of Economic Growth*, August 20, 2019, <https://doi.org/10.1007/s10887-019-09172-4>.
- Md Mahfuz Ashraf et al., "Social Business as an Entrepreneurship Model in Emerging Economy," *Management Decision* 57, No. 5 (May 13, 2019), <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0343>.
- Md Mahmudul Alam, Salwana Hassan, and Jamaliah Said, "Performance of Islamic Microcredit in Perspective of Maqasid Al-Shariah: A Case Study on Amanah Ikhtiar Malaysia," *Humanomics* 31, no. 4 (November 9, 2015): 374–84, <https://doi.org/10.1108/H-12-2014-0072>.
- Machel Sipahelut, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara," *Tesis Institut Pertanian Bogor*, 2011, 27-28, <http://repository.ipb.ac.id/xmlui/handle/123456789/46703>.
- Marina Kudinska, Inna Romānova, "Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity?," *ResearchGate*, accessed March 9, 2019, <http://dx.doi.org/10.1108/S1569-375920160000098002>.
- Miftahul Huda, "Motherhood Spirit untuk Kedermawanan Sosial Di Muslimat Nahdlatul Ulama Ponorogo," *Kodifikasi* 9, No. 1 37-60. December 1, 201.
- Michela Mari, Sara Poggesi, and Luisa De Vita, "Family Embeddedness and Business Performance: Evidences from Women-Owned Firms," *Management Decision* 54, no. No. 2 (March 21, 2016): 467–500, <https://doi.org/10.1108/MD-07-2014-0453>.
- Michael W. Browne and Robert Cudeck, "Alternative Ways of Assessing Model Fit," *Sociological Methods & Research* 21, no. 2 (November 1, 1992): 230–58, <https://doi.org/10.1177/0049124192021002005>.
- Miguel-Ángel Galindo and María-Teresa Méndez-Picazo, "Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth," *Management Decision* 51, no. No. 3 (March 22, 2013): 501–14, <https://doi.org/10.1108/00251741311309625>.
- Minto Waluyo. "Panduan dan Aplikasi Struktural Equation Modelling untuk Aplikasi Model dalam Penelitian Teknik Industri, Psikologi, Sosial dan Manajemen." Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* VI, No. 1 (2015): 37–56, <https://doi.org/DOI: 10.21580/economica.2015.6.1.785>.

- Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, "Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment," in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 75–96, https://doi.org/10.1057/9781137372697_7.
- Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, "The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution," *Humanomics* 31, no. 2 (May 11, 2015): 160–82, <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.
- Muhtadi Ahmad, "Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Dalam Perkembangan Umkm Berbasis Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. II, No. 1, 1-34. August 1, 2010.
- Muhammad Akhyar Adnan and Shochrul Rohmatul Ajija, "The Effectiveness of Baitul Maal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution," *Humanomics* 31, no. 2 (May 11, 2015): 160–82, <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>.
- Muhammad Mahbubi Ali and Ir Ascarya, "Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 5, no. 2 (March 9, 2014), <https://doi.org/10.30993/tifbr.v5i2.44>.
- Muhammad Syafii Antonio, "Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Enterprises In Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation," *Journal Of Indonesian Islam* 5, no. 2 (December 1, 2011): 313-334–334, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.313-334>.
- Muhammad Yunus, "Creating a World Without Poverty: Social Business And The Future Of Capitalism," *Global Urban Development Magazine* 4, no. 2 (November, 2008), accessed February 28, 2019, <https://www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2/Yunus.htm>.
- Mohammed Abdul Samad, "Islamic Micro Finance: Tool for Economic Stability and Social Change," *Humanomics* 30, no. 3 (August 5, 2014): 199–226, <https://doi.org/10.1108/H-12-2013-0085>.
- Mohammed Obaidullah and Nasim Shah Shirazi, "Integrating Philanthropy with Microfinance: Models of Community Empowerment," in *Social Impact Finance*, ed. Faisal M. Atbani and Cristina Trullols, IE Business Publishing (London: Palgrave Macmillan UK, 2014), 75-96, https://doi.org/10.1057/9781137372697_7.
- Naila Kabeer, "Is Microfinance a 'Magic Bullet' for Women's Empowerment? Analysis of Findings from South Asia," *Economic and Political Weekly* 40, no. 44/45 (2005): 4709–18, <https://www.jstor.org/stable/4417357>.

- Nazirwan, Mohamad. "Embracing The Islamic Community-Based Microfinance For Poverty Alleviation." (2010). https://www.researchgate.net/publication/265068882_Embracing_Microfinance_Proposed_Collaboration_Between_Zakat_Institution_And_Microfinance_Institutions
- Nihayatus Sholichah dan Mesak Paidjala. "Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Tuban" *Jurnal Asketik Vol. 1 No. 1 Juli Tahun 2016*.
- Norman G. Kurland, "The Just Third Way: Basic Principles of Economic and Social Justice | Center for Economic & Social Justice," accessed March 5, 2019, <https://www.cesj.org/resources/articles-index/the-just-third-way-basic-principles-of-economic-and-social-justice-by-norman-g-kurland/>.
- Nurullah "Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi Indonesia" *Jurnal Hikamuna Edisi 1 Vol. 1 Tahun 2016*, 16-32.
- Obaidullah, Mohammed & Shirazi, Nasim. *IRTI Islamic Social Finance Report 2017*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26825.44645>.
- Oman Fathurahman, "Jaringan Ulama: Pembaharuan Dan Rekonsiliasi Dalam Tradisi Intelektual Islam Di Dunia Melayu-Indonesia," *Studia Islamika* 11, no. 2 (2004): 361–85, <https://doi.org/10.15408/sdi.v11i2.606>.
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *SSRN Scholarly Paper* (Rochester, NY: Social Science Research Network, April 1, 2009), <https://papers.ssrn.com/abstract=2847573>.
- Permata Wulandari and Salina Kassim, "Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia," *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (March 11, 2016): 216–34, <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.
- Peter Gomber, Jascha-Alexander Koch, and Michael Siering, "Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions," *Journal of Business Economics* 87, no. 5 (July 1, 2017): 537–80, <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.
- Rashidah Abdul Rahman and Faisal Dean, "Challenges and Solutions in Islamic Microfinance," *Humanomics* 29, no. 4 (October 28, 2013): 293–306, <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>.
- R. Andi Irawan, "Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 8, 2016): 149–62, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.149->.
- _____, "Memobilisasi Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016): 169–

- Renny Oktafia, “Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur,” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (May 14, 2017): 85–92, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/11>.
- Richard J. Arend, “Emergence of Entrepreneurs Following Exogenous Technological Change,” *Strategic Management Journal* 20, no. 1 (1999): 31–47. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199901\)20:1<31::AID-SMJ19>3.0.CO;2-O](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199901)20:1<31::AID-SMJ19>3.0.CO;2-O)
- Ronald J. Gilson and Bernard S. Black, “Does Venture Capital Require an Active Stock Market?,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, May 1, 1999), <https://papers.ssrn.com/abstract=219174>.
- Rose Abdullah and Abdul Ghafar Ismail, “Al-Tawhid in Relation to the Economic Order of Microfinance Institutions,” *Humanomics* 30, no. 4 (October 30, 2014): 325–48, <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>.
- Rusydiana, Aam S., and Abrista Devi. “Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP).” *Business & Management Quaterly Review* 4, no. 1 (2013): pp. 51-62. <https://core.ac.uk/display/83283333?recSetID=>
- Samuel O. Idowu et al., eds., “Lending for Poverty Eradication, Professor Muhammad Yunus,” in *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013), 1585–1585, https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100988.
- Sikhondze, Wilson B. “The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland”. *Adult Education and Development* No. 53 (1999), Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn: 112/DW.
- Stefanie Chambers, “Minority Empowerment and Environmental Justice,” *Urban Affairs Review* 43, no. 1 (September 1, 2007): 28–54, <https://doi.org/10.1177/1078087407301790>.
- Swain, R.B. and Wallentin, F.Y. “Economic or non-economic factors – what empowers women?”, *International Review of Applied Economics*, Vol. 26 No. 4 (2012), pp. 425-444. <http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:126994/FULLTEXT01.pdf>
- Shofwan Al Banna Choiruzzad, “More Gain, More Pain: The Development of Indonesia’s Islamic Economy Movement (1980s–2012),” *Indonesia*, no. 95 (2013): 125–72, <https://doi.org/10.5728/indonesia.95.0125>.

- Syamsu A. Kamaruddin, "Pemberontakan Petani Unra 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Sulawesi Selatan Pada Masa Pendudukan Jepang)," *Hubs-Asia* 10, no. 1 (August 15, 2012): 19–35, <https://doi.org/10.7454/mssh.v16i1.1222>.
- Sri Roviana, "Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik" *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, No. 2, Desember (2014), 403-424, <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.403-424>
- Sumedha Chauhan, Parul Gupta, and Mahadeo Jaiswal, "Factors Inhibiting the Internet Adoption by Base of the Pyramid in India," *Digital Policy, Regulation and Governance* 20, no. 4 (June 11, 2018): 323–36, <https://doi.org/10.1108/DPRG-01-2018-0001>.
- Stam, E. & Garnsey, E. "Entrepreneurship in The Knowledge Economy," *Centre for Technology Management (CTM) Working Paper*, No. 2007/04. Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.1923098>
- Taufik, "Kemiskinan, Perempuan dan Agama". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, 145-164, (Juni, 2015), 150. <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i1.325>
- Tejada, Jeffry J., and Joyce Raymond B. Punzalan. "On The Misuse of Slovin's Formula" *The Philippine Statistician* 61, no. 1 (2012): 129-136
- Thomas Puschmann, "Fintech," *Business & Information Systems Engineering* 59, no. 1 (February 1, 2017): 69–76, <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>.
- Teegen, Hildy, Jonathan P. Doh, and Sushil Vachani. "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda." *Journal of International Business Studies* 35, no. 6 (2004): 463-83. <http://www.jstor.org/stable/3875234>.
- Tejada, Jeffry J., and Joyce Raymond B. Punzalan. "On The Misuse of Slovin's Formula" *The Philippine Statistician* 61, no. 1 (2012): 129-136.
- Vandana Desai, "NGOs, Gender Mainstreaming, and Urban Poor Communities in Mumbai," *Gender and Development* 13, no. 2 (2005): 90–98. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332290>
- Villis, U., Strack, R., Bruysten, S. and Yunus, M. "*The Power of Social Business: Lessons from Corporate Engagements with Grameen*", 2013. http://socialbusinesspedia.com/CaseStudyReport_PDF/BCG_Report_2013.pdf (diakses pada Kamis, 16 September 2019).
- Villis, U., Strack, R., Bruysten, S. and Yunus, M. "*The Power of Social Business: Lessons from Corporate Engagements with Grameen*", 2013. <http://socialbusinesspedia.com/CaseStudy>

Report_PDF/BCG_Report_2013.pdf (diakses pada Kamis, 16 September 2019).

- Vichuda Nui Polatoglu and Serap Ekin, "An Empirical Investigation of the Turkish Consumers' Acceptance of Internet Banking Services," *International Journal of Bank Marketing* 19, no. 4 (July 1, 2001): 156–16, <https://doi.org/10.1108/02652320110392527>.
- William J. Hippler III, M. Kabir Hassan, and Ali Ashraf, "Performance of Microfinance Institutions in Muslim Countries," *Humanomics* 30, no. 2 (May 6, 2014): 162–82, <https://doi.org/10.1108/H-11-2013-0073>.
- Widiyanto bin Mislan Cokro Hadisumarto and Abdul Ghafar B. Ismail, "Improving the Effectiveness of Islamic Micro-financing: Learning from BMT Experience," *Humanomics* 26, no. 1 (February 23, 2010): 65–75, <https://doi.org/10.1108/08288661011025002>.
- Yasushi Suzuki, Sigit Pramono, and Rufidah Rufidah, "Islamic Microfinance and Poverty Alleviation Program: Preliminary Research Findings from Indonesia," *SHARE Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (June 30, 2016).
- Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura: Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51, no. 1 (June 15, 2013): 1–32, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>.
- Yunus, M., Dalsace, F., Menasce, D. and Faivre-Tavignot, B. "Reaching the Rich World's Poorest consumers", *Harvard Business Review*, Vol. 3 No. 1, (2015), 46-53, <https://hbr.org/2015/03/reaching-the-rich-worlds-poorest-consumers>.

C. Website

Berita Nahdlatul Ulama, 15 Februari 1939, 171.

<http://www.jatimtimes.com/baca/152169/20170328/215005/peringatan-harlah-ke71-muslimat-nu-23-ribu-warga-muslimat-penuhi-istiqlal/>

<http://www.nu.or.id/post/read/59990/nu-dan-ekonomi-kerakyatan-berbasis-pesantren>

<http://www.nu.or.id/post/read/63295/pesantren-sidogiri-mercusuar-pengembangan-ekonomi-syariah>

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html>

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1-p2-dan-garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-tahun-2018.html> (diakses pada Jum'at, 13 September 2019).

<https://nasional.tempo.co/read/417437/rata-rata-orang-miskin-indonesia-warga-nu> (diakses pada Sabtu, 14 September 2019).

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

<https://www.muslimat-nu.com/koperasi-an-nisa-tingkatkan-ekonomi-umat/>

<https://www.muslimat-nu.com/update-ilmu-koperasi-muslimat-nu-pamekasan-studi-banding-ke-malang/>

<https://www.suara.com/news/2017/03/26/183134/khofifah-sebut-nahdliyin-banyak-yang-miskin-dan-terbelakang> (diakses pada Sabtu, 14 September 2019).

GLOSARIUM

- Akad:** Kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah untuk membuat perjanjian atau kerjasama.
- Asset:** Segala sesuatu yang bernilai komersial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu.
- ATM:** *Automated Teller Machine* (ATM) atau mesin teller otomatis yaitu mesin yang dapat menampung uang kas dari melayani transaksi perbankan kepada nasabah secara otomatis.
- Bayt al-Mal wat Tamwil:** Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil yang juga lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan tujuan profit atau komersial dan non-profit.
- BUMN:** BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003.
- Fintech:** *Financial Technology (FinTech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
- Koperasi:** Organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah:** Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf.
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah:** Semua badan yang melalui kegiatan di bidang keuangan menarik uang, dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam skala mikro yang berasaskan Syariah.
- Mabadi' Khoiru al-Ummah al-Khamsah:** Konsep yang digagas oleh KH. Mahfud Shiddiq (Presiden HBNO) yang dijadikan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi kaum *Nahdliyyin*.
- Muamalah:** Interaksi sosial dalam sebuah hubungan antar manusia yang sesuai prinsip syariah.
- Mudharabah Muthlaqah:** Akad *mudharabah* ketika *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.
- Mudharabah:** Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal

dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek.

Murabahah: Perjanjian jual-beli antara lembaga keuangan dengan nasabah/anggota. lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah/anggota kemudian menjualnya kepada nasabah/anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara keduanya.

Musarakah: (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Nisbah: Porsi bagi hasil antara bank dan nasabah yang disepakati dalam suatu perjanjian bagi hasil (*mudharabah*).

Qardhul Hasan: Kegiatan penyaluran dana yang didapatkan dari infaq, shadaqah dan sumbangan dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Rahn: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. *Rahn* berarti juga *pledge* atau *pawn* (gadai), yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak.

Riba: menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ta'awun: Tolong-menolong yang didasari prinsip saling menjamin, kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja.

Wadi'ah yad al-Dhamanah: Adalah *wadi'ah* dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya.

INDEKS

- anggota, 2, 3, 4, 6, 19, 24, 40, 45, 46, 50, 54, 55, 56, 58, 68, 70, 78, 79, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106
- Bait al-Maal wat Tamwil*, 1, 2, 41, 43
- BMT, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 70, 78, 79, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 107, 121, 123, 125
- BMT NU, 2, 3, 5, 6, 10, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 70, 78, 79, 85, 86, 95, 97, 98, 99, 104, 107
- BMT Sidogiri, 2, 3, 5, 6, 10, 40, 41, 44, 46, 53, 54, 58, 70, 85, 89, 90, 95, 98, 104
- BPS, 7, 20, 28, 50, 64, 74
- Chapra, 18, 21, 22, 26, 27, 71, 92, 111
- ekonomi Islam, 4, 5, 11, 17, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 69
- ekonomi kerakyatan, 1, 11, 41, 88
- fintech*, 29
- Gerakan, 2, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 66, 108, 113, 114, 116, 124
- Ghozali dan Fuad, 83
- Gus Dur, 14, 40, 52, 69, 89, 107
- kapitalisme, 11, 14, 18, 19, 69, 84
- keadilan, 6, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 63, 69, 70, 71
- kemiskinan, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 89, 104, 125
- keuangan, 1, 2, 5, 8, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 70, 78, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 104, 105, 106
- keuangan mikro syariah, 11, 20, 24, 53, 70, 98, 104, 106
- kewirausahaan, 3, 21, 29, 36, 41, 51, 55, 57, 62, 91, 104
- KH. Mahfudz Shiddiq, 52, 53, 70
- Kiyai, 70, 85, 86, 89, 90, 91, 104
- konvensional, 4, 20, 22, 31, 33, 78, 79
- koperasi, 1, 2, 3, 5, 10, 40, 41, 65, 90, 91, 93, 94, 126
- Koperasi, 1, 2, 3, 5, 6, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 60, 66, 70, 71, 74, 78, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 122
- Koperasi An-Nisa', 2, 3, 5, 6, 40, 42, 45, 46, 48, 53, 58, 70, 78, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 104
- lembaga keuangan mikro syariah, 8, 11, 20, 23, 41, 48, 53, 54, 70, 78, 85, 86, 91, 93, 96, 98, 104, 105, 106
- LKMS, 11, 23, 24, 53, 54, 74, 97, 105, 123
- Madura, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 24, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 78, 79, 84, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 109, 125
- Muslimat, 2, 3, 5, 6, 10, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 70, 78, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 116, 120
- Muslimat NU, 2, 3, 5, 6, 10, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 70, 78, 85, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 104
- Nahdlatul Ulama', 2, 4, 5, 6, 40, 41, 50, 52, 53, 58, 59, 65, 66, 68, 70, 71, 84, 85, 86, 94, 104, 110, 114
- Nahdliyyin*, 68, 70, 84
- NU, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 40, 41, 50, 52, 56, 59, 66, 68, 70, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 104, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 119, 122
- Pamekasan, 3, 9, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 64, 65, 70, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 94

pembangunan ekonomi, 1, 24, 27, 32, 55, 57, 63
 Pemberdayaan, 1, 5, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 63, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 104, 106, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 122
 perempuan, 3, 23, 55, 56, 57, 58, 84, 94
 Pesantren, 5, 10, 50, 87, 88, 90, 91, 104, 108, 120, 125
 pondok pesantren, 2, 10
 produk, 10, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 33, 35, 39, 54, 56, 61, 63, 78, 79, 85, 86, 89, 90, 91, 97, 98, 104, 106
 Provinsi Jawa Timur, 8, 20, 44, 50, 64, 65
 Pulau Madura, 70
 santri, 3, 41, 50, 70, 88, 89, 90, 104
 Sidney Tarrow, 13, 19
 sosial, 1, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 45, 46, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 104, 105, 106
 spiritual, 19, 22, 35, 40, 71, 95
stakeholder, 32, 33, 70, 93, 96
 tabel, 8, 37, 38, 62, 64, 65, 70, 76, 80, 82, 96, 97, 98, 105
 teknologi, 11, 27, 28, 29, 30, 39, 41, 61, 62, 65, 66, 79, 80, 87, 105, 106
 UMKM, 2, 6, 7, 24, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 60, 61, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 96, 97, 105, 117, 123
 ummat, 2, 5, 6, 10, 18, 32, 34, 35, 63, 70, 87, 88
 usaha mikro, kecil dan menengah, 6, 36, 37, 70, 95, 97, 105
 variabel, 61, 75, 76, 77, 78, 81, 105
 Wijanto, 83, 84, 113
 wirausaha, 35, 37

BIODATA PENULIS

SIROJUL ARIFIN SHOFA

DATA PRIBADI

Nama Lengkap:
Sirojul Arifin Shofa
Tempat, Tanggal Lahir:
Pamekasan, 21 Desember 1991
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Status: Menikah
Kewarganegaraan: Indonesia



Agama: Islam
Alamat Sekarang Jl. Jalmak Gg.
1 Dsn. Timur RT/RW: 004/002
Laden Pamekasan Madura
69317
Telepon: 085 3345 8888 4
E-mail: asshofa91@gmail.com

PENDIDIKAN

FORMAL

2001 • MI NURUL QUR'AN
2005 – 2007 • MTs NURUL QUR'AN
2008 – 2010 • MA NURUL QUR'AN
Jurusan • Bahasa
2012 – 2016 • IAI NURUL JADID PAITON
PROBOLINGGO
Fakultas • Syari'ah & Hukum
Program Studi • Ekonomi Syari'ah
2016 – 2020 • SEKOLAH PASCASARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
Konsentrasi • Hukum Ekonomi Islam

NON FORMAL

2001– 2012 • PONDOK PESANTREN NURUL
QUR'AN PATOKAN KRAKSAAN
PROBOLINGGO
2012-2016 • PONDOK PESANTREN NURUL
JADID PAITON PROBOLINGGO

PENGALAMAN ORGANISASI

MTs Nurul Qur'an Kraksaan • 2005-2006

Ketua Osis - Pondok Pesantren dengan Program Unggulan Tahfidz Al-Qur'an.

MA Nurul Qur'an Kraksaan • 2008-2009

Ketua Osis - Pondok Pesantren dengan Program Unggulan Tahfidz Al-Qur'an.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Pamekasan Madura • 2007-2010

Koordinator Bidang Organisasi

BEM Fakultas Syariah & Hukum IAI NURUL JADID • 2012-2014

Kepala Bagian KOMINFO di BEM Fakultas Syariah & Hukum

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAI NURUL JADID • 2013-2014

Divisi Kaderisasi PMII Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Community of Sharia Economic Nurul Jadid (CONSEN) • 2014-2015

Dewan Pertimbangan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) – Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi Islam di bawah naungan FosSEI Regional Jawa Timur

Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FosSEI) KOMSAT TAPAL KUDA • 2015-2016

Sekretaris Jenderal Komsat Tapal Kuda – Forum Silaturahmi Ekonomi Islam yang menaungi KSEI Kampus Se-Tapal Kuda

Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM) PBNU • 2017-2018

Sebagai Anggota

BIODATA PENULIS

SIROJUL ARIFIN SHOFA

PENGALAMAN KERJA

Madrasah Tsanawiyah Ad-Diniyah Nurul Jadid Probolinggo • 2014-2016

Kepala Sekolah

DPP Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia • 2017-2020

Ketua Harian - Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan demokrasi yang didirikan oleh PPI Amerika

DPD RI • 2017-2018

Staff Ahli Ketua DPD RI

Islam Nusantara Center (INC) 2017 • Sekarang

Anggota

Kemenpora RI • 2018-2019

Koordinator Kegiatan dalam bidang pembinaan pemuda generasi millenial, seminar kepemudaan, camping dll di Deputi IV

Pondok Pesantren Nihayatuzzein Teluknaga Kab. Tangerang • 2018-2019

Wakil Pimpinan Pondok Pesantren

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat • 2018-2019

Bagian Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNBS)

Pemateri Seminar • 2018

Tema: **"Ekonomi Mikro & Ekonomi Politik Dalam Membangun Karakter Ekonom Robbani Sebagai Leader of Change"** Jember, 4-6 Mei 2018 di Universitas Negeri Jember Dalam Acara FoSSEI

Leadership Camp

Asisten Dosen 2018 • 2020

Asisten Dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan (FITK), Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah & Hukum (FSH) dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Panitia Acara • 2018

Koordinator Acara Youth Indonesian Festival 2018 **"Toward A Golden Indonesian Generation"**

Purwakarta, 25 Februari 2018

Koordinator Acara **"Annual Meeting Institute of Democracy and Education Indonesia with Ministry of Youth and Support"** 12-13 Maret 2018 di Ballroom Kemenpora RI

Ketua Panitia Acara **International Conference On Asean Buddhist Youth**

"Fostering World Peace Among Religious Community" 27-30 Mei 2018 di Yogyakarta

Perserikatan Umat Beragama (PUB) Tangerang Raya 2018 • Sekarang

Public Relations---analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat

Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI) Jakarta 2018 • Sekarang

Anggota

Founder & Direktur Pojok Kajian Santri Nusantara (POSTRA) 2019 • Sekarang

Kajian ke-Islaman dari berbagai alumni pesantren yang berpusat di Pondok Pesantren Bayt Al-Qur'an Pondok Cabe di bawah naungan Pondok Studi Al-Qur'an (PSQ) yang didirikan oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab

GusDurian Pamekasan 2018 • Sekarang

Penasehat Organisasi

Pemateri Seminar • 2019

Narasumber di PLTU Paiton Kerjasama Kampus INZAH Genggong dengan materi **"Analisis Mikro & Politik Ekonomi"** Probolinggo, 26-28 April 2019.

Pemateri Seminar Nasional • 2019

Narasumber di Ma'had Aly Pondok Pesantren Al-Musthafawiyah pada acara seminar nasional dengan tema **"Islam and Enviromental Awareness"** Bogor, 22-23 Oktober 2019.

Esai Terbaik Kemenpora Kategori Kepemudaan • 2019

Peserta esai terbaik Kemenpora lomba menulis kepemudaan dan sejarah usia muda pahlawan Indonesia tingkat nasional kategori kepemudaan di Jakarta, 14-16 November 2019.



LAKPESDAM



**LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NAHDLUTUL 'ULAMA**



LPNU



**LEMBAGA PEREKONOMIAN
NAHDLUTUL 'ULAMA**

